

**POTENSI DAN INTERAKSI WILAYAH BELAKANG
LAMNO – JANTHO – KEUMALA
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

TESIS

Diajukan Dalam rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Konsentrasi Manajemen Prasarana Perkotaan
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

ZAKARIA
L4D005098



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**POTENSI DAN INTERAKSI WILAYAH BELAKANG
LAMNO – JANTHO – KEUMALA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Konsentrasi Manajemen Prasarana Perkotaan
Program Pascasarjana UniVersitas Diponegoro

Oleh:

ZAKARIA
L4D005098

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal, 4 Juli 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 4 Juli 2008

Pembimbing II

Pembimbing I

Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana UniVersitas Diponegoro

DR. Ir. Joesron Alie Syachbana, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Juni 2008

ZAKARIA
NIM L4D006062

Ilmu adalah lautan yang maha luas
Hanya setetes kita miliki
Tapi jangan berhenti
Teruslah mencari
Selama hayat
Dikandung
badan

Kupersembahkan Untuk :
Almarhum Ayahanda
Ibunda dan adik-adik tercinta
Isteriku yang terkasih Mursyidah,
Dan buah cintaku Dara, Meina dan Shiddieq.

ABSTRAK

Kota Jantho sebagai kota pemerintahan lokasinya terlalu jauh dan tidak sentris dengan kota kecamatan yang ada, sehingga Kota Jantho kurang berkembang. Pembukaan akses yang menghubungkan Kota Jantho, dengan wilayah belakangnya Lamno dan Keumala akan meningkatkan interaksi ke tiga wilayah karena akses tersebut dapat mempersingkat jarak menuju ke Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota propinsi, sehingga Kota Jantho diharapkan menjadi kota transit sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pertumbuhan wilayah bagi kedua kecamatan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut dirumuskan *research questions* yang diangkat dalam studi ini: “Apa sajakah potensi yang dapat ditumbuhkembangkan di wilayah belakang Kota Jantho, Lamno dan Keumala?” dan “Apa sajakah peluang interaksi wilayah dengan adanya jaringan jalan yang menghubungkan Lamno – Kota Jantho – Keumala?”. Tujuan studi ini adalah mengkaji potensi dan interaksi wilayah belakang Lamno – Jantho –Keumala dengan adanya pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dalam mendukung perkembangan Kota Jantho menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat aktivitas pemerintahan dengan sasaran menganalisis peran dan sistem kota dalam perkembangan wilayah dengan adanya pembangunan jalan regional. Menganalisis potensi wilayah belakang Kota Jantho dari aspek sumber daya alam, sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Menganalisis interaksi yang ada saat ini dan yang akan terjadi di pusat-pusat pertumbuhan (*growth center*) dengan adanya pembangunan jalan regional.

Penelitian ini merupakan penelitian survei, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data sekunder, wawancara, dan observasi lapangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan alat analisis *Scalogram Guttman, Location Quotient*, spasial serta analisis deskriptif.

Berdasarkan temuan studi dapat disimpulkan bahwa (1) Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas di Kota Jantho akan mempercepat pertumbuhan wilayah Jantho, Lamno dan Keumala; (2) Pembangunan/peningkatan Jalan Jantho – Lamno dan Jantho – Keumala yang akan membuka akses dan peluang aktivitas ekonomi bagi wilayah yang dilalui oleh ruas jalan tersebut; (3) Pembukaan akses Jantho-Lamno dan Jantho-Keumala akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang cepat berkembang antara lain Kota Keumala, mempunyai peluang untuk melakukan perluasan aktivitas menjadi *supplier* tingkat pasar regional. Kota Jantho akan dapat berperan sebagai penyedia fasilitas transportasi angkutan barang dan terminal transit antardaerah serta pembangunan sektor industri pengolahan hasil pertanian yang datang dari jalur tengah tersebut dan Kota Lamno seperti halnya Keumala akan tumbuh menjadi *supplier* komoditas pertanian untuk pasar regional.

Kata Kunci: Potensi, Interaksi, wilayah belakang.

ABSTRACT

The location of Kota Jantho as government town is too far and not in the center with other subdistrict towns, so that Kota Jantho hardly to be grown. Opening of access connecting Kota Jantho, with its hinterlands region Lamno and Keumala will increase interaction of the three region because the access can take a short cut distance towards to Kota Banda Aceh which is Capital City of the province, so that Kota Jantho is expected to become a transit town and at the same time becomes centre of economic activities and regional growth for both subdistricts. Based on the condition is formulated research questions lifted in this study as follow: “What kind of potency can be developed at the hinterlands regions of Kota Jantho, Lamno and Keumala?” and “What kind of regional interaction opportunity is available with existence of road chain connecting Lamno – Kota Jantho – Keumala?”. Purpose of this study is to analyze potency and interaction of Lamno – Jantho – Keumala hinterland region with the existence of development and improvement of road chain in supporting Kota Jantho development becoming one of the economic growth center and government activity through target role and system of towns in regional development with existence of regional road chain. Beside that, it is need to analyze the potency of natural resources aspect, human resources and economic growth, also analyze the existing and future in its growths center because of the regional road chain.

This research is survey research, by using data collecting technique through secondary data collecting, interview, and observation of field. Method applied is quantitative descriptive method using some analysis tools, namely Scalogram Guttman, Location Quotient, spatial and descriptive analysis.

Based on inferential study it is founded that (1) Improvement of accessibility and facility in Kota Jantho will accelerate the growth of Jantho, Lamno and Keumala region; (2) Development and improvement of road in Jantho – Lamno and Jantho – Keumala which will open economic access and activity opportunity for region passed by the joint streets; (3) Opening of access to Jantho-Lamno and Jantho-Keumala will peep out center new growths, for example Kota Keumala, will have an opportunity to be supplier of regional market level, Kota Jantho will be able to stand for transportation facility feeder of interregional transportation of goods and transit terminal and development of processing industrial sector of agricultural products from the middle line and Kota Lamno alike Keumala will grow to become supplier of agriculture commodity for regional market.

Keyword: Potency, Interaction, Hinterlands Region.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya atas hidayah-Nya penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan, dan tak lupa salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantar manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tesis dengan judul ***“Potensi dan Interaksi Wilayah Belakang Lam No – Jantho – Keumala Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”*** Penulis susun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Kelancaran penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dosen dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan tugas belajar dan mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang .
2. Bapak DR. Ir. Joesron Alie Syachbana, MSc, selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro
3. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP, selaku Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan beliau yang cukup padat.
4. Ibu Wiwandari Handayani, ST., MT, MPS selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyempurnaan penulisan pratesis ini.
5. Rekan-rekan Mahasiswa MTMPP sistem moduler Angkatan Ke 3, atas kritikan dan masukannya dalam penyusunan Tesis ini.
6. Staf Pengajar pada Program Pascasarjana MTPWK Undip, atas perkuliahan dan masukan yang telah diberikan serta staf administrasi bantuan administratifnya.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan tugas ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa pada Tesis ini terdapat banyak kekurangan, saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaannya, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak.

Semarang, Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Sasaran	
1.3.1. Tujuan	7
1.3.2. Sasaran	7
1.4. Ruang Lingkup	8
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial	8
1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah	9
1.5. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Pendekatan Studi dan Metodologi Penelitian.....	15
1.6.1. Kerangka Analisis	15
1.6.1.1. Tujuan dan Hasil Akhir yang Diharapkan	16
1.6.1.2. Proses Analisis	18
1.6.1.3. Metode Analisis	20
1.6.2. Data Penelitian	23
1.6.2.1. Obyek Penelitian	24
1.6.2.2. Jenis Data	24
1.6.2.3. Cara Pengumpulan Data.....	25
1.7. Sistematika Laporan	26

BAB II PERKEMBANGAN WILAYAH DAN INTERAKSI DESA – KOTA	
2.1. Proses Pertumbuhan Wilayah	28
2.2. Kajian Potensi Wilayah Belakang	34
2.3. Peran Daerah Belakang dalam Perkembangan Kota	35
2.4. Peranan Kota dalam Perkembangan Wilayah	37
2.5. Pengaruh Pertumbuhan Daerah Belakang	40
2.6. Sintesis Kajian Pustaka	42
BAB III KARAKTERISTIK KABUPATEN ACEH BESAR	
3.1. Posisi Kabupaten Aceh Besar dalam Konteks Regional	46
3.2. Sumber Daya Alam	48
3.2.1. Pertanian Tanaman Pangan	48
3.2.2. Peternakan.....	50
3.2.3. Kelautan dan Perikanan	51
3.2.4. Kehutanan	51
3.2.5. Perkebunan	52
3.2.6. Pertambangan dan Energi.....	55
3.3. Kependudukan.....	55
3.4. Perekonomian.....	57
3.5. Infrastruktur.....	58
3.5.1. Prasarana Penghubung	59
3.5.2. Fasilitas Sosial dan Ekonomi	64
3.5.2.1. Fasilitas Sosial	64
3.5.2.2. Fasilitas Perekonomian	65
BAB IV POTENSI DAN INTERAKSI WILAYAH LAMNO-JANTHO-KEUMALA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	
4.1. Analisis Sistem Kota	69
4.2. Analisis Peran Kota Jantho, Lamno, Keumala.....	75
4.3. Analisis Potensi Wilayah Belakang.....	79
4.4. Analisis Eksisting Interaksi Wilayah Belakang.....	94
4.5. Analisis Peluang Interaksi Wilayah Belakang	103
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Rekomendasi	115
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Matriks Proses Analisis	19
Tabel I.2	: Kebutuhan Data Penelitian	25
Tabel II.1	: Sintesis Kajian Teori	44
Tabel III.1	: Komposisi Lahan di Kabupaten Aceh Besar Pidie dan Aceh Jaya.....	49
Tabel III.2	: Produksi Tanaman Pangan Tahun 2005	49
Tabel III.3	: Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya Tahun 2005	50
Tabel III.4	: Produksi Perikanan di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya Tahun 2005	51
Tabel III.5	: Produksi Perkebunan di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya Tahun 2005.....	53
Tabel III.6	: Sebaran Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya Tahun 2005	56
Tabel III.7	: Jumlah Angkatan Kerja Menurut Lapangan di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya Tahun 2005	57
Tabel III.8	: Jumlah Fasilitas Sosial di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya Tahun 2005.....	65
Tabel III.9	: Jumlah Fasilitas Perekonomian di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya Tahun 2005	66
Tabel IV.1	: Hierarki Kota-Kota Tahun 2006.....	71
Tabel IV.2	: Hierarki Kota Banda Aceh, Jantho, Lamno Dan Keumala	77
Tabel IV.3	: Sektor Basis Tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya.....	81
Tabel IV.4	: Sektor Basis Tiap Kecamatan di Kabupaten Besar	82
Tabel IV.5	: Sektor Basis Tiap Kecamatan di Kabupaten Pidie	84
Tabel IV.6	: Klasifikasi Sektor Basis per Kabupaten Menurut Kecamatan.....	89
Tabel IV.7	: Komoditi Basis Subsektor Tanaman Pangan per Kecamatan disekitar Kota Jantho, Lamno dan Keumala	92

Tabel IV.8	: Komoditi Basis Subsektor Perkebunan per Kecamatan disekitar Kota Jantho, Lamno dan Keumala	93
Tabel IV.9	: Komoditi Basis Subsektor Peternakan per Kecamatan disekitar Kota Jantho, Lamno dan Keumala	94
Tabel IV.10	: Kondisi Perekonomian dan Hierarki Kota di Kabupaten Aceh Jaya	95
Tabel IV.11	: Kondisi Perekonomian dan Hierarki Kota di Kabupaten Aceh Besar	97
Tabel IV.12	: Kondisi Perekonomian dan Hierarki Kota di Kabupaten Pidie.....	99
Tabel IV.13	: Perbandingan Interaksi Yang Terjadi dan Peluangnya di Kota Jantho, Lamno dan Keumala	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Ilustrasi Permasalahan di Wilayah Studi	4
Gambar 1.2	: Peta Orientasi Wilayah Studi	10
Gambar 1.3	: Diagram Alur Pikir	14
Gambar 1.4.	: Kerangka Analisis.....	17
Gambar 2.1.	: Model Keterkaitan.....	32
Gambar 2.2	: Interaksi Perkotaan dan Pedesaan	33
Gambar 2.3	: Diagram Kerangka Teoritik.....	42
Gambar 3.1	: Peta Tataguna Lahan Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya	54
Gambar 3.2.	: Rencana Jalan Poros Barat Tengah dan Timur Kabupaten Aceh Besar.....	61
Gambar 3.3	: Peta Jaringan Jalan Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya.....	62
Gambar 3.3	: Peta Administrasi Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya.....	67
Gambar 4.1	: Peta Hierarki Kota Kabupaten Aceh Besar Pidie dan Aceh Jaya.....	72
Gambar 4.2	: Peta Hierarki Kota Wilayah Belakang Lamno, Jantho, Keumala	76
Gambar 4.3	: Peta Sektor Basis Kabupaten Aceh Besar Kab. Aceh Besar Pidie dan Aceh Jaya	88
Gambar 4.4	: Peta Sektor Basis Dengan Acuan Data Tiga Kabupaten Aceh Besar Pidie dan Aceh Jaya	91
Gambar 4.5	: Peta Hierarki dan Sektor Basis Kab. Aceh Besar Pidie dan Aceh Jaya	101
Gambar 4.6	: Peta Interaksi Eksisting Kabupaten Aceh Besar Pidie dan Aceh Jaya	102
Gambar 4.7	: Peta Peluang Interaksi Wilayah Belakang Lamno, Jantho, Keumala	104

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A : Protokol Wawancara, Kodefikasi Responden dan Rekaman Wawancara.
- Lampiran B : Data Fasilitas dan Perhitungan Skalogram
- Lampiran C : Data Tenaga Kerja dan Perhitungan LQ

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Jantho adalah Ibukota Kabupaten Aceh Besar yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam umur yang sudah lebih dari dua dasawarsa (1983 – 2008), keberadaan Kota Jantho masih jauh dari apa yang diharapkan, terutama menyangkut peran dan fungsinya sebagai pusat aktivitas pemerintah dan pembangunan.

Keadaan ini terjadi karena Kota Jantho sebagai kota pemerintahan lokasinya terlalu jauh dan tidak terpusat di antara kota kecamatan yang ada. Beberapa kecamatan di bagian barat dan timur Kabupaten Aceh Besar terlalu jauh untuk mengakses ke Kota Jantho sehingga membuat kota ini kurang berkembang. Menurut Tarigan (2004: 127), kota yang belum berkembang industrinya dan masih memiliki daerah pertanian, tetapi juga perkotaan sekaligus disebut sebagai kota parasitif, dimana kota ini tidak banyak berfungsi untuk menolong daerah belakangnya.

Akses menuju Kota Jantho hanya bisa dilakukan lewat satu jalan yaitu dari persimpangan Jalan Banda Aceh – Medan di Kecamatan Seulimeum dan jalan tersebut berakhir di Kota Jantho. Hal ini membuat Kota Jantho tidak terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan baik antarkecamatan dalam kabupaten maupun antarkabupaten dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kota Jantho belum terlihat mempunyai peranan yang besar dalam perkembangan wilayah, disebabkan oleh hirarki Kota Jantho masih dibawah kota kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kota Jantho hanya berpengaruh dalam sektor jasa, aktivitas masyarakat Aceh Besar di Kota Jantho hanya sebatas urusan administrasi. Untuk meningkatkan peranan Kota Jantho sebagai pusat pertumbuhan perlu adanya penambahan dan peningkatan jaringan jalan, karena kondisi aksesibilitas Kota Jantho hanya satu, sebaiknya ada pembukaan jalan lain (Bharata, 2003: 128-134).

Dalam paradigma pengembangan wilayah, keberhasilan sebuah pembangunan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi, seperti kapital dan tenaga kerja saja, namun juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastrukturnya (CTRID, 2002).

Infrastruktur wilayah memainkan peranan yang sangat penting dalam investasi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur merupakan prasyarat utama dalam upaya pengembangan wilayah. Demikian halnya Kota Jantho, infrastruktur wilayah terutama jalan sangat diperlukan untuk membuka akses dari dan ke kota terdekat lainnya dalam mendukung kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, sehingga tujuan pengembangan wilayah yang diinginkan dapat terwujud.

Wilayah belakang Kota Jantho merupakan areal pertanian yang produktif, yang berbatasan dengan dua kabupaten, yaitu Pidie dengan Kecamatan Keumala dan Aceh Jaya dengan Kecamatan Jaya (Lamno), dimana kedua kecamatan ini merupakan pusat pertumbuhan yang sangat memungkinkan untuk saling

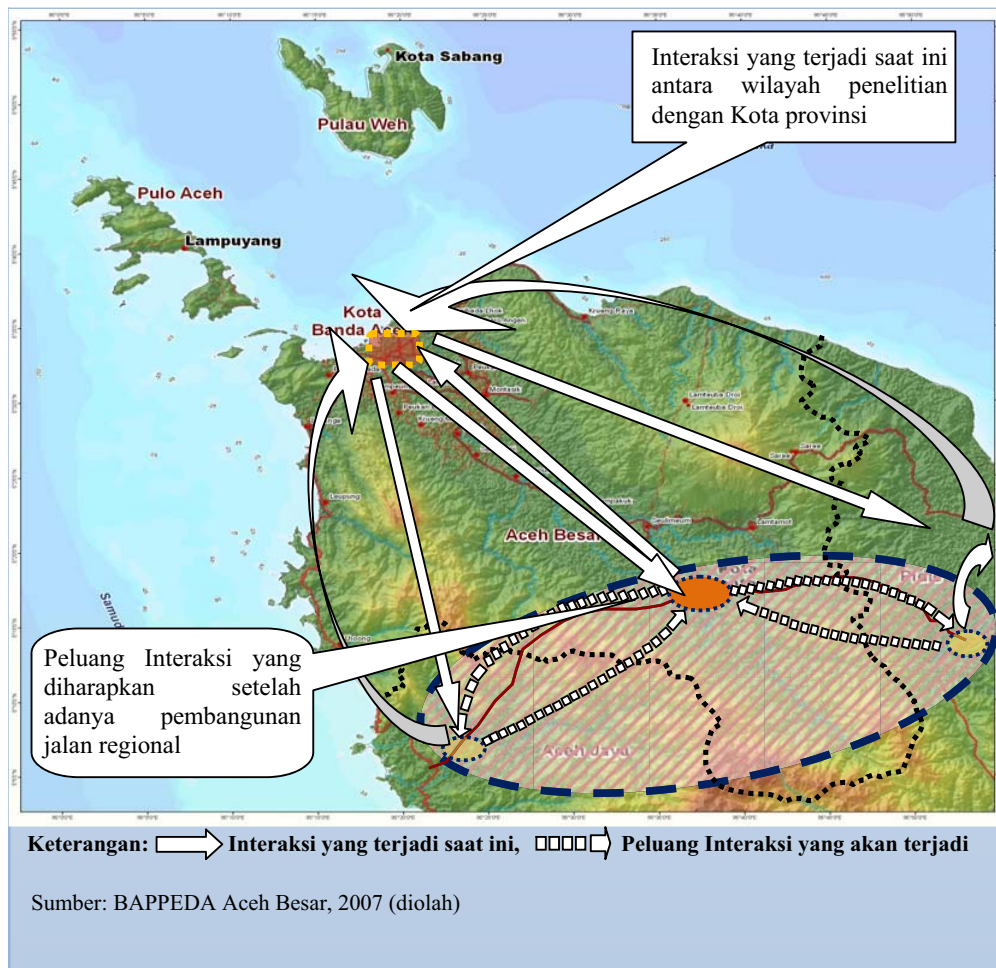
berinteraksi dengan Kota Jantho dalam dalam mengembangkan potensi ekonomi apabila infrastruktur tersedia, terutama akses yang menghubungkan ketiga pusat pertumbuhan ini.

Potensi wilayah yang ada di dua pusat pertumbuhan yaitu di Kecamatan Jaya (Lamno) dan di Kecamatan Titeu Keumala (Keumala), khususnya produk produk pertanian saat ini tidak terdistribusi ke Kota Jantho karena tidak adanya aksesibilitas jalan yang menghubungkan kedua pusat pertumbuhan tersebut dengan Kota Jantho.

Keberadaan Kota Lamno di wilayah pesisir barat membuat akses menuju Lamno saat ini baik ke arah barat (Calang) maupun ke arah timur (Banda Aceh) senantiasa harus melewati pesisir pantai. Akses ini telah pernah hancur dilanda Gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Untuk mengantisipasi bencana yang mungkin terulang, sangat strategis membangun jalan menuju Jantho yang membelah bagian tengah Provinsi NAD menuju Jantho, Keumala sampai ke Takengon Aceh Tengah. Disamping membuka akses baru guna merangsang perkembangan wilayah jalan ini juga sangat berguna bagi masyarakat Lamno sebagai *Escape Road* bila bencana *tsunami* berulang, karena Kota Lamno telah pernah hancur dilanda gelombang *tsunami*.

Keumala merupakan sentra produksi pertanian khususnya tanaman pangan padi dan palawija sehingga pemerintah membangun Balai Benih Induk Padi dan Laboratorium Pengamat Hama di Keumala. Jadi disamping keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dengan adanya akses tersebut dapat pula terjadi adopsi teknologi pertanian yang tentu saja memberikan indikasi yang baik bagi perkembangan wilayah.

Peningkatan infrastruktur merupakan aspek yang sangat penting untuk menunjang keberlanjutan (*sustainability*) dan peningkatan pembangunan pertanian. Mosher dalam Hanani, et.al (2003: 30), menyebutkan bahwa salah satu syarat pokok dalam pembangunan pertanian adalah tersedianya sarana prasarana produksi setempat yang selalu lancar.



GAMBAR 1.1
ILUSTRASI PERMASALAHAN
DI WILAYAH STUDI

Arus distribusi barang untuk kebutuhan Kota Jantho saat ini hanya dari Banda Aceh. Demikian juga di dua pusat pertumbuhan di wilayah belakang Kota Jantho seperti terlihat pada Gambar 1.1, arus interaksi yang terjadi adalah: Kecamatan Jaya (Lamno) berinteraksi langsung ke Kota Banda Aceh baik untuk aktivitas ekonomi lokal maupun regional sedangkan arus distribusi barang dari Keumala ke Kota Banda Aceh melalui Kota Sigli, ibukota Kabupaten Pidie. Pembangunan jalan yang membuka akses Kota Jantho – Keumala akan mempersingkat jarak antara Keumala dan Banda Aceh hampir setengahnya.

Pembukaan akses yang menghubungkan wilayah belakang Kota Jantho, dengan Lamno dan Keumala akan meningkatkan juga interaksi wilayah belakang Kabupaten Pidie yaitu Kecamatan Tangse, Mane dan Geumpang karena akses tersebut dapat mempersingkat jarak menuju Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota propinsi, sehingga Kota Jantho akan menjadi kota singgahan/transit sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi kedua kecamatan tersebut dalam mendistribusikan produknya ke Kota Banda Aceh. Demikian juga dengan Kecamatan Jaya (Lamno), akan terjadi interaksi ekonomi baik dalam hal pertukaran barang dan jasa maupun peningkatan kapasitas dalam pengembangan wilayah.

Oleh karena itu, dengan menyadari permasalahan-permasalahan yang ada, perlu dilakukan studi mengenai potensi dan interaksi wilayah belakang Lamno-Jantho-Keumala dengan adanya pembangunan jalan regional. Diharapkan melalui studi penelitian ini dapat diketahui potensi apa saja yang dapat ditumbuhkembangkan di wilayah belakang Kota Jantho serta bagaimana peluang interaksi antar wilayah,

khususnya dalam konteks pertukaran barang hasil produksi, sumberdaya manusia dan kerjasama ekonomi di tiga pusat pertumbuhan dengan adanya pembangunan jalan regional.

1.2 Perumusan Masalah

Keberadaan Kota Jantho saat ini adalah hanya sebagai kota pusat administrasi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:

- Prasarana jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Jantho masih sangat kurang.
 - Akses menuju Kota Jantho hanya melalui satu jalan sehingga pergerakan barang dan orang sangat terbatas dan akses tersebut berakhir di Jantho.
 - Tidak ada jalan yang menghubungkan Kota Jantho dengan pusat-pusat pertumbuhan lain di sekitarnya.
- Posisi Kota Jantho yang menjorok sejauh 12 Km ke dalam dari Jalan Lintas Sumatera menyebabkan kedudukannya tidak memusat diantara pusat pertumbuhan lain sehingga arus barang dan orang yang terjadi hanya yang tujuan akhirnya (*destination*) Kota Jantho.
- Tidak ada sentra produksi dan tujuan kunjungan yang khas di Kota Jantho juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lamban.
- Potensi wilayah belakang tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, khususnya sektor pertanian karena tidak ada aksesibilitas yang memadai.
- Peluang interaksi antarwilayah yang sangat besar manfaatnya bagi perkembangan wilayah tidak terjadi karena aksesibilitas tidak tersedia.

Dari permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*Research Question*) yang ingin dikaji, yaitu:

- a. ***“Apa sajakah potensi yang dapat ditumbuhkembangkan di wilayah belakang Kota Jantho, Lamno dan Keumala ?”***
- b. ***“Apa sajakah peluang interaksi wilayah dengan adanya jaringan jalan yang menghubungkan Lamno – Kota Jantho – Keumala ?”***

1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan latar belakang serta permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan sasaran studi ini adalah:

1.3.1 Tujuan

Mengkaji potensi dan interaksi wilayah belakang Lamno-Jantho-Keumala dengan adanya pembangunan/peningkatan jaringan jalan dalam mendukung perkembangan Kota Jantho menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat aktivitas pemerintahan.

1.3.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- Menganalisis peran dan sistem kota dalam perkembangan wilayah dengan adanya pembangunan jalan regional di wilayah tersebut.
- Menganalisis potensi wilayah belakang Kota Jantho dari aspek sumber daya alam, sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi.

- Menganalisis interaksi yang ada saat ini dan yang akan terjadi di pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole*) dengan adanya pembangunan jalan regional.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilihat dari dua aspek yaitu aspek substansi yang menjadi batasan kajian dalam studi ini dan ruang lingkup wilayah yang menjadi batasan wilayah kajian studi.

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Studi ini dibatasi pada kajian mengenai potensi yang dapat ditumbuh kembangkan serta peluang interaksi wilayah dengan adanya jaringan jalan yang menghubungkan Lamno – Kota Jantho – Keumala. Ruang lingkup substansial yang diangkat dalam studi adalah meliputi:

- Kajian terhadap ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial meliputi sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, transportasi dan fasilitas ekonomi seperti pusat perdagangan, bank, pasar dan klaster pertokoan yang merupakan faktor yang menentukan struktur wilayah berdasarkan hierarki kota dan sistem kota.
- Kajian terhadap potensi di masing-masing wilayah untuk melihat sektor basis yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah belakang.
- Kajian peluang interaksi wilayah belakang Lamno – Jantho – Keumala dengan dibangunnya dua ruas jalan regional yang menghubungkan tiga kabupaten yaitu Aceh Jaya, Aceh Besar dan Pidie.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah adalah batasan wilayah yang menjadi kajian studi yaitu wilayah Lamno (Kecamatan Jaya), Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Titeu/ Keumala. Ruang lingkup wilayah secara makro adalah wilayah Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Titeu/Keumala Kabupaten Pidie dalam konteks regional sebagai wilayah utara Provinsi NAD yang saling berinteraksi dengan kecamatan lain di dalam kabupaten maupun dengan Kota Banda Aceh sebagai daerah sentralnya. Sementara secara mikro ruang lingkungannya adalah obyek studi yang menjadi daerah belakang yang meliputi wilayah Lamno Kecamatan Jaya, wilayah Kota Jantho Kecamatan Jantho yang juga merupakan Ibukota Kabupaten Aceh Besar dan wilayah Keumala Kecamatan Titeu/Keumala. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2. yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ruang lingkup wilayah makro adalah Kota Banda Aceh sebagai wilayah pusat pertumbuhan secara fungsional (wilayah diarsir warna merah) dengan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie (wilayah diarsir warna hijau).
- Ruang lingkup wilayah Mikro adalah Jantho, Lamno dan Keumala (Wilayah diarsir warna hijau) merupakan wilayah belakang dari Kota Banda Aceh yang dikaji potensi dan peluang interaksinya baik antarwilayah belakang maupun dengan wilayah pusatnya, yaitu Kota Banda Aceh.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perkembangan wilayah yang merupakan upaya pembangunan masih sangat mengandalkan kemampuan pada pusat-pusat pertumbuhan kawasan tertentu yang tidak diikuti dengan perkembangan yang bersifat lintas wilayah. Aksesibilitas ke daerah belakang mengalami perkembangan yang *stagnan* akibat terpusatnya fasilitas pelayanan sosial ekonomi di pusat kota.

Adapun dasar pemikiran yang melatarbelakangi potensi dan interaksi wilayah belakang Lamno – Jantho – Keumala dengan adanya pengembangan jaringan jalan adalah adanya kecenderungan tidak seimbang pertumbuhan antarpusat kota yang lebih maju dengan daerah belakang yang tertinggal dan terisolir sehingga dengan adanya jalan tersebut bisa memberi peluang untuk daerah belakang saling berinteraksi. Disamping itu juga aksesibilitas lintas wilayah akan dapat meningkatkan interaksi wilayah belakang Lamno – Jantho – Keumala.

Kondisi geografis Kabupaten Aceh Besar sebagai wilayah yang sangat mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor primer yang akan mendorong peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus merupakan aspek pengembangan wilayah dan aspek lainnya adalah ketersediaan tenaga kerja dan lapangan kerja. Pengaruh sektor pertanian dalam kontribusi PDRB sebesar 38,35% dari total PRDB Kabupaten Aceh Besar tahun 2006 sebesar Rp. 2,696,523,010,- yang merupakan sektor yang paling dominan sedangkan peningkatan pertumbuhan sektor-sektor lain tidak merata.

Implementasi kebijakan pemerintah belum memperlihatkan adanya integrasi program pembangunan antarpusat-pusat pertumbuhan tertentu. Ini terlihat dari masih terdapat daerah yang terisolir. Dokumen perencanaan dan konsep aspirasi masyarakat berupa produk tata ruang belum sepenuhnya dilaksanakan menurut sistem hierarki kota-kota sebagai pusat pelayanan yang menunjang pengembangan wilayah.

Permasalahan yang muncul akibat keadaan di atas adalah kurang berkembangnya potensi dan interaksi wilayah yang dari waktu ke waktu dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah terutama pada daerah belakang.

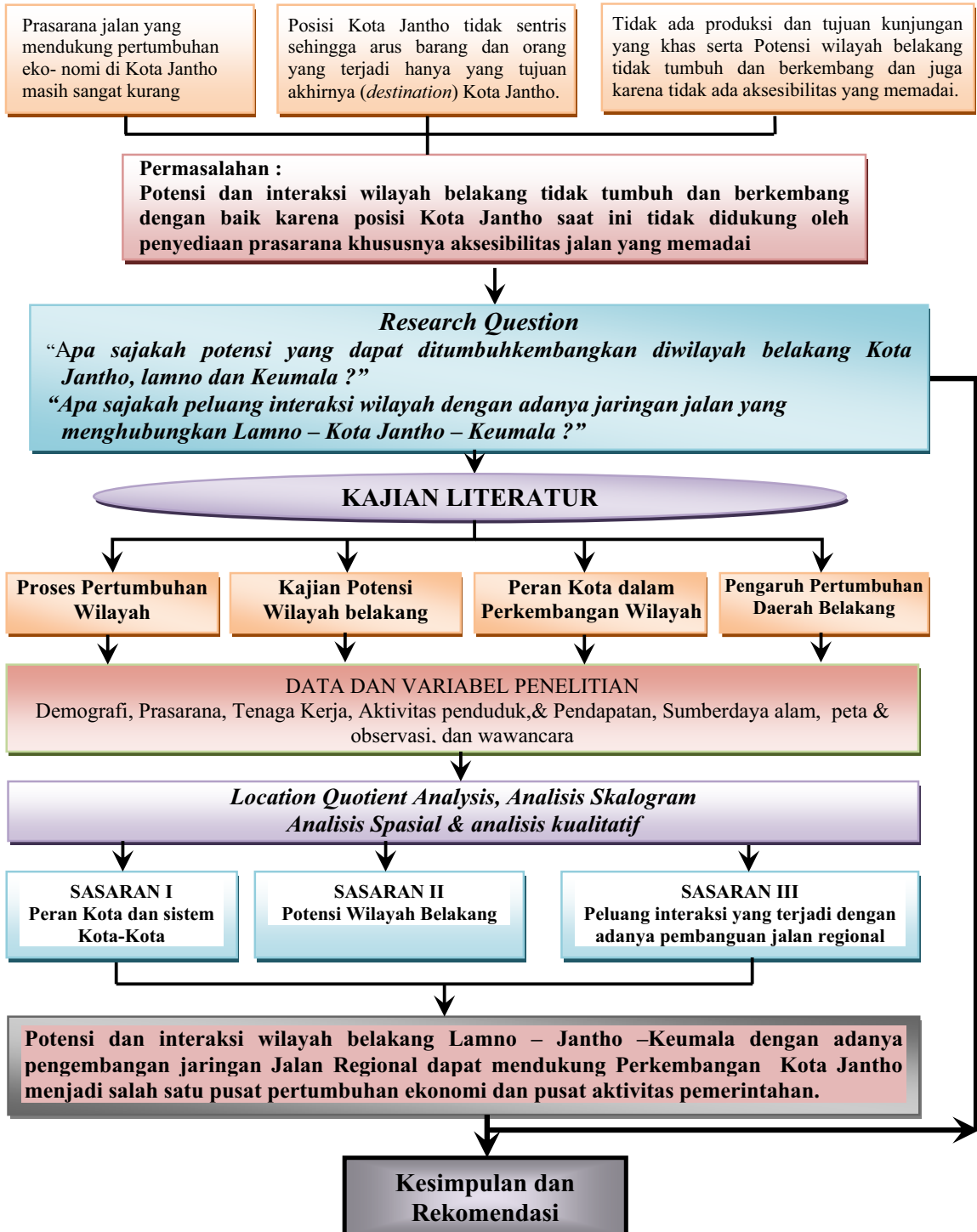
Dari permasalahan yang telah dikemukakan terdahulu dapat dirumuskan bahwa potensi dan interaksi wilayah merupakan faktor penting yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan jaringan jalan untuk membuka isolasi wilayah belakang.

Guna mengetahui potensi wilayah berdasarkan sektor basis diukur dari aktivitas tenaga kerja yang bekerja pada setiap sektor ekonomi atau lapangan usaha dari masing-masing wilayah serta akan dikaji juga komoditas basis, khususnya produk pertanian yang menjadi produksi pokok masing-masing wilayah studi. Untuk mengetahui interaksi antarwilayah maka akan dilakukan pengkajian tentang arus pergerakan barang dan orang serta peluang yang timbul dengan adanya pembangunan/peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Lamno – Jantho – Keumala.

Untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mengetahui apa saja potensi dan peluang interaksi wilayah belakang Lamno – Jantho – Keumala dengan adanya pengembangan jaringan jalan akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan analisis yang akan dipergunakan terhadap kajian struktur wilayah, kajian sektor basis, potensi wilayah dan interaksi antarwilayah tersebut.

Hasil kompilasi data dan proses analisis yang dikaji dari pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah serta potensi yang mungkin ditumbuhkembangkan ada di wilayah belakang dengan adanya pembangunan jaringan jalan. Melalui pengembangan potensi sektor ekonomi yang dimiliki akan dapat mendukung peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Dari hasil kajian potensi dan interaksi wilayah belakang dengan adanya jaringan jalan, dapat mendorong pertumbuhan daerah belakang dan perkembangan Kota Jantho sebagai ibukota kabupaten. Dengan demikian, temuan dalam penelitian dan kesimpulan terhadap studi diharapkan akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Pemda Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya dalam menyusun strategi pengembangan wilayah sesuai dengan karakteristik wilayah belakang yang *sustainable*.

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas kemudian disusun dalam bentuk diagram untuk menentukan tahap-tahap pelaksanaan studi seperti yang disajikan pada Gambar 1.3 di bawah.



Sumber: Hasil Analisis

GAMBAR 1.3
DIAGRAM KERANGKA PIKIR

1.6 Pendekatan Studi dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dalam konteks ekonomi dan pendekatan wilayah (spasial) yaitu mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan potensi dan interaksi wilayah belakang Kota Jantho. Pendekatan ekonomi dilakukan untuk melihat pengembangan wilayah karena kemajuan ekonomi merupakan salah satu indikatornya. Adapun pendekatan wilayah (spasial) digunakan untuk mengkaji aktivitas ekonomi dalam lingkup mikro pada tiap-tiap wilayah dan mengkaji interaksi antarwilayah dalam lingkup yang lebih luas guna melihat kemana arah aktivitas ekonomi berkembang.

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang gejala perkembangan dan fakta tertentu fenomena yang terjadi atau variabel yang diselidiki secara komprehensif. Menurut Brannen (2002: 38), metode analisis kuantitatif digunakan untuk membantu menyederhanakan fakta dan memberi arahan dalam hubungan antara variabel-variabel, sedangkan metode kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang mendasari hubungan yang terjadi.

1.6.1 Kerangka Analisis

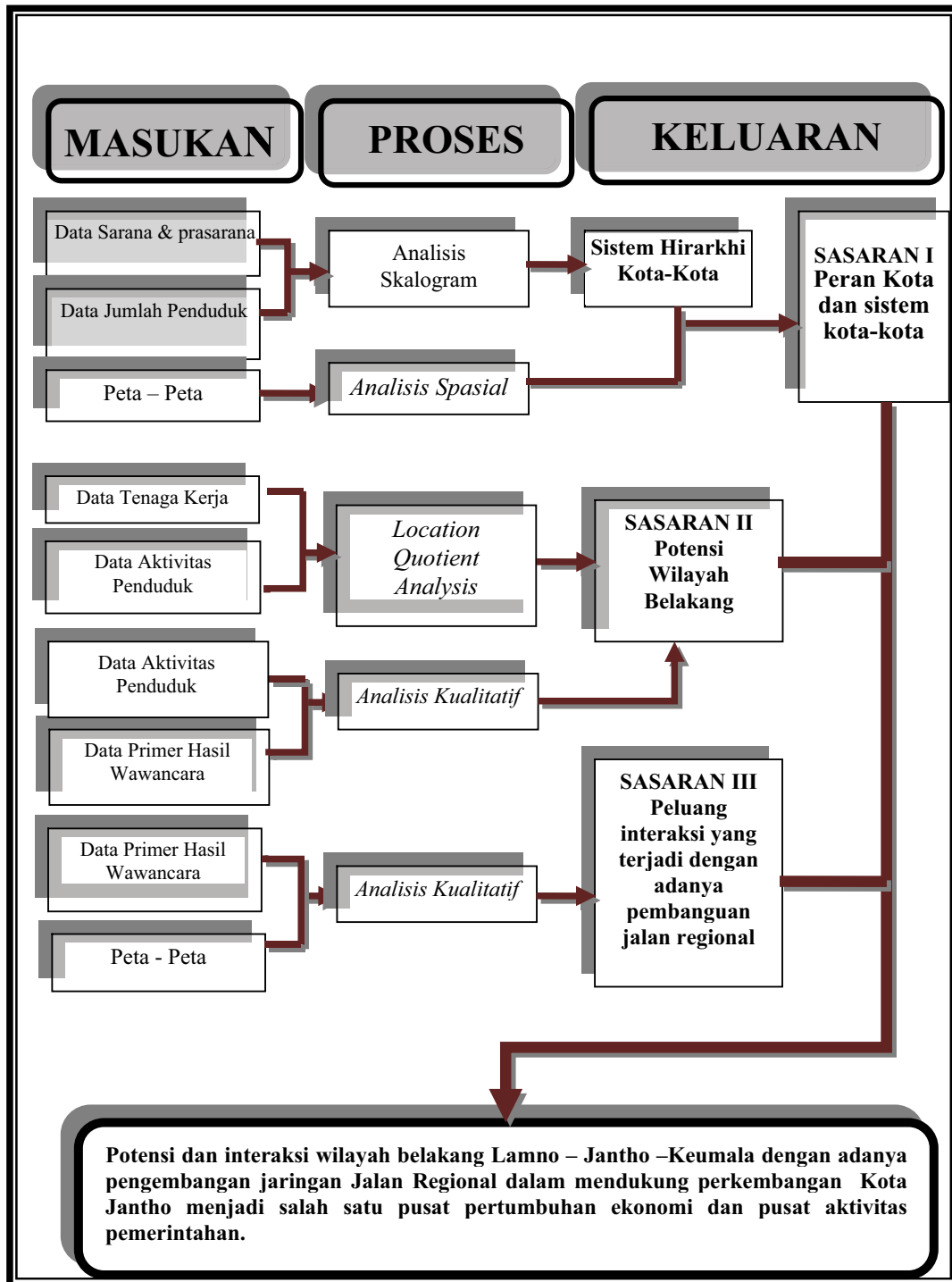
Subbab ini dibagi dalam dua item, yaitu tujuan dan hasil akhir yang diharapkan serta proses analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan model-model analisis (*tools*) yang akan dijelaskan dalam metode analisis.

1.6.1.1 Tujuan dan Hasil Akhir yang Diharapkan

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah terjawabnya pertanyaan penelitian (*Research Questions*) sehingga tercapainya tujuan penelitian melalui penjabaran dari sasaran-sasaran penelitian yang telah dirumuskan dalam BAB I. Dengan perkataan lain, hasil akhir penelitian ini dapat dilihat dari pencapaian tiap-tiap sasaran penelitian antara lain :

- a. Tersusunnya hirarki kota-kota dalam sistem kota di daerah penelitian yaitu Kota Jantho, Lamno dan Keumala, sehingga dapat diketahui peran dan fungsinya dalam perkembangan wilayah (tercapainya sasaran I).
- b. Teridentifikasinya potensi wilayah yang dapat ditumbuhkembangkan dalam rangka pengembangan wilayah belakang kota jantho (tercapainya sasaran II).
- c. Dapat diketahui bagaimana dan apa saja interaksi yang terjadi saat ini dan bagaimana peluang interaksi wilayah dengan dibangunnya jalan yang membuka akses lamno – Jantho – Keumala (tercapainya sasaran III).

Dengan tercapainya sasaran-sasaran penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian dapat tercapai dan pertanyaan penelitian dapat terjawab, sehingga didapat kesimpulan penelitian dan rekomendasi yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembangunan, khususnya di Kabupaten Aceh Besar dan juga sebagai bahan untuk kajian dalam penelitian lanjutan. Untuk memudahkan pencapaian sasaran penelitian dibuat diagram kerangka analisis seperti pada Gambar 1.4 di bawah ini.



Sumber: Hasil Analisis

GAMBAR 1.4
KERANGKA ANALISIS

1.6.1.2 Proses Analisis

Data yang didapat baik melalui permintaan ke instansi pemerintah, observasi dan wawancara kemudian dikompilasi dan dianalisis berdasarkan pendekatan penelitian dan metode analisis. Pengumpulan data dan informasi ini dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada dari tiap wilayah, dimana interaksi pengaruh sektor ekonomi strategis secara langsung berhubungan dengan aktivitas masyarakat dan kinerja sektor pembangunan.

Proses analisis data dilakukan dengan cara menyusun matriks kebutuhan data dan proses analisis. Matriks tersebut disusun berdasarkan tujuan penelitian, hasil akhir yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai, metode analisis, alat ukur (*tools*) serta jenis data yang dipakai untuk masing-masing keperluan analisis.

Penyusunan matriks ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan analisis data, karena data telah dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan pencapaian sasaran penelitian, sehingga kekurangan terhadap data penelitian dapat diketahui sedini mungkin sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Lebih lanjut matriks kebutuhan data dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Penggunaan *tools* dalam menganalisis data untuk mencapai sasaran penelitian akan dijelaskan lebih rinci pada subbab metode analisis data. Pada bagian ini akan terlihat dengan jelas bagaimana *tools* dipergunakan untuk menganalisis data tertentu sehingga didapat hasil akhir yang mengarah pada sasaran dan tujuan penelitian ini.

TABEL I.1
MATRIKS PROSES ANALISIS

TUJUAN	Mengkaji potensi dan interaksi wilayah belakang Lamno – Jantho –Keumala yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk pengembangan jaringan jalan regional dalam mendukung perkembangan Kota Jantho menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat aktivitas pemerintahan.		
SASARAN	SASARAN I Menganalisis peran dan sistem kota dalam perkembangan wilayah dengan adanya pembangunan jalan regional di wilayah tersebut.	SASARAN II Menganalisis potensi wilayah belakang Kota Jantho dari aspek Sumber Daya Alam, Sumberdaya Manusia dan pertumbuhan Ekonomi	SASARAN III Menganalisis interaksi yang ada saat ini dan yang akan terjadi di pusat-pusat pertumbuhan (<i>growth pole</i>) dengan adanya pembangunan jalan regional.
Hasil Akhir	Tersusunnya hirarkhi kota-kota dalam sistem kota di daerah penelitian, yaitu Kota Jantho, Lamno dan Keumala, sehingga dapat diketahui peran dan fungsinya dalam perkembangan wilayah	Teridentifikasinya potensi wilayah yang dapat ditumbuhkembangkan dalam rangka pengembangan wilayah belakang kota Jantho	Dapat diketahui bagaimana dan apa saja interaksi yang terjadi saat ini dan bagaimana peluang interaksi wilayah dengan dibangunnya jalan yang membuka akses Lamno-Jantho-Keumala
ANALISIS	Analisis data sekunder dan analisis Spasial (Keruangan)	Analisis data sekunder dan analisis kualitatif dari hasil survei wilayah	Analisis spasial dan analisis kualitatif dari hasil observasi dan survei wilayah
ALAT UKUR	Analisis skalogram dan analisis keruangan	<i>Location Quotient Analysis</i> dan analisis kualitatif	Analisis spasial dan analisis deskriptif kualitatif
DATA	Sarana dan prasarana, jumlah penduduk dan peta-peta	Tenaga kerja, aktivitas penduduk dan peta-peta, data primer hasil observasi	Peta-peta, data primer, hasil observasi

Sumber: Hasil Analisis

1.6.1.3 Metode Analisis

Dalam mencapai sasaran penelitian dilakukan beberapa analisis terhadap data dan hasil observasi yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Untuk menganalisis pencapaian sasaran Pertama (I) digunakan metode analisis Skalogram Guttman dan analisis keruangan (spasial) dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG), untuk pencapaian sasaran II dilakukan dengan *Location Quotient Analysis* (LQ) dan juga analisis spasial dengan menggunakan SIG serta analisis kualitatif dengan mengkaji kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam pengembangan wilayah. Adapun untuk pencapaian sasaran III dilakukan dengan analisis keterkaitan (*linkage*) antarwilayah belakang dan dengan daerah pusatnya. dan analisis kualitatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan peluang-peluang interaksi antarwilayah. Adapun perangkat (*tools*) yang digunakan untuk proses analisis kuantitatif adalah:

(1). Analisis Skalogram

Untuk menentukan hierarki kota-kota wilayah belakang yaitu Lamno, Kota Jantho dan Keumala dengan wilayah pusatnya yaitu Banda Aceh dengan menggunakan Metode Skalogram Guttman, sebagai berikut (Rondinelli, 1985:115):

- a) Membuat urutan kecamatan berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri tabel kerja.
- b) Membuat urutan fasilitas berdasarkan pada frekuensi.
- c) Menggambarkan baris dan kolom sehingga membentuk matriks berdasarkan fasilitas dan kecamatan.

- d) Memberikan tanda (1) pada keberadaan suatu fasilitas dan (0) untuk ketidakberadaan suatu fasilitas.
- e) Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi kelengkapan fasilitas suatu kecamatan dan jumlah fasilitas yang ada pada setiap kecamatan.
- f) Menyusun hierarki kecamatan berdasarkan peringkat kelengkapan fasilitas.

Untuk menguji kelayakan penggunaan skalogram digunakan perhitungan uji koefisien reproduksi (Kr) dan koefisien skalabilitas (Ks), dengan rumus sebagai berikut (Singarimbun, 1995: 118):

$$Kr = 1 - \frac{\text{Jumlah Kesalahan (e)}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Fasilitas}}$$

Syarat Kr yang layak digunakan jika nilai $Kr > 0,900$

$$Ks = 1 - \frac{\text{Jumlah Kesalahan (e)}}{0,5 \times \{(\text{Jumlah Kecamatan} \times \text{Jumlah Fasilitas}) - \text{Total Fasilitas Tersedia}\}}$$

Syarat Ks yang layak digunakan jika nilai $Ks > 0,600$

(2). *Location Quotient Analysis*

Teknik Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kemampuan suatu daerah pada sektor-sektor tertentu yang merupakan sektor basis atau sektor *leading*. LQ banyak digunakan sebagai alat sederhana untuk mengukur spesialisasi relatif suatu daerah pada sektor-sektor tertentu. Dalam penelitian ini akan dianalisis sektor basis dari setiap desa dengan *entity* perbandingannya adalah kecamatan masing-masing wilayah belakang,

kecamatan-kecamatan yang merupakan daerah belakang dengan *entity* Kota Banda Aceh sebagai wilayah pusatnya. Data yang digunakan untuk menghitung LQ tersebut adalah data tenaga kerja berdasarkan aktivitas penduduk tingkat desa dan kecamatan yang menjadi wilayah penelitian.

Formula yang digunakan untuk perhitungan LQ tersebut adalah sebagai berikut (Warpani, 1984:68):

$$LQ = \frac{ps / pl}{Ps / Pl}$$

Di mana :

- LQ = Location Quotient
- ps = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkal lokal.
- pl = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkal lokal.
- Ps = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkal regional.
- Pl = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkal regional.

- **Jika $LQ \geq 1 \rightarrow$ sektor basis.**

Artinya bahwa sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar di dalam wilayah dan juga diekspor ke luar wilayah.

- **Jika $LQ < 1 \rightarrow$ sektor non-basis.**

Artinya bahwa sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah .

Keunggulan dari analisis LQ adalah suatu alat yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat. LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu

daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis lainnya. Adapun kelemahan dari analisis ini adalah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan mengakibatkan hasil perhitungan menjadi bias. Hal ini disebabkan karena adanya disagregasi data sektor daerah hitung, pemilihan entiti yang diperbandingkan serta pemilihan tahun dan kualitas data.

Analisis keruangan (*spatial*) dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis ini berguna untuk mengidentifikasi dimana pusat kegiatan ekonomi cenderung mengumpul dan membentuk klaster. Analisis SIG dimulai dengan meng *entry* data, pemrosesan data, membangun *database*, analisis spasial kemudian ditampilkan dalam bentuk peta atau grafik. Analisis lain yang digunakan adalah analisis keterkaitan (*Linkage*) antar wilayah belakang dikaitkan dengan kedudukan wilayah pusat pertumbuhan.

Teknik analisis data primer adalah melalui interpretasi hasil wawancara untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang disebut *Interview Guide* (panduan wawancara) yang telah disiapkan (Nazir, 2003:194).

1.6.2 Data Penelitian

Penelitian ini lebih diarahkan pada sektor pembangunan dan aktivitas ekonomi yang merupakan salah satu parameter dari pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan adalah data yang berasal dari instansi-instansi pemerintah yang menyangkut dengan keruangan dan kependudukan baik di

Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan ruang lingkup wilayah makro dari penelitian.

1.6.2.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana, ragam sumberdaya alam yang ada di wilayah penelitian dan penduduk serta aktivitasnya. Dalam hal ini yang dilihat adalah aktivitas utama dari penduduk di setiap desa di wilayah penelitian yang direfleksikan oleh curahan tenaga kerja ke sektor-sektor tertentu. Disamping itu, kondisi dan posisi ruang wilayah juga menjadi obyek penelitian.

1.6.2.2 Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dibutuhkan adalah jumlah sarana dan prasarana publik yang ada, jumlah penduduk perdesa, data tenaga kerja berdasarkan aktivitas penduduk perdesa, data jarak antarkota dan wilayah serta data keruangan seperti peta kegunaan lahan, peta administrasi, peta daerah aliran sungai dan peta sebaran penduduk. Adapun data primer adalah data aktivitas penduduk di wilayah belakang khususnya pelaku ekonomi baik itu pedagang ataupun pengusaha sektor produksi tertentu yang telah mengelola usahanya dalam skala komersial yang pasar utamanya di luar wilayah belakang. Kebutuhan data untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.2 di bawah ini.

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA PENELITIAN

Nama Data	Unit Data	Rentang Waktu	Jenis Data	Sumber
▪ Data Aktivitas Masyarakat Kecamatan Jantho	Kabupaten Kecamatan	2005 -2006	Sekunder, Tabulasi Angka	▪ BPS ▪ Bappeda
▪ Data Aktivitas Masyarakat Kecamatan Keumala	Kabupaten Kecamatan	2005 -2006	Sekunder, Tabulasi Angka	▪ BPS ▪ Bappeda
▪ Data Aktivitas Masyarakat Kec. Jaya	Kabupaten Kecamatan	2005 -2006	Sekunder, Tabulasi Angka	▪ BPS ▪ Bappeda
▪ Data Tenaga Kerja per kecamatan	Kecamatan Jaya,Keumala dan Jantho	2005 -2006	Sekunder, Tabulasi Angka	▪ BPS ▪ Bappeda
▪ Data Kependudukan	Kecamatan Jaya,Keumala dan Jantho	2005 -2006	Sekunder, Tabulasi Angka	▪ BPS
▪ Data Fasilitas dan utilitas	Kecamatan Jaya,Keumala dan Jantho	2005 -2006	Sekunder, Tabulasi Angka	▪ BPS ▪ Bappeda
▪ Pandangan mengenai peluang interaksi	Kabupaten Jaya,Pidie dan A.Besar	2008	Primer Wawancara	Pelaku ekonomi, Pejabat di wil.penelitian
▪ Kondisi infrastruktur kota	Kecamatan Jaya,Keumala dan Jantho	2008	Primer dan sekunder.	Bappeda, BPS dan hasil Observasi
▪ Data Jarak antar Kota dan wilayah pengaruh	Kecamatan Jaya,Keumala dan Jantho	2005,2006	Sekunder, Tabulasi Angka	▪ BPS ▪ Bappeda

Sumber: Hasil Sintesis, 2008

1.6.2.3 Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kompilasi data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber khususnya instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat propinsi, kabupaten kota dan kecamatan yang berkaitan dengan wilayah

penelitian dan didukung oleh observasi serta wawancara untuk memperoleh data primer. Hasil pengumpulan data akan diproses sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai untuk menjawab tujuan penelitian sebagai *output* dari studi ini seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Penentuan responden dilakukan secara *Purposive Sampling* yang didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik sebagai *Key Subject* yang dianggap dapat memberikan jawaban karena pengalamannya, pengetahuannya, dan aktivitasnya (Arikunto, 2006 :139 -140). Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 30 orang dengan perincian 5 orang pelaku ekonomi di masing masing kecamatan wilayah penelitian dan dan 5 orang pejabat lingkup kecamatan dan kabupaten yang masing masing kecamatannya menjadi obyek penelitian.

1.7 Sistematika Laporan.

Laporan penelitian berbentuk tesis akan disusun dalam 5 (lima) bab, terdiri dari bab pendahuluan, landasan teori, karakteristik wilayah, analisis dan kesimpulan dan rekomendasi, dengan isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

- **Bab I** Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, keaslian penelitian serta ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup substansial dan ruang lingkup spasial, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- **Bab. II** Landasan Teori, bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta sintesisnya, berdasarkan literatur yang digunakan.

- **Bab III** Pada bab ini diuraikan secara umum mengenai karakteristik wilayah penelitian, yang meliputi: kondisi geografis dan kondisi eksisting berupa hasil pengamatan dan kompilasi data sekunder.
- **Bab IV** Analisis deskriptif untuk mendeskripsikan berbagai fakta dan fenomena potensi dan interaksi wilayah dengan adanya pembangunan jalan regional di wilayah belakang Kota Jantho.
- **Bab V** Kesimpulan dan Rekomendasi, membuat konklusi temuan penelitian yang telah dilakukan, dan membuat rekomendasi yang bisa dipakai oleh pengambil kebijakan pembangunan wilayah ataupun dapat dijadikan sebagai tinjauan ilmiah untuk penelitian lanjutan.

BAB II

PERKEMBANGAN WILAYAH DAN INTERAKSI DESA – KOTA

Bab ini merupakan kajian teoritik terhadap perkembangan atau pertumbuhan wilayah serta interaksi antara wilayah pedesaan dan perkotaan yang disarikan dari teori dan hasil penelitian orang lain yang yang berhubungan dengan *spesific study* dan *opposite view* dari penelitian yang akan dilakukan.

2.1 Proses Pertumbuhan Wilayah

Pengertian ruang wilayah sering diartikan sebagai satu kesatuan ruang secara geografi yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya (Tarigan, 2004: 102). Adapun Stohr (1981: 43) mendefinisikan wilayah sebagai semua unit teritorial yang lebih besar dari desa, dimana suatu kegiatan ekonomi layak untuk dapat berkembang.

Glasson (1983) menyebutkan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau fungsinya. Berdasarkan kondisinya wilayah dikelompokkan dalam keseragaman isinya seperti wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri. Berdasarkan fungsinya wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, hierarki jalur transportasi dan lain-lain.

Tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah dimulai dari pusat kota yang berinteraksi dengan pusat-pusat pertumbuhan lainnya mengikuti hierarki dalam suatu pusat-pusat pertumbuhan. Menurut Soejarto (1981) dalam ruang ekonomi

akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran hierarki dan pembangunan akan terstruktur secara makro melalui hierarki wilayah pusat dan secara regional dari pusat tersebut ke masing-masing daerah belakangnya.

Wilayah itu sendiri merupakan suatu area kekuatan yang di dalamnya terdapat pusat-pusat atau simpul dimana setiap simpulnya mempunyai kekuatan pengembangan keluar dan kekuatan tarik ke dalam. Ferroux dalam Daldjoeni (1997) menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan kutub (*growth pole*) yang terpusat dan mengambil tempat tertentu sebagai pusat pengembangan diharapkan menyalurkan perkembangan ke pusat-pusat yang tingkatannya lebih rendah. Dalam konsep tersebut terdapat istilah *spread* dan *trickling down* (penjalaran dan penetesan) serta *backwash* dan *polarization* (penarikan dan pemusatan).

Kesenjangan pertumbuhan wilayah juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti yang dikemukakan oleh Kartasmita (1996) bahwa faktor-faktor kesenjangan pertumbuhan wilayah disebabkan terutama oleh lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi antardaerah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah pedesaan menyebabkan produktivitas dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan menjadi rendah. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana perhubungan di daerah pedesaan, khususnya prasarana dan sarana yang menghubungkan suatu daerah miskin dengan daerah-daerah lebih maju.

Menurut Friedman (1976) perkembangan kota terjadi lebih dahulu daripada pengembangan wilayah. Sistem perkotaan bukan hanya menstimulir tapi juga menjadi mediator dalam pengembangan wilayah. Kota sebagai pusat pelayanan

merupakan pusat pemerintahan dan administrasi yang berperan sebagai pusat kelembagaan dan informasi melalui hubungan komunikasi dalam menunjang sektor pembangunan sosial, ekonomi dan administrasi ke wilayah sekitarnya. Dengan demikian akan menjamin keterkaitan fungsi pembangunan, inovasi dan kemajuan yang serasi, seimbang dan selaras antara kota dan wilayah perdesaan (belakang).

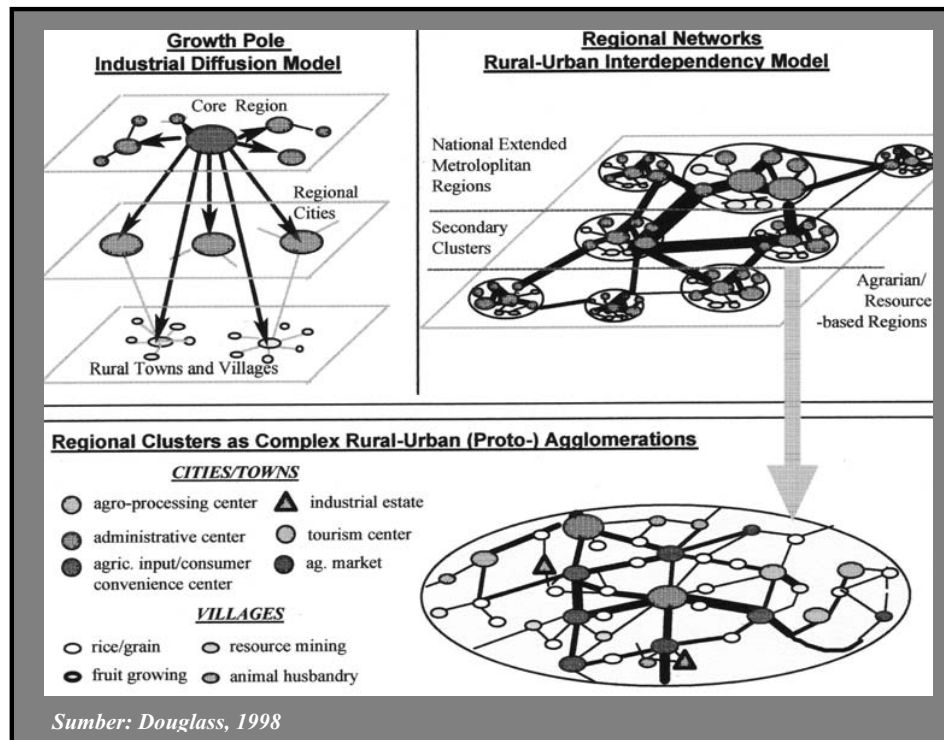
Terjadinya pertumbuhan wilayah juga akan berdampak pada pertumbuhan jumlah penduduk pada wilayah tertentu akibat adanya aktivitas ekonomi, merupakan suatu konsekuensi dari wilayah pusat pertumbuhan. Seperti yang dikemukakan Oppenheim (1980), bahwa pemusatan penduduk di suatu kota atau daerah erat hubungannya dengan pergerakan penduduk akibat adanya kesempatan lapangan kerja atau pusat kegiatan yang dominan. Hal ini akan dapat membantu dalam mengetahui lokasi pusat kegiatan dan pola pusat kegiatan di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan wilayah lain. Hal ini bertujuan untuk memberi peningkatan kompetitif berdasarkan model basis ekspor. Aktivitas ekonomi wilayah dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu, aktivitas ekonomi berproduksi untuk pasar ekspor yang dikenal sebagai sektor basis dan aktivitas ekonomi berproduksi untuk pasar lokal yang dikenal sebagai sektor nonbasis. Berdasarkan *Economic Base Theory* yang menekankan pada perlunya pasar di luar kebutuhan lokal atau pentingnya ekspor sebagai pendorong ekonomi lokal, pengembangan ekonomi lokalpun mempunyai keselarasan. Pengembangan ekonomi lokal tidak menyangkal pentingnya ekspor sebagai pendorong ekonomi lokal (Blakeley, 1989: 62).

Richarson (1974) menyebutkan sistem pusat pertumbuhan merupakan sistem yang paling efisien dalam menjalarkan perkembangan wilayah dan juga sistem ini dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk mendistribusi pelayanan barang dan jasa bagi masyarakat luas. sedangkan menurut Soejarto (1981) bahwa tanpa adanya hierarki yang jelas maka mekanisme penjalaran perkembangan dari pusat-pusat pengembangan wilayah ekonomi akan sulit terbentuk. Justru kemungkinan besar akan mempertajam kesenjangan yang ada antara kota-kota kecil dengan kota-kota lebih besar atau antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan.

Permasalahan umum pertumbuhan yang terjadi pada daerah-daerah di Indonesia adalah pola pemanfaatan lahan yang masih belum optimal, tingkat pertumbuhan perdesaan dan perkotaan yang tidak seimbang, kemampuan mengelola sumber daya yang masih rendah, belum terjangkau oleh teknologi yang memadai, tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah, serta tingkat pelayanan jasa dan pemerintahan dan sosial yang belum memadai. Disamping itu wilayah yang berperan sebagai penghasil produksi primer yang hasilnya harus dipasarkan keluar tidak dapat terlaksana dengan baik karena lemahnya transportasi dan tidak mempunyai hubungan yang kuat dalam pemasaran hasil tersebut, May (1984: 61)

Selain faktor internal, Boudeville (1966) berpendapat bahwa perekonomian wilayah bertumbuh jika industri yang dikembangkan pada pusat wilayah nodal bersifat propulsif dan sifat industrinya terhadap pertumbuhan menyebar melalui interkoneksi ekonomi terhadap daerah belakang. Gambaran Model Keterkaitan/jaringan pengaruh hierarki kota ke pedesaan *versus* keterkaitan jaringan saling membutuhkan antara pedesaan dan perkotaan dalah sebagai berikut:

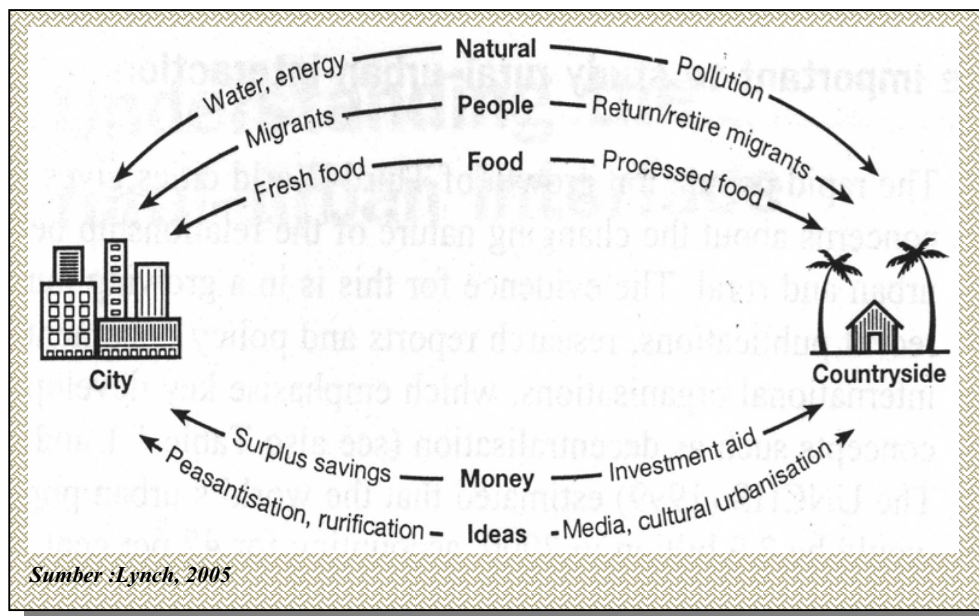


GAMBAR 2.1
MODEL KETERKAITAN

Secara umum interaksi atau keterkaitan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Keterkaitan ke belakang diartikan sebagai tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap pengembangan industri yang menyediakan bahan baku (*input*) bagi investasi tersebut. Adapun keterkaitan ke depan diartikan sebagai tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pengembangan industri terhadap industri yang menggunakan produksi industri yang pertama sebagai bahan baku (*input*).

Interaksi wilayah perkotaan dan pedesaan dapat dilihat dari 5 faktor yang saling berinteraksi antara lain: (1) Bahan makanan, dimana pedesaan mensuplai bahan makanan segar ke perkotaan, sebaliknya kota mensuplai bahan makanan

yang sudah diproses ke pedesaan, (2) Sumberdaya alam, dimana wilayah pedesaan mensuplai sumber air dan sumber energy dan mendapatkan polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas industri di perkotaan, (3) Masyarakat (manusia), dimana terjadinya migrasi sumberdaya manusia, khususnya yang mempunyai ketrampilan dan punya peluang kerja perkotaan dan pedesaan menerima kembali orang-orang yang telah pensiun dari pekerjaannya atau yang kembali ke desa karena alasan lainnya. Adapun faktor keempat adalah gagasan, yaitu hal yang berkenaan dengan budaya, wisata pertanian dan pedesaan bagi perkotaan dan teknologi informasi dan media seperti radio dan televisi bagi masyarakat pedesaan; dan (5) Pembiayaan (keuangan), masyarakat pedesaan menyimpan surplus uang dari kegiatannya di kota (bank) dan mendapatkan investasi dari perkotaan (Lynch, 2005).



GAMBAR 2.2
INTERAKSI PERKOTAAN DAN PEDESAAN

2.2 Kajian Potensi Wilayah belakang

Wilayah belakang (*Hinterland*) dipandang sebagai wilayah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, tingkat kesejahteraan penduduk di bawah rata-rata serta rendahnya tingkat layanan fasilitas maupun utilitas yang ada.

May (1984; 61) menjelaskan bahwa tingkat potensi pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan cara untuk melihat seberapa jauh hasil perkembangan wilayah dan hasil pembangunan di wilayah tersebut serta besarnya kemampuan wilayah untuk menerima perkembangan. Semakin tinggi tingkat potensi perkembangan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk tumbuh dan menerima perkembangan. Hal ini akan memberikan dampak kepada daerah yang mempunyai tingkat potensi pelayanan sosial ekonomi dan perhubungan yang tinggi untuk lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah tingkat potensi perkembangan yang rendah.

Pengertian potensi wilayah dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi mengenai potensi sumberdaya alam dan manusia yang dapat ditumbuhkembangkan dan diarahkan pada kebijakan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Menurut Sukirno (1981) dan Arsyad (1999) bahwa cara terbaik yang digunakan dalam pembangunan daerah adalah dengan pengembangan sektor pertanian. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan:

1. Sebagian besar penduduk hidup dan bekerja di sektor pertanian, padahal di sektor pertanian merupakan kantong kemiskinan dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.

2. Bila kemiskinan di daerah pertanian dibiarkan maka akan terjadi migrasi yang dapat menyebabkan pengangguran di kota-kota dengan segala konsekuensinya.
3. Jika dilakukan pilihan pembangunan di sektor industri, sektor ini tidak dapat menampung tambahan tenaga kerja secara signifikan. Selain itu, sektor industri sangat rentan dengan kelestarian lingkungan.
4. Sektor pertanian perlu terus dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat serta untuk memperoleh devisa melalui kegiatan ekspor.
5. Sektor pertanian telah terbukti memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh krisis ekonomi, walaupun sektor ini dinilai lamban dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Diketahui bahwa sektor pertanian agak lamban dalam mendorong pertumbuhan daerah maka pembangunan sektor ini harus diikuti dengan pembangunan sektor-sektor prioritas lainnya, seperti agroindustri dan agribisnis atau industri pengolahan yang bahan bakunya bersumber dari sektor pertanian.

2.3 Peran Daerah Belakang dalam Perkembangan Kota

Hadjisarosa dalam Sukirno (1981) mengemukakan bahwa pada suatu daerah terdapat hubungan dan ketergantungan antara pusat dengan wilayah yang mengitarinya. Daerah pusat membutuhkan bahan pangan dan tenaga kerja dari daerah-daerah belakang sebaliknya daerah belakang, membutuhkan produk-produk hasil industri dari perkotaan. Interaksi antara kota pusat dan daerah belakang dapat menimbulkan ketidakseimbangan struktural di daerah

bersangkutan, demikian pula antara pusat besar dengan pusat-pusat kecil lainnya. Interaksi penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi intensitasnya dibandingkan dengan daerah yang dipengaruhinya. Interaksi tersebut menunjukkan korelasi negatif terhadap jarak, semakin jauh jarak antara dua pusat berarti semakin rendah intensitas interaksinya. Berdasarkan pada korelasi dari keterkaitan interaksi, maka dapat diartikan bahwa semakin lengkap fasilitas pelayanan yang tersedia di suatu pusat berarti semakin jauh wilayah pelayanannya (wilayah pengaruhnya).

Friedmann (1976) membahas adanya pandangan suatu sistem keruangan yang lengkap dengan melihat daerah pusat dan daerah tepi sebagai suatu sistem. Wilayah pusat di sini diartikan sebagai suatu teritorial tertentu dengan subsistem masyarakat yang teratur memiliki kapasitas tinggi untuk memacu pembaharuan dan menyerap perubahan inovasi. Adapun daerah tepi merupakan subsistem yang jalur perkembangannya terutama ditentukan atau dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang ada di pusat, sehingga daerah ini mempunyai ketergantungan substansial. Dengan keadaan tersebut, dapat dilihat bahwa ada jalinan yang berupa interaksi antara wilayah pusat dengan daerah tepi.

Dari uraian tersebut terlihat hubungan bahwa ketergantungan daerah belakang sangat besar terhadap peranan kota sebagai pusat pertumbuhan dimana dalam interaksinya menimbulkan pengembangan terhadap timbulnya unit-unit pelayanan yang akan mendorong daerah belakang untuk dapat berperan sebagai subpusat pertumbuhan terdepan di daerah belakang.

Peran dari masing-masing sektor pembangunan ekonomi wilayah akan dapat mengarahkan acuan kebijakan pembangunan dalam program strategis yang lebih

inovatif dan aspiratif untuk menciptakan pembangunan yang terintegrasi. Permasalahannya adalah sejauh mana pengaruh dari sektor pembangunan ekonomi tersebut berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan bagi daerah belakang dan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan dalam pengelolaan sektor pembangunan ekonomi antarwilayah merupakan konsep pengembangan wilayah yang berusaha mewujudkan pemerataan perkembangan antar daerah, dimana keterkaitan dan keterpaduan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dengan mengutamakan penekanan pada kesenjangan tingkat pertumbuhan antar wilayah. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah penduduk di seluruh wilayah dapat memperoleh berbagai pelayanan sosial ekonomi dan lainnya sehingga perkembangan antar daerah dapat mudah terwujud.

2.4 Peran Kota dalam Perkembangan Wilayah

Perkembangan kota, menurut Friedmann (1976) terjadi lebih dahulu dari pada pengembangan wilayah. Peran kota dalam suatu sistem perkotaan dipandang sebagai agen dinamis pengembangan wilayah. Sistem perkotaan bukan hanya membangkitkan namun juga menjadi mediator pengembangan wilayah. Kota sebagai pusat pelayanan merupakan pusat pemerintahan dan administrasi yang berperan sebagai pusat kelembagaan dan informasi melalui hubungan komunikasi dalam menunjang sektor pembangunan sosial, ekonomi dan administrasi ke wilayah sekitarnya. Dengan demikian menjamin keterkaitan fungsi pembangunan, inovasi dan kemajuan yang serasi, seimbang dan selaras antara kota dan wilayah perdesaan (belakang).

Von Thunen dan Losch (dalam Daldjoeni, 1998) menjelaskan bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dari adanya kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari distribusi keruangan dan kegiatan manusia yang bertumpu pada faktor jarak dan hubungan dari tiap-tiap lokasi yang juga dapat meliputi lebih dari satu pusat pertumbuhan.

Peran kota dalam perkembangan wilayah adalah sebagai elemen nodal yang terjadi dalam suatu sistem hubungan antara kota dan wilayah disekelilingnya. Menurut Daldjoeni (1998), di Eropa interaksi kota-wilayah memunculkan sebutan untuk kawasan luar kota yang agraris, misalnya *Umland* (sebutan geografis di Jerman dan Skandinavia); dan *hinterland* di Inggris. Berdasarkan fungsi pengaruh kota terhadap pedalaman memunculkan sebutan *catchment area*, *space of influence* dan *urban field* serta *city region* (Daldjoeni, 1998: 77).

Dalam pengertian lain, kedudukan kota terhadap wilayah sekelilingnya adalah sebagai inti dengan wilayah pinggiran, yaitu dalam struktur ruang wilayah sebagai pusat dari kegiatan, yang menjadi pusat pertumbuhan bagi pengembangan suatu wilayah. Pandangan tentang konsep pertumbuhan menekankan pada peran dan fungsi dari pusat pelayanan yang oleh para ahli menyebutnya sebagai konsep kutub pertumbuhan (Perroux, 1964), konsep pusat pertumbuhan (Boudeville, 1966), konsep integrasi ruang ekonomi (Friedmann, 1976) yang dalam rencana tata ruang diterjemahkan kota-kota dengan hierarki tertentu yang melayani wilayah pengembangan.

Parr (1973) mengatakan ada beberapa strategi pusat pertumbuhan yaitu:

- Membangkitkan Kembali Daerah Terbelakang

Daerah terbelakang dipandang sebagai daerah yang memiliki karakteristik rendahnya tingkat ketrampilan masyarakat, pendapatan perkapita, tingkat kesejahteraan penduduk dan tingkat pelayanan fasilitas sebagai prasarana dasar maupun utilitas yang ada.

Strategi ini dilakukan guna menciptakan struktur ruang wilayah yang lebih kompetitif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan antara pergerakan modal secara interregional yang bertujuan untuk mencegah aliran modal ke luar wilayah serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Hasil yang diharapkan adalah berupa transformasi struktur ruang ekonomi wilayahnya.

- Mendorong Dekonsentrasi Wilayah

Strategi ini dilakukan guna menekan tingkat konsentrasi wilayah serta bertujuan untuk membentuk suatu struktur ruang yang tepat khususnya pada beberapa bagian dari wilayah nonmetropolitan. Artinya, pengembangan dilakukan pada wilayah non-metropolitan guna menekan peranan wilayah metropolitan yang sudah terlalu besar, yang menjadi masalah adalah tidak semua lokasi bisa dijadikan pusat pertumbuhan.

- Memodifikasi Sistem Kota-Kota

Tujuan strategi ini adalah untuk mengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan. Dengan adanya pengaturan sistem kota-kota dengan hierarki yang terstruktur, diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.

- Pencapaian terhadap Keseimbangan Wilayah

Strategi ini muncul akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi interregional, biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan serta

yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada wilayah-wilayah tersebut.

2.5 Pengaruh Pertumbuhan Wilayah Belakang

Pertumbuhan antar wilayah memberikan dampak terhadap perkembangan wilayah yang pesat dengan perkembangan wilayah yang lamban. Wilayah yang perkembangannya lamban serta miskin dengan sumberdaya yang dimiliki, cenderung akan menggantungkan diri terhadap pengaruh dari daya tarik wilayah yang pesat perkembangannya. Ketergantungan ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif bila tidak ada peran serta masyarakat dan intervensi kebijakan pemerintah.

Menurut Parr (1973) ada dua dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan, yaitu:

1. Konsentrasi Prasarana Kota pada Pusat Pertumbuhan

Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan sosial. Dalam konteks umum, penyediaan prasarana dibatasi pada penyediaan prasarana skala luas. Prasarana skala luas akan menciptakan eksternalitas. Hal ini akan membuat kota menjadi lebih menarik bagi masyarakat dalam konteks lokasi dan masuknya investasi. Dalam penyediaan prasarana ini peranan investasi pemerintah lebih besar.

2. Konsentrasi Aktivitas Perekonomian (aglomerasi)

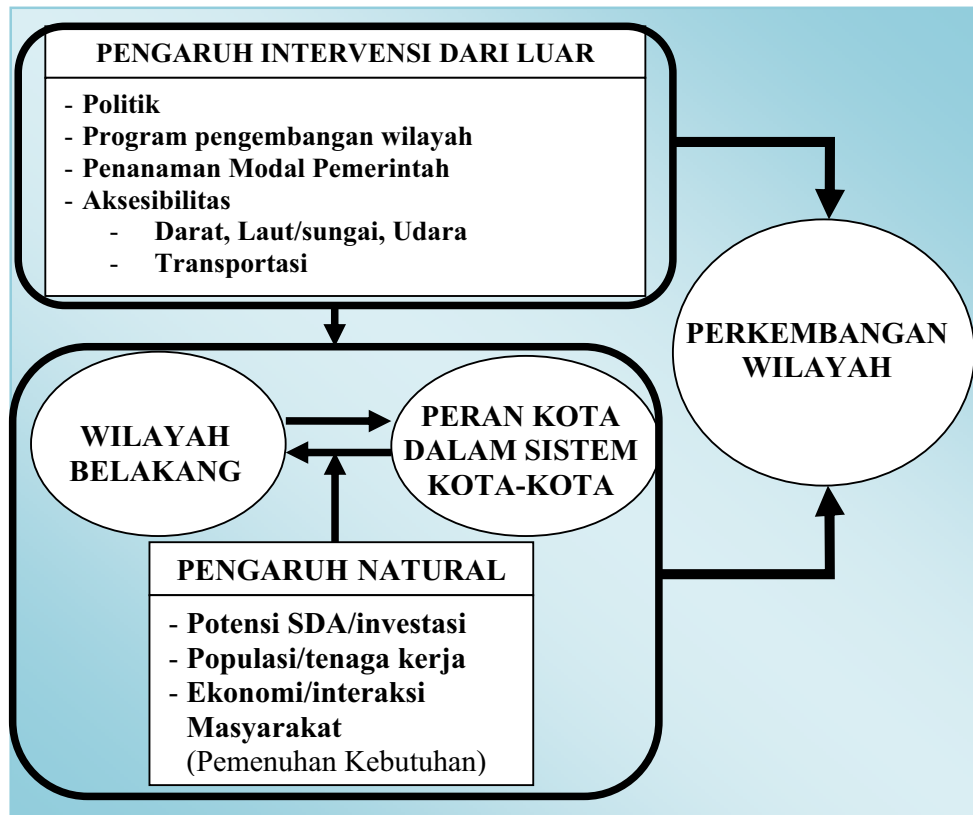
Konsentrasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri memiliki kaitan ke depan dan ke belakang. Kondisi ini dipengaruhi oleh aliran

investasi yang masuk langsung ke pusat pertumbuhan dan dikaitkan dengan eksploitasi aglomerasi ekonomi.

Menurut Soejarto (1991) bahwa faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pola dan struktur pusat-pusat pelayanan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor manusia; (2) faktor kegiatan manusia dan; (3) faktor pola pergerakan manusia pada satu pusat kegiatan ke pusat kegiatan lainnya. Selanjutnya diterangkan bahwa faktor manusia menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota baik karena kelahiran maupun karena migrasi ke kota, perkembangan tenaga kerja, perkembangan status sosial dan kemampuan ilmu pengetahuan serta penyerapan teknologi.

Yunus (2001) mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab perbedaan pertumbuhan pada suatu wilayah, akan menghasilkan pola-pola keruangan yang khas yaitu: (1) Fasilitas-fasilitas khas tertentu (*specialized facilities*); (2) Faktor ekonomi eksternal (*external economies*); (3) faktor yang saling merugikan antarfungsi tidak serupa dan (4) faktor kemampuan fungsi ekonomi yang berbeda. Aji (1990) mengatakan bahwa dalam menentukan ukuran pertumbuhan wilayah dapat dilihat dari berbagai indikator yang ada, salah satunya adalah indikator tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang dapat menunjukkan prestasi tingkat kualitas hidup.

Dalam studi ini dibatasi pada mendiskripsikan potensi wilayah belakang dan interaksinya terhadap pusat-pusat pertumbuhan dengan adanya jaringan jalan regional serta tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan menggunakan parameter yang berpengaruh antara lain seperti yang terlihat pada diagram kerangka teoritik dibawah ini.



Sumber : Hasil Sintesis, 2008

GAMBAR 2.3
DIAGRAM KERANGKA TEORITIK

2.6. Sintesis Kajian Pustaka

Hasil kajian teori yang telah dipaparkan di atas kemudian disintesis dalam bentuk matriks untuk menemukan variabel atau parameter dalam melakukan penelitian. Dengan sintesis kajian teori tersebut dapat diketahui variabel apa saja yang akan dianalisis untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian seperti terlihat pada Tabel II.1

TABEL. II.1
SINTESIS KAJIAN PUSTAKA

No	Teori / Pendapat	Pengelompokan Unsur-unsur Teori/Pendapat	Indikator	Variabel/parameter
1	2	3	4	5
1.	<p>Peran dan sistem Kota-kota</p> <p>Friedman (1976) Peran kota dalam suatu sistem perkotaan dipandang sebagai agen dinamis pengembangan wilayah. Sistem perkotaan bukan hanya membangkitkan namun juga menjadi mediator pengembangan wilayah. Kota sebagai pusat pelayanan merupakan pusat pemerintahan dan administrasi yang berperan sebagai pusat kelembagaan dan informasi melalui hubungan komunikasi dalam menunjang sektor pembangunan sosial, ekonomi dan administrasi ke wilayah sekitarnya sehingga menjamin keterkaitan fungsi pembangunan, inovasi dan kemajuan yang serasi, seimbang dan selaras antara kota dan wilayah perdesaan (belakang).</p> <p>Daldjoeni (1998) Peran kota dalam perkembangan wilayah adalah sebagai elemen nodal yang terjadi dalam suatu sistem hubungan antara kota dan wilayah sekelilingnya.</p>	<p>Peranan kota berdampak terhadap daerah belakang (<i>hinterland</i>) pada interaksi perkembangan sosial ekonomi karena kota merupakan elemen nodal atau agen dinamis dengan adanya pusat kelembagaan dan informasi. Peranan kota juga sebagai inti dari wilayah belakangnya dan menjadi pusat pertumbuhan dengan melakukan beberapa strategi antara lain: Membangkitkan kembali Daerah Belakang, Mendorong dekonsentrasi wilayah, Memodifikasi sistem kota-kota dan pencapaian terhadap keseimbangan wilayah.</p>	<p>Hirarkhi kota sangat menentukan peranannya, semakin lengkap fasilitas dan utilitas sebuah kota makin besar pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah pinggirannya di sekelilingnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan fasilitas dan utilitas ▪ Jumlah Penduduk
2.	<p>(Perroux, 1964) Dalam pengertian lain, kedudukan kota terhadap wilayah sekelilingnya adalah sebagai inti dengan wilayah pinggirannya, yaitu dalam struktur ruang wilayah sebagai pusat dari kegiatan, yang menjadi pusat pertumbuhan bagi pengembangan suatu wilayah, pandangan tentang konsep pertumbuhan menekankan pada peran dan fungsi dari pusat pelayanan yang oleh para ahli disebut sebagai konsep kutub pertumbuhan</p>			
3.	<p>Parr (1973) mengatakan ada beberapa strategi pusat pertumbuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangkitkan Kembali Daerah Terbelakang ▪ Mendorong Dekonsentrasi Wilayah ▪ Memodifikasi Sistem Kota-Kota ▪ Pencapaian terhadap Keseimbangan Wilayah 			

1	2	3	4	5
<p>II.</p> <p>1.</p>	<p>Kajian Peranan Wilayah Belakang</p> <p>Hadjisarosa dalam Sukirno (1981) mengemukakan bahwa pada suatu daerah terdapat hubungan dan ketergantungan antara pusat dengan wilayah yang mengitarinya. Daerah pusat membutuhkan bahan pangan dan tenaga kerja dari daerah-daerah belakang sebaliknya daerah belakang membutuhkan produk-produk hasil industri dari perkotaan . Interaksi antara kota pusat dan daerah belakang dapat menimbulkan ketidakseimbangan struktural di daerah bersangkutan, demikian pula antara pusat besar dengan pusat-pusat kecil lainnya. Interaksi penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi intensitasnya dibandingkan dengan daerah yang dipengaruhinya. Interaksi tersebut menunjukkan korelasi negatif terhadap jarak, semakin jauh jarak antara dua pusat berarti semakin rendah intensitas interaksinya. Berdasarkan pada korelasi dari keterkaitan interaksi maka dapat diartikan bahwa semakin lengkap fasilitas pelayanan yang tersedia di suatu pusat berarti semakin jauh wilayah pelayanannya (wilayah pengaruhnya).</p>	<p>Wilayah Belakang merupakan daerah yang mensuplai bahan pangan dan tenaga kerja, perkembangan wilayah yang tidak seimbang dapat menyebabkan wilayah belakangnya kurang berkem bang ini disebabkan adanya daya tarik keperkotaan akibat dari aktivitas ekonomi. Namun wilayah perkotaan dan perdesaan mempunyai ketergantungan substansial sehingga terjadinya interaksi</p>	<p>Potensi wilayah yang tumbuh dan berkembang di wilayah belakang baik berupa sumberdaya alam, maupun sumberdaya manusia akan mengakibatkan munculnya pusat pertumbuhan baru.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi sumberdaya alam ▪ Potensi tenaga kerja
<p>2.</p>	<p>Friedman (1976) membahas adanya pandangan suatu sistem keruangan yang lengkap dengan melihat daerah pusat dan daerah tepi sebagai suatu sistem. Wilayah pusat disini diartikan sebagai suatu teritorial tertentu dengan subsistem masyarakat yang teratur memiliki kapasitas tinggi untuk memacu pembaharuan dan menyerap perubahan inovasi. Daerah tepi merupakan subsistem yang jalur perkembangannya terutama ditentukan atau dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang ada di pusat, sehingga daerah ini mempunyai ketergantungan substansial. Dengan keadaan tersebut, dapat dilihat bahwa ada jalinan yang berupa interaksi antara wilayah pusat dengan daerah tepi.</p>			

1	2	3	4	5
<p>III.</p>	<p>Kajian Proses Pertumbuhan Wilayah</p>			
1.	<p>Soejarto (1981) bahwa dalam ruang ekonomi akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran hierarki dan pembangunan akan terstruktur secara makro melalui hierarki wilayah pusat dan secara regional dari pusat tersebut ke masing-masing daerah belakangnya.</p>	<p>Pertumbuhan wilayah dimulai dari terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan (<i>growth pole</i>) yang kemudian menjalankan perkembangan ke pusat-pusat yang lebih rendah serta terjadi interaksi antara wilayah belakang dengan pusatnya.</p>	<p>Adanya saling tukar menukar barang dan jasa serta saling memenuhi kebutuhan dengan barang, pendistribusian barang, manusia (Tenaga Kerja) dan juga gagasan (<i>ide</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribusi produk (pertanian dari wilayah belakang dan barang industri dari wilayah pusat.
2.	<p>Ferroux dalam Daldjoeni (1997) menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan kutub (<i>growth pole</i>) yang terpusat dan mengambil tempat tertentu sebagai pusat pengembangan diharapkan menjalankan perkembangan ke pusat-pusat yang tingkatannya lebih rendah. Dalam konsep tersebut terdapat istilah <i>spread</i> dan <i>trickling down</i> (penjalaran dan penetesan) serta <i>backwash</i> dan <i>polarization</i> (penarikan dan pemusatan).</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas perdagangan ▪ Peluang investasi (Sumberdaya alam yang tersedia)
3.	<p>Boudeville (1966) berpendapat bahwa perekonomian wilayah bertumbuh jika industri yang dikembangkan pada pusat wilayah nodal bersifat propulsif dan sifat industrinya terhadap pertumbuhan menyebar melalui interkoneksi ekonomi terhadap daerah belakang.</p>			
4.	<p>Lynch , 2005. Interaksi wilayah perkotaan dan pedesaan dapat dilihat dari 5 faktor yang saling berinteraksi antara lain: (1) Bahan makanan, (2) Sumberdaya alam, (3) Masyarakat (Manusia), (4) Gagasan, dan (5) Pembiayaan (Keuangan), masyarakat pedesaan menyimpan surplus uang dari kegiatannya di kotan (bank) dan mendapatkan investasi dari perkotaan</p>			

BAB III

KARAKTERISTIK KABUPATEN ACEH BESAR, PIDIE DAN ACEH JAYA

3.1. Posisi Kabupaten Aceh Besar dalam Konteks Regional

Posisi geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada $05^{\circ} 03' 7,2''$ - $05^{\circ} 45' 16,2''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 06' 10,8''$ - $95^{\circ} 50' 25,1''$ Bujur Timur. Posisi ini menunjukkan Kabupaten Aceh Besar berada pada wilayah paling ujung utara di Pulau Sumatera dimana sisi timurnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Pidie dan sisi selatannya berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Jaya.

Secara administratif Kabupaten Aceh Besar sebagai pintu gerbang utama menuju Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena berbatasan langsung dengan kota tersebut, sehingga kabupaten-kabupaten lain seperti halnya Pidie dan Aceh Jaya yang ingin berinteraksi dengan Kota Banda Aceh ini harus melewati lebih dahulu Kabupaten Aceh Besar.

Keberadaan Kabupaten Aceh Besar sebagai pintu gerbang utama ini telah ditunjang sarana transportasi yang cukup memadai seperti : Jalan Nasional Arteri Primer Banda Aceh – Medan serta Banda Aceh – Meulaboh. Disamping itu, ditunjang pula prasarana transportasi Bandara Udara Iskandar Muda di Blang Bintang, Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya. Di sisi lain, sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh, menyebabkan Kabupaten Aceh Besar sebagai penyangga dari Kota Banda Aceh, yaitu penyangga dalam memenuhi kebutuhan perumahan, fasilitas kota, kegiatan perdagangan/jasa maupun kegiatan perindustrian. Dengan demikian, dapat dikatakan perkembangan

Kota Banda Aceh akan berimplikasi langsung terhadap perkembangan Kabupaten Aceh Besar secara menyeluruh.

Sejalan dengan potensi letak dan posisi Kabupaten Aceh Besar yang demikian strategis, menjadikan Kabupaten Aceh Besar berpeluang tumbuh, berkembang dan berinteraksi dengan wilayah sekitarnya khususnya dengan wilayah terdekat seperti Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya.

Jumlah kecamatan yang ada di masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut, Aceh Besar setelah pemekaran pada tahun 2006 berjumlah 23 kecamatan, Pidie 30 kecamatan dan Aceh Jaya 6 kecamatan, namun yang menjadi ruang lingkup wilayah mikro penelitian adalah Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar dan dua kecamatan lain yang merupakan pusat pertumbuhan yang akan dilalui oleh jalan regional yaitu Kecamatan Jaya dengan Ibukota Lamno di wilayah Kabupaten Jaya dan Kecamatan Titeu Keumala dengan Ibukota di wilayah Kecamatan Pidie.

Topografi ketiga kabupaten baik Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya dapat dikatakan hampir sama karena ketiganya mempunyai wilayah pesisir pantai yaitu dataran rendah, landai berbukit-bukit dan daerah pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi dari 0 m dpl sampai dengan 1500 m dpl. Yang membedakan kondisi ketiga kabupaten ini adalah letak ibukotanya, Aceh Besar mempunyai ibukota yang terletak di wilayah tengah dengan aksesibilitas yang rendah, sedangkan dua kabupaten lainnya mempunyai ibukota yang terletak di jalur strategis nasional, yaitu di sisi jalan arteri primer.

Aceh Jaya dengan Ibukota Calang terletak di jalur yang menghubungkan

wilayah pantai barat dan selatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Lamno adalah Ibukota Kecamatan Jaya yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya yang dari sisi timur dan utaranya berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Jantho, sedangkan sebelah utaranya berbatasan dengan Kecamatan Lhoong.

Kabupaten Pidie dengan ibukotanya Sigli terletak di jalur yang menghubungkan wilayah pantai timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sehingga jalur ini merupakan jalur dengan aksesibilitas yang cukup tinggi karena merupakan jalur hubungan antarpropinsi. Adapun Kota Keumala adalah Ibukota Kecamatan Titeu Keumala yang terletak disebelah barat Kabupaten Pidie, tetapi agak ke belakang dan jauh dari akses jalan nasional Banda Aceh – Medan.

Perbedaan lain yang terlihat antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya adalah Kabupaten Aceh Besar mempunyai wilayah kepulauan yang terangkum dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Pulo Aceh. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Breueh, Pulau Nasi, Pulau Bunta, Pulau Kerisik dan Pulau Batee.

3.2. Sumber Daya Alam

3.2.1. Pertanian Tanaman Pangan

Lahan pertanian yang dimiliki Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya merupakan lahan subur berpotensi yang dapat diklasifikasikan sebagai lahan sawah dan bukan lahan sawah dengan komposisi luas sebagai berikut.

TABEL III.1
KOMPOSISI LAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR
PIDIE DAN ACEH JAYA

No	Kabupaten	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah (Ha)
1	Aceh Besar	30.421	291.275
2	Pidie	36.400	212.251
3	Aceh Jaya	10.252	352.448

Sumber: Kantor BPS NAD, 2005

Berdasarkan data *Map Frame* yang dikeluarkan oleh BRR, BPS, ADB dan IHS bahwa areal pertanian yang mengalami kerusakan akibat bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Kabupaten Aceh Besar lebih kurang 35,732 Ha. yang terdiri dari 5.421 Ha lahan sawah dan 30.311 Ha lahan kering. Di Pidie lahan yang mengalami kerusakan adalah 1.755 Ha lahan sawah, Aceh Jaya adalah sawah seluas 2.400 Ha dan lahan kering seluas 43.187 Ha dan 13.656 Ha Lahan Kering.

Produksi komoditas pertanian tanaman pangan yang diproduksi oleh ketiga kabupaten ini adalah baik padi, palawija dan hortikultura adalah seperti terlihat pada Tabel III.2 berikut ini.

TABEL III.2
PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2005

No	Komoditi	Produksi/Kabupaten (Ton)		
		Aceh Besar	Pidie	Aceh Jaya
1	Padi	167.456	247.472	13.886
2	Palawija	11.399	21.168	799
3	Hortikultura (Sayuran)	51.647	16.581	66
4	Hortikultura (Buah-buahan)	6.682	7.115	1.346

Sumber: Kantor BPS NAD, 2005

Produksi Tanaman Pangan umumnya di dominasi oleh Kabupaten Pidie kecuali produksi tanaman hortikultura sayuran yang lebih didominasi oleh Kabupaten Aceh Besar. Besarnya produksi sayuran di kabupaten Aceh Besar disebabkan permintaan Kota Banda Aceh.

3.2.2. Peternakan

Peternakan merupakan subsektor usaha yang penting di kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya. Pengembangan usahatani peternakan mempunyai prospek untuk menjadi salah satu sektor yang menjadi unggulan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Jumlah ternak yang ada di ketiga kabupaten dapat dilihat pada Tabel III.3 di bawah ini.

TABEL III.3
POPULASI TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR
PIDIE DAN ACEH JAYA TAHUN 2005

No	Jenis Ternak	Populasi/Kabupaten (ekor)		
		Aceh Besar	Pidie	Aceh Jaya
1	Lembu	99.536	119.041	4.963
2	Kerbau	34.440	80.663	5.113
3	Kambing	68.832	114.805	6.822
4	Domba	24.689	4.619	60
5	Ayam Ras	171.690	35.000	-
6	Ayang Buras	461.320	3.883.511	46.644
7	Itik	250.924	449.418	32.685

Sumber: Kantor BPS NAD, 2005

Sub sektor peternakan juga terlihat didominasi oleh Kabupaten Pidie, kecuali untuk ternak domba dan ayam ras yang lebih besar produksinya di Aceh Besar, sedangkan di Aceh Jaya produksinya masih sedikit. Tetapi ketiga daerah ini sangat berpotensi untuk pengembangan usaha peternakan.

3.2.3. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya cukup besar. Jenis ikan yang banyak dijumpai adalah ikan tuna, cakalang dan kerapu yang merupakan komoditas andalan, terutama dalam memacu peningkatan pendapatan nelayan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemanfaatan pesisir sebagai basis perikanan telah berkembang, terutama dalam penangkapan ikan, pengolahan ikan, budidaya perikanan air tawar dan perdagangan dapat dijadikan andalan dalam memacu komoditi ikan ekspor perikanan. Produksi perikanan di ketiga kabupaten seperti dilihat pada Tabel III.4 berikut ini.

TABEL III.4
PRODUKSI PERIKANAN DI KABUPATEN ACEH BESAR
PIDIE DAN ACEH JAYA TAHUN 2005

No	Jenis Usaha	Produksi/Kabupaten (Ton)		
		Aceh Besar	Pidie	Aceh Jaya
1	Perikanan Tangkap	4.059	9.367	733
2	Perikanan Budidaya	4.344	5.120	-

Sumber: Kantor BPS NAD, 2005.

Dari Tabel III.4 di atas terlihat bahwa produksi perikanan di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 belum berproduksi. Hal ini disebabkan oleh hancurnya areal budidaya perikanan, khususnya tambak akibat terkena bencana gempa bumi dan gelombang tsunami dan belum sepenuhnya dilakukan perbaikan.

3.2.4. Kehutanan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam pengelolaannya hutan terbagi menurut fungsinya, yaitu:

1. Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang karena keadaan/kondisi alamnya perlu dipertahankan sebagai hutan untuk menghindari terjadinya bencana kerusakan lingkungan.
2. Hutan Produksi, yaitu wilayah hutan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan hasilnya berupa kayu dan hasil hutan lainnya.
3. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Hutan Suaka Alam bertujuan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah dan keadaan flora/fauna, sedangkan Hutan Wisata memiliki fungsi utama sebagai tempat rekreasi wujud dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati.

Setelah adanya moratorium kehutanan pada tahun 2007, HPH telah ditutup seluruhnya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hasil hutan yang boleh dieksploitasi hanya rotan, kayu yang didapat dari pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan budidaya (IPK), dan kayu bakar.

3.2.5 Perkebunan

Topografi Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya yang berbukit dan berhutan menjadi lahan budidaya yang sesuai. Pada umumnya usaha perkebunan di daerah ini diusahakan oleh petani secara sambilan berupa kebun campuran yang ditanam bersamaan atau diantara tanaman pangan lainnya. Hanya komoditi tertentu yang diusahakan oleh perusahaan berskala besar seperti sawit dan karet.

Begitu juga kondisi petani yang sebahagian besar memiliki lahan usaha yang relatif kecil (rata – rata 0,5 ha/KK) serta kurang memiliki modal usaha.

Secara prinsip tingkat produktivitas hasil perkebunan masih berpeluang untuk ditingkatkan sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki.

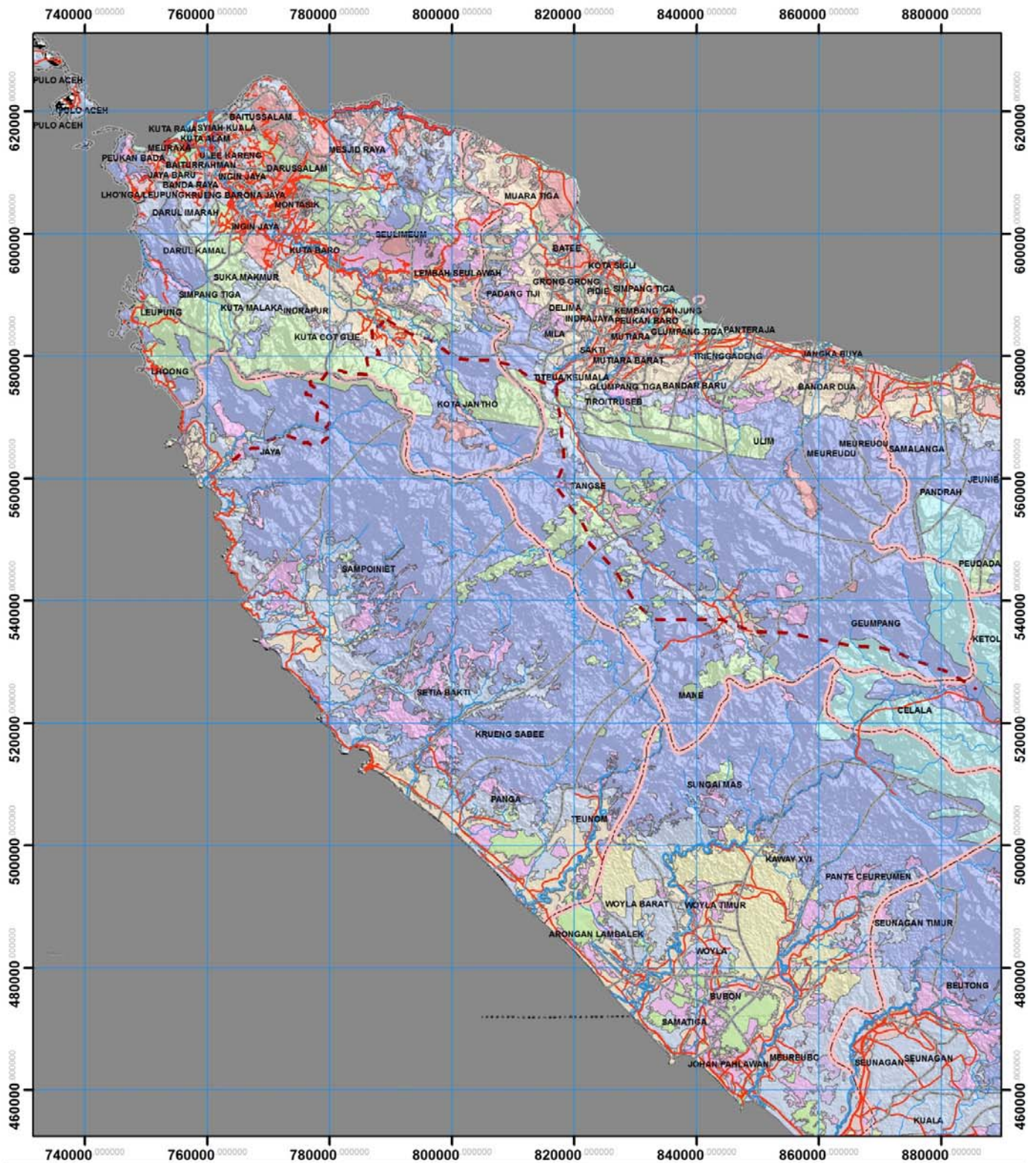
Produksi perkebunan yang ada dan umum diusahakan oleh petani dan perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya adalah sawit, coklat/kakao, kelapa, pinang, kemiri, karet, cengkeh, lada dan nilam.

Tanaman kelapa sawit tidak begitu populer di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, tetapi di Kabupaten Aceh Jaya telah lama dibudidayakan termasuk oleh perkebunan swasta. Baru pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar mulai mengembangkan kelapa sawit rakyat di kecamatan Kota Jantho seluas 600 Ha. Untuk tahun-tahun mendatang Aceh Besar sangat berpotensi untuk pengembangan komoditas andalannya seperti sawit, kakao, lada, cengkeh dan tanaman jarak. Berikut dapat dilihat produksi perkebunan di kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya seperti yang tercantum dalam tabel III.5.

TABEL III.5
PRODUKSI PERKEBUNAN DI KABUPATEN ACEH BESAR
PIDIE DAN ACEH JAYA TAHUN 2005

No	Jenis Usaha	Produksi/Kabupaten (Ton)		
		Aceh Besar	Pidie	Aceh Jaya
1	Sawit	-	4	5.091
2	Kelapa	6.489	8.101	4.487
3	Pinang	524	1.503	798
4	Kopi	759	2.047	1.176
5	Kakao	128	3.942	847
6	Kemiri	1.488	698	34
7	Karet	-	3	8.092
8	Cengkeh	267	-	-
9	Lada	35	37	-
10	Nilam	-	-	4
11	Jahe	34	166	329
12	Kunyit	66	500	26
13	Pala	160	33	77

Sumber: Kantor BPS NAD



 <p>Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>Peta Tata Guna Lahan Kab.Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya</p>																															
			<p>Potensi dan interaksi Wilayah Belakang Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD</p>	<p>Legenda</p> <table border="0"> <tr> <td>— Jalan kolektor</td> <td>Perkebunan</td> </tr> <tr> <td>— Jl. Utama</td> <td>Pemukiman</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan_Lahan_Aceh</td> <td>Pertambangan</td> </tr> <tr> <td>NAMA_LAHAN</td> <td>Pertanian lahan kering</td> </tr> <tr> <td>Awan</td> <td>Pertanian lahan kering bercampur semak</td> </tr> <tr> <td>Hutan Tanaman Industri</td> <td>Rawa</td> </tr> <tr> <td>Hutan lahan kering primer</td> <td>Sawah</td> </tr> <tr> <td>Hutan lahan kering sekunder</td> <td>Semak belukar</td> </tr> <tr> <td>Hutan mangrove sekunder</td> <td>Tambak</td> </tr> <tr> <td>Hutan rawa primer</td> <td>Tanah Terbuka</td> </tr> <tr> <td>Hutan rawa sekunder</td> <td>Transmigrasi</td> </tr> <tr> <td>Pelabuhan udara/laut</td> <td>Tubuh air</td> </tr> </table>	— Jalan kolektor	Perkebunan	— Jl. Utama	Pemukiman	Penggunaan_Lahan_Aceh	Pertambangan	NAMA_LAHAN	Pertanian lahan kering	Awan	Pertanian lahan kering bercampur semak	Hutan Tanaman Industri	Rawa	Hutan lahan kering primer	Sawah	Hutan lahan kering sekunder	Semak belukar	Hutan mangrove sekunder	Tambak	Hutan rawa primer	Tanah Terbuka	Hutan rawa sekunder	Transmigrasi	Pelabuhan udara/laut	Tubuh air	<table border="1"> <tr> <td>Gambar</td> <td>Halaman</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sumber BAPPEDA NAD</td> </tr> </table>	Gambar	Halaman	3.1
— Jalan kolektor	Perkebunan																															
— Jl. Utama	Pemukiman																															
Penggunaan_Lahan_Aceh	Pertambangan																															
NAMA_LAHAN	Pertanian lahan kering																															
Awan	Pertanian lahan kering bercampur semak																															
Hutan Tanaman Industri	Rawa																															
Hutan lahan kering primer	Sawah																															
Hutan lahan kering sekunder	Semak belukar																															
Hutan mangrove sekunder	Tambak																															
Hutan rawa primer	Tanah Terbuka																															
Hutan rawa sekunder	Transmigrasi																															
Pelabuhan udara/laut	Tubuh air																															
Gambar	Halaman																															
3.1	54																															
Sumber BAPPEDA NAD																																

3.2.6 Pertambangan dan Energi

Ragam sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya hampir sama yang tersebar hampir semua kecamatan. Kekayaan alam ini masih banyak yang belum dieksploitasi, bahkan banyak diantaranya baru diketahui keberadaannya saja tapi belum diketahui berapa banyak deposit yang terkandung dalam bumi. Adapun data sumber daya mineral tersebut adalah batu gamping/batu kapur, marmer, lempung/serpih, belerang, tras, supertinit berurat magnesit, posphat, diorite/granodiorit, andesit, basalt, tembaga, emas, besi, timah hitam, batu bara, panas bumi, sirtu, tuga gamping, kalsit, diabas, batu gunung dan tanah urug.

Beberapa jenis sumberdaya energi dan mineral yang khusus dan tidak berada di semua kabupaten adalah panas bumi hanya ada di Kabupaten Aceh Besar, uranium dan timah hitam di Pidie, emas di Pidie dan Aceh Besar, pasir besi di Kabupaten Aceh Besar.

3.3. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2005 adalah 302.662 Jiwa, Kabupaten Pidie 474.359 jiwa dan Kabupaten Aceh Jaya sebesar 61.018 jiwa. Jumlah populasi terbanyak ada di Kabupaten Pidie sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah di Kabupaten Aceh Jaya. Sebaran jumlah penduduk menurut umur pada tahun 2005 di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya adalah seperti terlihat pada Tabel III.6.

TABEL III.6
SEBARAN PENDUDUK MENURUT UMUR DI
KABUPATEN ACEH BESAR PIDIE DAN ACEH JAYA
TAHUN 2005

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk/Kabupaten (jiwa)		
		Aceh Besar	Pidie	Aceh jaya
1	0 – 4	28.030	44555	4897
2	5 – 9	28.724	48.557	5981
3	10 – 14	31.075	53.767	7253
4	15 – 19	32.580	53.201	6248
5	20 – 24	34.571	43.823	5799
6	25 – 29	29.856	39.070	5868
7	30 – 34	24.214	32.083	4998
8	35 – 39	22.067	30.351	4916
9	40 – 44	17.300	24.712	3800
10	45 – 49	14.587	23.250	3349
11	50 – 54	12.007	20.355	2687
12	55 – 59	7.825	14.599	1487
13	60 – 64	7.487	14.160	1583
14	65+	12.339	25.523	2152
Jumlah		302.662	468.405	61.081

Sumber : Kantor BPS NAD, 2005

Dari tabel III.6 di atas terlihat bahwa komposisi penduduk yang berada di usia produktif (15 sampai dengan 54 tahun) paling banyak. Ini merupakan potensi tenaga kerja di berbagai bidang. Jumlah angkatan kerja ini bekerja di berbagai bidang tetapi yang paling banyak ada di sektor pertanian dan yang paling kecil jumlahnya ada di sektor minyak, gas dan air bersih. Hal ini tentunya karena tidak ada kegiatan eksploitasi minyak bumi dan gas alam di tiga kabupaten ini.

Untuk melihat jumlah angkatan kerja yang bekerja di masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada tabel III.7.

TABEL III.7
JUMLAH ANGKATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
DI KABUPATEN ACEH BESAR PIDIE DAN ACEH JAYA
TAHUN 2005

No	Lapangan Usaha	Jumlah Angkatan Kerja/Kabupaten (jiwa)		
		Aceh Besar	Pidie	Aceh jaya
1	Pertanian	79.235	241.933	30.029
2	Pertambangan dan galian	2.133	1.510	209
3	Industri pengolahan	25.076	12.073	1.478
4	Listrik dan Air Minum	390	1.044	107
5	Bangunan/Konstruksi	10.548	7.091	935
6	Perdagangan, Hotel dan restoran	24.827	11.170	2.006
7	Transportasi dan komunikasi	17.660	6.653	1.293
8	Keuangan Persewaan dan Jasa perusahaan	4.833	3.814	453
9	Jasa - jasa	8.984	7.624	759
10	Lainnya	3.456	2.807	396
	Total Angkatan Kerja	186.911	295.936	37.665

Sumber: Kantor BPS NAD (diolah)

3.4. Perekonomian

Kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya masih didominasi oleh sektor pertanian. Ini terlihat dari besarnya peranan

pertanian dalam pertumbuhan ekonomi baik ditinjau dari aspek pendapatan regional maupun dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian.

Peranan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2005 sebesar 37,47 % baru diikuti oleh sektor-sektor lain seperti pertambangan dan galian 3,02 %; industri pengolahan 4,88 %; listrik, gas dan air bersih 0,23 %; perdagangan, hotel dan restoran 20,20 %; bangunan/konstruksi 11,38 %; pengangkutan dan komunikasi 10,31 %; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 0,98 % dan jasa-jasa 11,54 %.

Peran sektor pertanian di Kabupaten Aceh Jaya terhadap pendapatan regionalnya lebih besar dibandingkan dengan Aceh Besar yaitu 50,15 % diikuti oleh pertambangan dan galian 0,53 %; industri pengolahan 10 %; listrik, gas dan air bersih 0,26 %; perdagangan, hotel dan restoran 11,09%; bangunan/konstruksi 5,43 %; pengangkutan dan komunikasi 8,44 %; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1,35 % dan jasa-jasa 12,75 %.

Jika dibandingkan dengan kedua kabupaten di atas, peranan sektor pertanian di Kabupaten Pidie merupakan yang paling tinggi bagi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, yaitu 65,64 % pertambangan dan galian 2,34 %, industri pengolahan 1,50 %; listrik, gas dan air bersih -6,54 %; perdagangan, hotel dan restoran 6,90 %; bangunan/konstruksi 4,94 %; pengangkutan dan komunikasi 5,91%; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 6,82 %; dan jasa-jasa 12,75 %.

3.5. Infrastruktur

Infrastruktur di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya sudah cukup baik, khususnya di Aceh Besar dukungan prasarana berupa angkutan umum,

bandar udara, pelabuhan laut, listrik, air bersih dan lainnya sudah hampir memenuhi kebutuhan warganya. Kelengkapan infrastruktur yang dimiliki dapat dikatakan karena posisi Aceh Besar yang dekat dengan Banda Aceh sehingga pembangunan infrastruktur merupakan prioritas.

3.5.1 Prasarana Penghubung

Secara umum kondisi jaringan jalan di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya mengalami penurunan. Hal ini terjadi antara lain karena menurunnya kemampuan pembiayaan setelah masa krisis ekonomi yang menyebabkan berkurangnya biaya pemeliharaan jalan oleh pemerintah. Tingkat kerusakan jalan akibat pembebanan lebih dan sistem penanganan yang belum memadai, berakibat pada hancurnya jalan sebelum umur teknis jalan tercapai. Bila kondisi ini tidak dapat ditanggulangi akan sangat berpengaruh kepada tingginya biaya transportasi. Penyebab lain dari turunnya kualitas jalan adalah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda ketiga wilayah tersebut yang membuat jalan nasional jalur barat-selatan hancur total dan jalur timur Banda Aceh-Medan di beberapa tempat mengalami penurunan dan patahan.

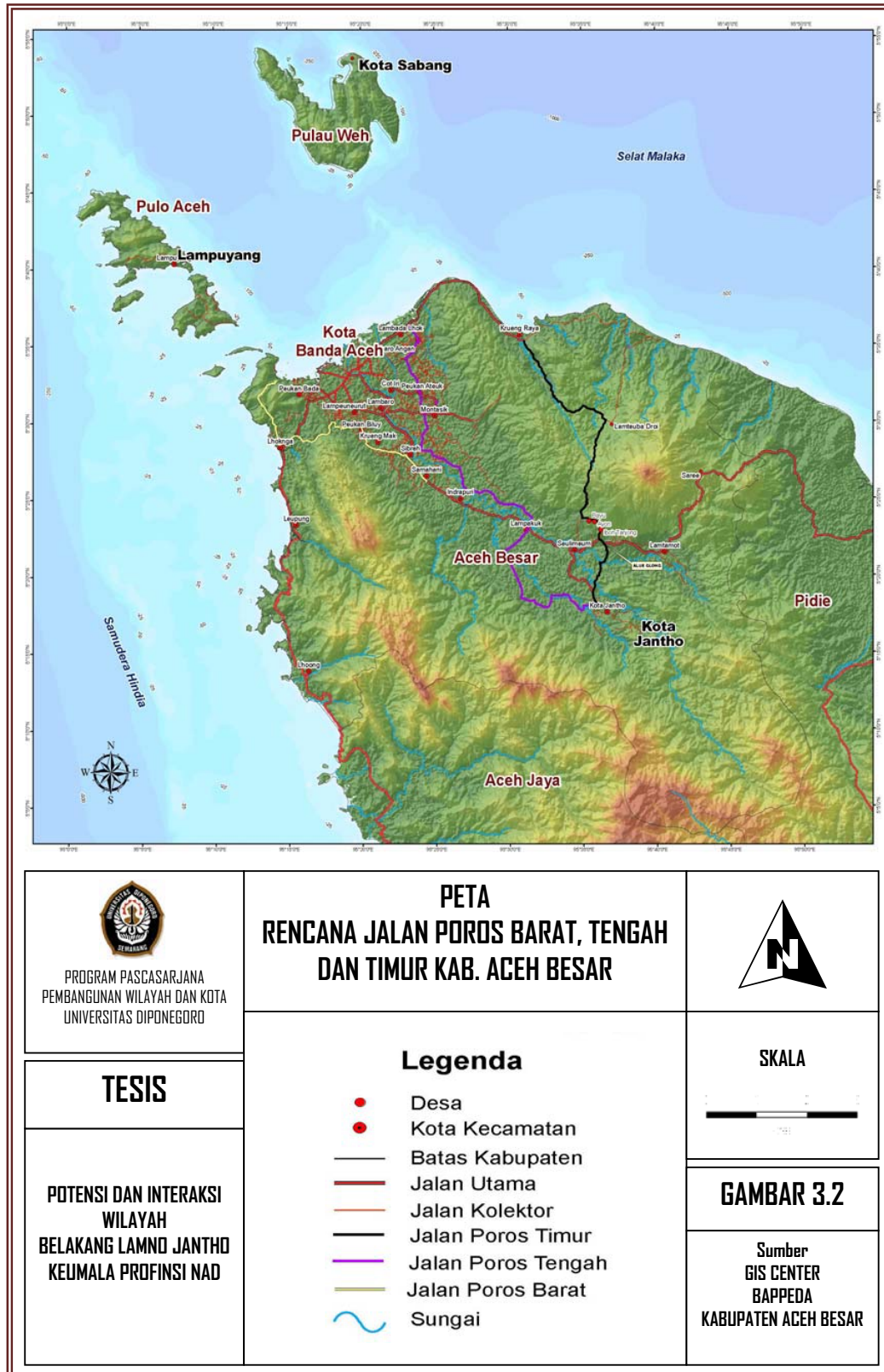
Panjang jalan yang ada di Kabupaten Aceh Besar adalah 169,80 km jalan negara, 152,82 km jalan provinsi dan 934,50 km jalan kabupaten. Dari Jalan Kabupaten yang ada Pemda Kabupaten Aceh Besar akan meningkatkan tiga ruas jalan menjadi poros utama yang akan memudahkan hubungan antara Kota Jantho dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar yang terdiri

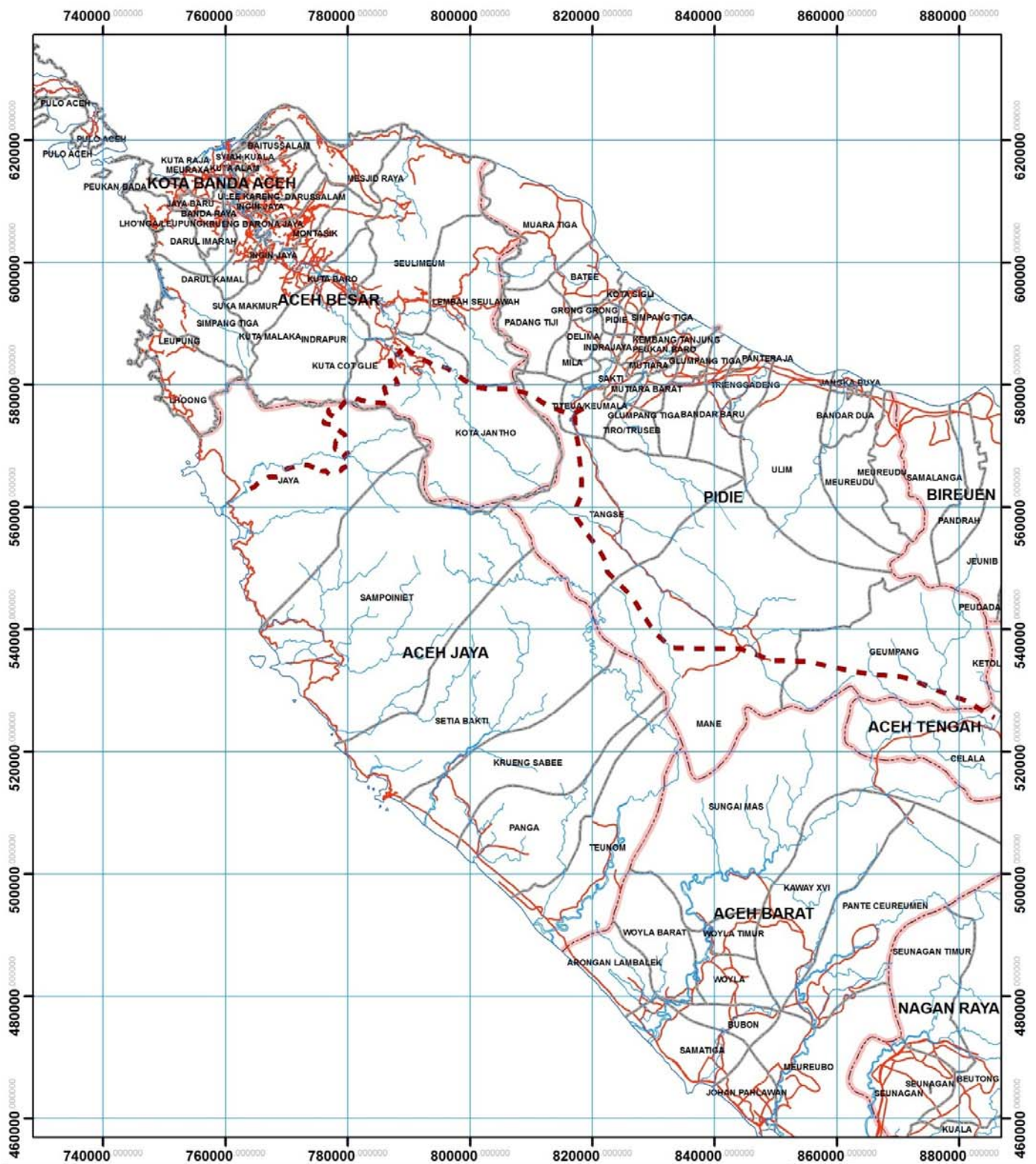
dari poros barat, poros tengah dan poros timur.



Jalan poros barat dimulai dari persimpangan Jalan Peukan Bada ke arah Kecamatan Lhoknga yang melintasi Jalan Banda Aceh - Meulaboh di Desa Keude Bieng yang menghubungkan Kecamatan Lhoknga, Darul Imarah, Darul Kamal, Simpang Tiga dan Suka Makmur yang kemudian bersambung kembali dengan Jalan Nasional Banda Aceh Medan di Pasar Sibreh. Jalan poros tengah dimulai dari persimpangan Jalan Banda Aceh Krueng Raya di Desa Lambada Lhok akan menghubungkan Kecamatan Baitussalam, Darussalam, Kuta Baro, Montasik, Indrapuri, Kuta Cot Glie dan Kota Jantho memotong jalan nasional di Desa Simpang Peut Lamsi Kecamatan Kuta Cot Glie. Adapun jalan poros barat dimulai dari Simpang Krueng Raya Kecamatan Mesjd Raya, menghubungkan Kecamatan Seulimum bersambung dengan jalan nasional yang menuju Kota Jantho.

Pembangunan jalan tersebut diharapkan memudahkan aksesibilitas kecamatan-kecamatan di wilayah timur dan barat ke Kota Jantho serta memudahkan transportasi hasil produksi pertanian baik yang akan dibawa ke Kota Jantho atau hasil pertanian dari wilayah belakang Kota Kantho ke pelabuhan laut Malahayati di Krueng Raya. Peningkatan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan wilayah melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi di kecamatan dan membuka aksesibilitas di wilayah belakang.

Disamping itu program, pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang melakukan peningkatan/pembangunan Jalan Jantho – Keumala dan Jantho – Lamno akan lebih membuka aksesibilitas Kota Jantho yang berimplikasi pada terjadinya interaksi dengan wilayah yang akan dihubungkan oleh jalan tersebut.





 Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang	Peta Jaringan Jalan Kab. Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya	 10,000 5,000 0 10,000 20,000 Meters						
Potensi dan interaksi Wilayah Belakang Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD	Legenda — Jl. Kolektor — Jl. Utama — Sungai - - - - - Jl. Jantho Pidie & Jantho Lamno	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Gambar</td> <td style="text-align: center;">Halaman</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">3.3</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">62</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Sumber BAPPEDA NAD</td> </tr> </table>	Gambar	Halaman	3.3	62	Sumber BAPPEDA NAD	
Gambar	Halaman							
3.3	62							
Sumber BAPPEDA NAD								

Ruas Jalan Jantho – Lamno melintasi gunung/bukit barisan dan daerah pertanian, dan menghubungkan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat kedua kabupaten tersebut khususnya dan masyarakat lintas timur – barat/selatan umumnya. Total panjang ruas jalan Jantho Lamno adalah 60 km dan panjang perkerasan 40 km. Pada KM 55 terdapat batuan masif sepanjang 800 m yang harus diledakkan untuk mencapai *trace* ideal (Annonymous, 2006).

Adapun ruas Jalan Jantho – Keumala merupakan bagian dari program peningkatan dan pembangunan jalan nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari lima ruas yaitu ruas Jantho – Keumala sepanjang 30 km, Keumala – Geumpang sepanjang 68,25 km, Geumpang – Pameu sepanjang 70,50 km, Pameu – Geunting Gerbang sepanjang 54,55 km dan ruan Geunting Gerbang – Takengon sepanjang 17,85 km. Ruas Jalan Jantho – Keumala melintasi wilayah Kecamatan Kota Jantho Aceh Besar, Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar, Kecamatan Mila Pidie, Kecamatan Sakti Pidie, Kecamatan Titeu Keumala Pidie dan Kota Keumala Pidie (Dirjen Bina Marga, 2008).

Di bidang transportasi laut terdapat satu pelabuhan laut yang berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu pelabuhan Malahayati di Kecamatan Mesjid Raya, pascagempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 kondisi pelabuhan tersebut mengalami kerusakan yang cukup serius, namun saat ini pelabuhan tersebut telah di renovasi dan akan dijadikan pelabuhan peti kemas.

Disamping pelabuhan laut, di Kabupaten Aceh Besar juga terdapat satu pelabuhan udara yaitu Bandara Sultan Iskandarmuda yang saat ini sedang

dilakukan pembangunannya menjadi sebuah kawasan yang dinamakan *Airport City* yang lengkap dengan zona pemukiman, komersial, pendidikan dan olahraga. Bandara Sultan Iskandarmuda akan menjadi bandara internasional dan merupakan Bandara Utama di Propinsi NAD.

Kabupaten Pidie yang terletak di jalan arteri primer yang menghubungkan Banda Aceh – Medan Sumatera Utara memiliki prasarana penghubung yang terdiri dari jalan negara 96 km, jalan propinsi 267,58 km dan jalan kabupaten 1.143,11 km.

Umumnya kota kecamatan di kabupaten ini terletak di sepanjang jalan arteri primer hanya beberapa kecamatan yang letaknya agak menjorok kedalam kearah utara dan selatan kabupaten. Salah satu kecamatan yang jauh dari jalan arteri primer adalah Kecamatan Keumala yang terletak 19 km ke arah selatan kota Beureunuen yang merupakan Ibukota Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah selatan ini merupakan wilayah pertanian yang subur.

Prasarana penghubung yang ada di Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari jalan negara 145,70 km, jalan propinsi 35,00 km, dan jalan kabupaten 307,20 km. Semua kota kecamatan dan kota kabupatennya berada di sisi jalan negara yang menghubungkan pantai barat selatan sampai ke Kabupaten Dairi Sumatera Utara.

3.5.2. Fasilitas Sosial dan Ekonomi

3.5.2.1 Fasilitas Sosial

Jumlah fasilitas sosial yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie dan Aceh Jaya masih beragam. Fasilitas peribadatan umumnya telah dimiliki semua

dan merata di seluruh desa, tetapi fasilitas pendidikan dan kesehatan belum merata di semua kecamatan, terutama pada pendidikan menengah atas dan tingkat akademi/universitas. Bahkan di beberapa kecamatan masih belum memiliki fasilitas untuk pendidikan anak usia dini.

TABEL III.8
JUMLAH FASILITAS SOSIAL DI KABUPATEN ACEH BESAR
PIDIE DAN ACEH JAYA TAHUN 2005

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas/Kabupaten (unit)		
		Aceh Besar	Pidie	Aceh jaya
1	TK	116	44	16
2	SD/MIN/MIS	243	443	117
3	SMP/MTsN/MTsS	71	95	28
4	SMA/MAN/MAS/SMK	47	42	8
5	Akademi/Universitas	5	3	1
6	Pesantren	57	253	47
7	Mesjid	143	249	110
8	Meunasah/mushalla	604	1300	208
9	Puskesmas/Pustu/poliklinik	81	109	27
10	Rumah sakit	2	3	0
11	Kantor pos	16	17	2

Sumber Kantor BPS NAD, 2005.

3.5.2.2 Fasilitas Perekonomian

Fasilitas perekonomian yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya masih beragam komposisinya, pada wilayah-wilayah yang lebih maju terdapat lebih banyak jenis dan jumlah fasilitas yang tersedia. Jadi ketersediaan fasilitas ekonomi dapat dijadikan indikator terhadap kemajuan dan pertumbuhan suatu daerah. Jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dapat dilihat seperti Tabel III.9.



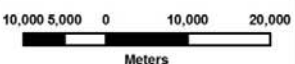








TABEL III.9
JUMLAH FASILITAS PEREKONOMIAN
DI KABUPATEN ACEH BESAR PIDIE DAN ACEH JAYA
TAHUN 2005

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas/Kabupaten (unit)		
		Aceh Besar	Pidie	Aceh jaya
1	koperasi	551	458	20
2	Industri Kecil	5798	14694	902
3	Kios	1792	2014	268
4	Kluster pertokoan	57	54	7
5	Pasar permanen/tdk permanen	65	110	18
6	Supermarket	7	9	0
7	Kantor layanan Komunikasi /wartel	62	84	2
8	Bank Umum/BPR	20	24	3
9	TPI	2	3	2
10	PPI	0	0	0
11	Dermaga	3	3	1
12	Pelabuhan laut	1	0	0
13	Bandara	1	0	0

Sumber: Kantor BPS NAD, 2005.

Dari Tabel III.9 di atas dapat dilihat bahwa kelengkapan fasilitas untuk kegiatan perekonomian ada di Kabupaten Aceh Besar lebih baik dari kabupaten lain. Ini tidak lain karena Kabupaten Aceh Besar dekat dengan Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota propinsi yang melayani kegiatan ekonomi seluruh kabupaten di wilayah NAD, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam rangka pembangunan ekonomi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan demikian, terdapat beberapa infrastruktur yang dibangun untuk aktivitas ekonomi tingkat nasional, bahkan internasional seperti Bandara Sultan Iskandarmuda dan Pelabuhan Malahayati.



 <p>Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>Peta Administrasi Kab. Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya</p>	 						
<p>Potensi dan interaksi Wilayah Belakang Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none">  Sungai  Jl. Kolektor  Jl. Utama  Jl. Jantho Pidie & Jantho Lamno  ACEH BESAR  ACEH JAYA  KOTA BANDA ACEH  PIDIE 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1196 1820 1360 1858">Gambar</td> <td data-bbox="1360 1820 1503 1858">Halaman</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1196 1858 1360 1927">3.4</td> <td data-bbox="1360 1858 1503 1927">67</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1196 1927 1503 1969">Sumber BAPPEDA NAD</td> </tr> </table>	Gambar	Halaman	3.4	67	Sumber BAPPEDA NAD	
Gambar	Halaman							
3.4	67							
Sumber BAPPEDA NAD								

BAB IV
POTENSI DAN INTERAKSI
WILAYAH LAMNO – JANTHO – KEUMALA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Potensi dan interaksi wilayah belakang Lamno-Jantho-Keumala dengan adanya pembangunan ruas jalan strategis nasional yang menghubungkan Kota Jantho, Keumala, sampai ke Takengon dan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Jantho dengan Lamno dilakukan dengan dengan tiga analisis, yaitu analisis *Scalogram Guttman*, *Location Quotient Analysis* dan analisis spasial.

Analisis dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama dilakukan identifikasi peran Kota Jantho dalam sistem kota melalui Analisis Hierarki Kota dan peranannya dalam sistem kota dengan menggunakan Analisis *Scalogram Guttman*. Tahap kedua dilakukan analisis terhadap potensi dan interaksi wilayah belakang dengan dibangunnya dua ruas jalan yang telah disebutkan di atas. Analisis ini dilakukan melalui identifikasi potensi wilayah dengan menggunakan *Location Quotient Analysis* dan kompilasi data sekunder mengenai potensi wilayah belakang, yaitu Lamno Jantho dan Keumala terhadap pusatnya Kota Banda Aceh. Pada tahap ini dilakukan juga analisis terhadap peluang interaksi yang akan terjadi dengan adanya pembangunan dua ruas jalan dimaksud yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan sebelumnya dan analisis spasial dan analisis deskriptif dari hasil wawancara untuk dapat mendeskripsikan peluang interaksi yang terjadi.

4.1 Analisis Sistem Kota

Suatu sistem perkotaan dapat menjadi mediator dalam membangkitkan pengembangan wilayah. Peran suatu kota yang merupakan elemen nodal dalam suatu sistem hubungan antara kota dan wilayah di sekelilingnya merupakan faktor penting yang perlu dianalisis. Interaksi wilayah perkotaan dengan daerah sekelilingnya di Negara Eropa memunculkan sebutan untuk kawasan luar kota yang agraris, seperti *Umland* untuk sebutan geografis di Jerman dan Skandinavia dan *Hinterland* di Inggris. Berdasarkan fungsi pengaruh kota terhadap pedalaman memunculkan sebutan *catchment area*, *space of influence* dan *urban field* serta *city region* (Daldjoeni, 1998: 77).

Untuk mengetahui bagaimana sistem dan peran kota yang ada dalam wilayah penelitian maka dilakukan analisis sistem kota-kota. Mengingat wilayah makro penelitian mencakup 3 kabupaten yaitu Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya maka pada tahap pertama dilakukan analisis untuk masing-masing kabupaten terhadap Kota Banda Aceh sebagai sentralnya, kemudian dilakukan juga analisis untuk wilayah belakang yang menjadi wilayah mikro penelitian yaitu Lamno, Jantho dan Keumala terhadap Kota Banda Aceh sebagai sentralnya.

Pusat aktivitas masyarakat di Aceh biasanya adalah kota-kota kecamatan yang merupakan subwilayah dari Kabupaten yang dijadikan obyek analisis. Kota Banda Aceh di dalam analisis ini dipandang sebagai suatu kota yang berada didalam sistem kota-kota secara fungsional sebagai suatu pusat aktivitas masyarakat dalam wilayah penelitian, bukan sebagai suatu kota dengan wilayah administrasinya.

Analisis sistem kota bertujuan untuk mengetahui derajat hierarki wilayah berdasarkan orde kota yang merupakan pusat pelayanan aktivitas masyarakat di wilayah penelitian. Pusat pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pelayanan sosial bagi daerah sekitarnya dan daerah *hinterlandnya*.

Penentuan hierarki pusat pelayanan dalam penelitian ini menggunakan analisis *Scalogram Guttman* dan sebagai responden diambil kecamatan-kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar sebanyak 22 Kecamatan, Pidie sebanyak 30 kecamatan, dan Aceh Jaya sebanyak 7 kecamatan.

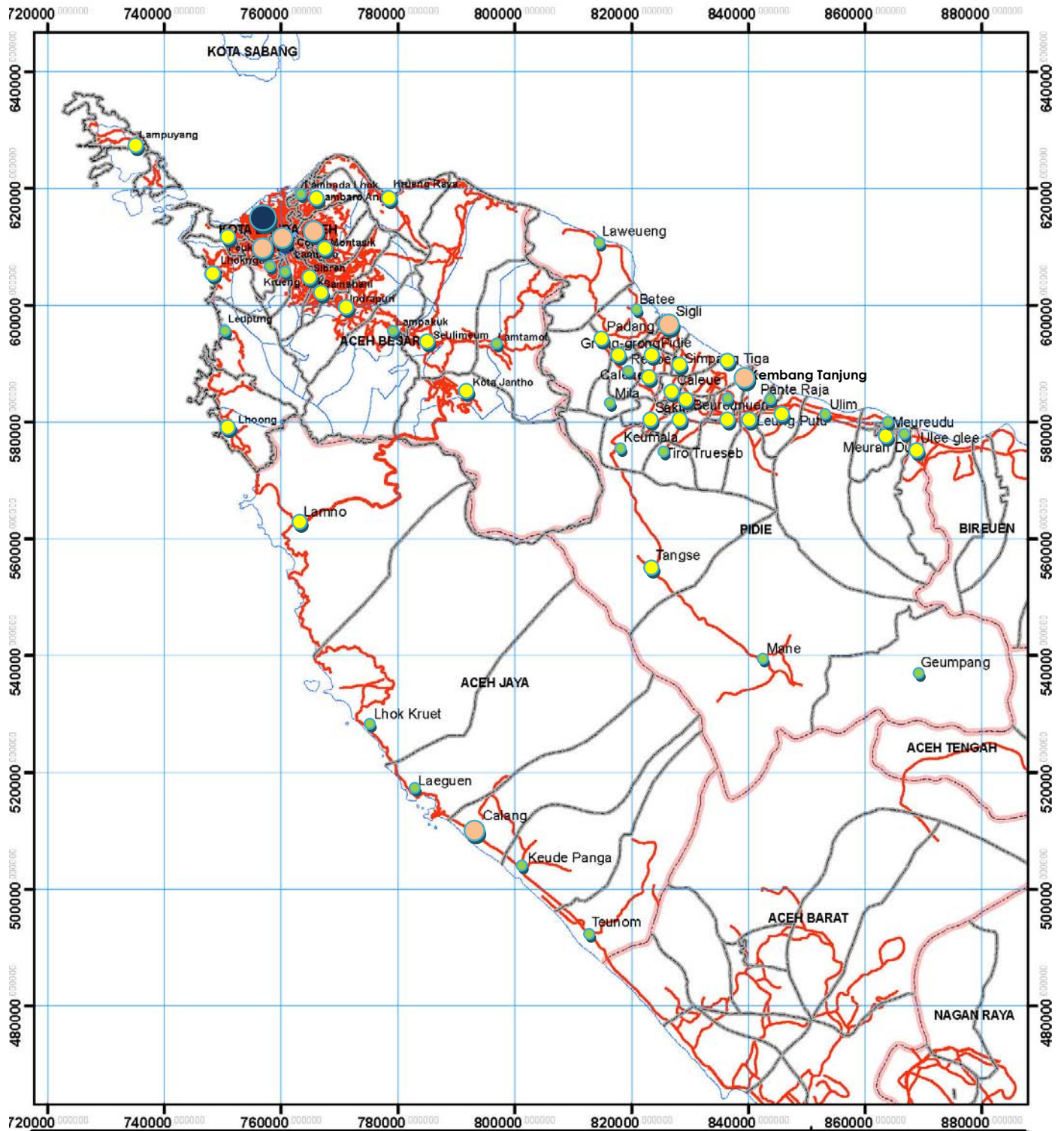
Perhitungan *Scalogram* untuk menentukan hierarki kota berdasarkan ordenya dapat dilihat pada Lampiran B. Berdasarkan perhitungan tersebut didapat bahwa kota Orde I pada setiap kabupaten yang dianalisis adalah Banda Aceh yang memiliki tingkat kelengkapan fasilitas paling tinggi dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kedudukan Kota Banda Aceh sebagai Daerah Otonom setingkat Kabupaten yang juga merupakan Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga fasilitas pelayanan kekotaan yang dimiliki adalah untuk melayani aktivitas masyarakat di tingkat provinsi. Adapun hierarki kota hasil analisis dengan menggunakan *Tools Scalogram Guttman* untuk masing-masing kabupaten wilayah penelitian adalah seperti terlihat pada Gambar 4.1 dan Tabel IV.1.

TABEL IV.1
HIERARKI KOTA-KOTA TAHUN 2006

No	Hierarki	Kabupaten		
		Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Pidie	Kabupaten Aceh Jaya
1	I	Banda Aceh	Banda Aceh	Banda Aceh
2	II	Peukan Ateuk, Lambaro dan Lampeuneurut	Kota Sigli, Kembang Tanjong	Calang
3	III	Lambaro Angan, Kota Jantho , Lhoong, Lhoknga, Indrapuri, Seulimeum, Sibreh, Krueng Raya, Montasik, Peukan Bada dan Pulo Aceh	Meureudu, Ule Glee, Lueng Putu, Glumpang Minyeuk, Tangse, Padang Tiji, Mesjid Yaman, Caleue, Trienggadeng, Simpang Tiga, Grong-Grong, Lampoh Saka, Peukan Pidie, Sakti, Beureunuen.	Lamno
4	IV	Cot Irie, Samahani, Lampakuek, Lamtamot, Peukan Biluy, Leupung, Lambada Lhok dan Krueng Mak.	Ulim, Keumala , Geumpang, Laweung, Meurah Dua, Reubee, Batee, Tiro, Mila, Mane, Jangka Buya, Pante Raja dan Geulumpang Payong.	Teunom, Lhok Kruet, Keude Panga, dan Lageuen

Sumber: Hasil Analisis 2008

Kabupaten Aceh Besar kota yang ada di Orde II meliputi Peukan Ateuk, Lambaro dan Lampeuneurut yang berskala tingkat pelayanan lokal. Adapun Kota yang berada di Orde III adalah Darussalam, Kota Jantho yang merupakan Ibukota Kabupaten Aceh Besar, Lhoong, Lhoknga, Indrapuri, Seulimeum, Sibreh, Krueng Raya, Montasik, Peukan Bada dan Pulo Aceh. Selebihnya, kota-kota kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar adalah berada pada Orde IV antara lain Krueng Barona Jaya, Kuta Malaka, Kuta Cot Glie, Lembah Seulawah, Darul Kamal, Leupung, Baitussalam dan Simpang Tiga.



 <p>Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>Peta Hirarki Kota Kab. Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya</p>						
	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hierarki I ● Hierarki II ● Hierarki III ● Hierarki IV 		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1193 1711 1323 1795"> <p>Gambar</p> </td> <td data-bbox="1323 1711 1485 1795"> <p>Halaman</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 1795 1323 1900"> <p>4.1</p> </td> <td data-bbox="1323 1795 1485 1900"> <p>72</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1193 1900 1485 1984"> <p>Sumber Hasil Analisis</p> </td> </tr> </table>	<p>Gambar</p>	<p>Halaman</p>	<p>4.1</p>	<p>72</p>
<p>Gambar</p>	<p>Halaman</p>						
<p>4.1</p>	<p>72</p>						
<p>Sumber Hasil Analisis</p>							

Potensi dan interaksi Wilayah Belakang Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD

Kedudukan Kota Lambaro, Peukan Ateuk dan Lampeuneurut di Orde II karena ketiga kota ini merupakan kota satelit dari Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Kota Banda Aceh dan menjadi wilayah pengaruh kota tersebut dimana kelengkapan fasilitasnya bisa memenuhi standar pelayanan kota besar. Ketiga kota ini merupakan perluasan wilayah Kota Banda Aceh secara fungsional sehingga banyak fasilitas untuk kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Banda Aceh dibangun di wilayah ini.

Bila dilihat dari kedudukannya, posisi Kota Lambaro lebih unggul dibandingkan kedua kota yang berada pada orde yang sama karena kota ini terletak di lokasi yang sangat strategis yaitu dipersimpangan jalan Banda Aceh – Medan dengan jalan lingkar yang menghubungkan Banda Aceh – Meulaboh dan Jalan Banda Aceh menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang.

Kota lain yang merupakan wilayah Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh adalah Kota Peukan Bada tetapi kota ini berada di orde III karena disamping kedudukannya tidak strategis, seperti Peukan Ateuk, Lambaro dan Lampeuneurut, kota ini mempunyai tingkat aksesibilitas yang lebih rendah. Disamping itu, juga disebabkan Kota Peukan Bada merupakan kota yang hancur terkena bencana gempa bumi gelombang tsunami.

Kedudukan Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar seharusnya berada di orde I diantara kota-kota lain di kabupaten Aceh Besar atau berada di Hierarki II dalam sistem kota-kota dengan Banda Aceh sebagai pusat aktivitas masyarakat secara fungsional. Namun, dari hasil analisis ternyata Kota

Jantho masih berada di orde III yang menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas-fasilitas masih kurang memadai terutama fasilitas ekonomi serta pendidikan tinggi. Tidak berkembangnya Kota Jantho juga disebabkan oleh letaknya yang kurang strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari aksesibilitasnya yang rendah terutama jaringan jalan yang menghubungkan Kota Jantho dengan kota-kota di sekitarnya. Kota ini hanya memiliki satu jalur akses utama dan merupakan *end point* karena jalur akses tersebut tidak menghubungkan Kota Jantho dengan wilayah lain. Disamping itu juga, jumlah sarana transportasi umum yang kurang memadai dan terbatas jumlahnya menyebabkan kurangnya aktivitas di Kota Jantho.

Di Kabupaten Pidie, kota-kota yang berada di orde II adalah Kota Sigli dan Kembang Tanjong dimana Kota Sigli merupakan Ibukota Kabupaten Pidie. Pada orde III meliputi kota-kota antara lain Meureudu, Ule Glee, Lueng Putu, Glumpang Minyeuk, Tangse, Padang Tiji, Mesjid Yaman, Caleue, Trienggadeng, Simpang Tiga, Grong-Grong, Lampoh Saka, Peukan Pidie Sakti, dan Beureunuen. Adapun yang ada di orde IV adalah Ulim, Keumala, Geumpang, Laweueng, Meurah Dua, Reubee, Batee, Tiro, Mila, Mane, Jangka Buya, Pante Raja dan Geulumpang Payong.

Kota Sigli telah memainkan peranannya sebagai ibukota kabupaten dan pusat pertumbuhan untuk kota-kota di wilayah Kabupaten Pidie. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan Kota Sigli di orde I untuk kota-kota di wilayah sekitarnya dan berada pada orde II jika Banda Aceh dimasukkan pusat aktivitas masyarakat secara fungsionalnya. Kondisi ini dapat terjadi karena kelengkapan fasilitas

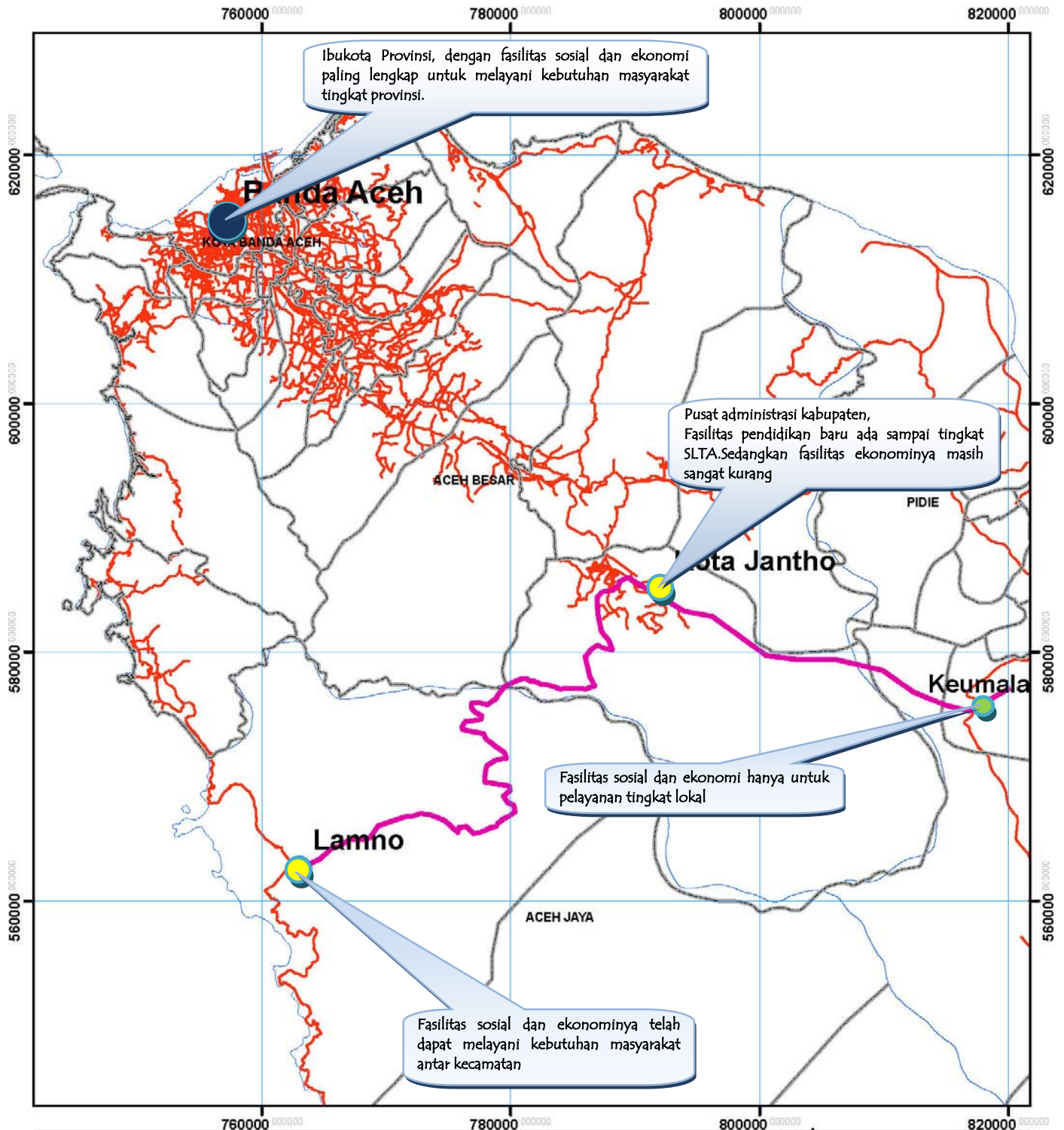
ekonomi dan sosialnya telah cukup memadai sebagai sebuah ibukota kabupaten dan pusat pertumbuhan diwilayahnya.

Adapun di Kabupaten Aceh Jaya, kota yang ber orde II hanya satu yaitu Calang yang merupakan Ibukota Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan kota yang ada di orde III hanya Kota Lamno. Selebihnya yaitu Teunom, Lhok Kruet, Keude Panga dan Lageuen berada di orde IV.

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat yang berada di wilayah pesisir barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara umum pertumbuhan wilayah barat-selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memang lebih lamban dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah timurnya. Hal ini disebabkan oleh aksesibilitas antarprovinsi yang lebih baik dan strategis baik dilihat dari aspek jarak yang lebih dekat maupun kondisi jalannya yang lebih baik. Oleh sebab itu, pertumbuhan Kota Lamno tidak sepesat kecamatan lain di wilayah timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

4.2 Analisis Peranan Kota Jantho, Lamno dan Keumala

Apabila dilihat hasil Analisis *Scalogram* yang dilakukan terhadap tiga wilayah belakang yang akan dihubungkan oleh dua ruas jalan yaitu ruas propivinsi Jantho – Lamno dan ruas Nasional Jantho – Keumala yang merupakan wilayah fokus dalam penelitian ini hierarki kotanya adalah sebagai berikut. Banda Aceh di orde I, Kota Jantho dan Lamno di orde III sedangkan Keumala berada di orde IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Tabel IV. 2.



 <p>Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>Peta Hirarki Wilayah Belakang Lamno, Jantho, Keumala</p>									
<p>Potensi dan interaksi Wilayah Belakang Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none">  Hierarki I  Hierarki III  Hierarki IV 	<table border="1"> <tr> <td>Gambar</td> <td>Halaman</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sumber</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hasil Analisis</td> </tr> </table>	Gambar	Halaman	4.2	76	Sumber		Hasil Analisis	
Gambar	Halaman									
4.2	76									
Sumber										
Hasil Analisis										

TABEL IV.2
HIERARKI KOTA BANDA ACEH, JANTHO
LAMNO DAN KEUMALA

No	Hierarki	Kota
	I	Banda Aceh
	II	-
	III	Kota Jantho dan Lamno
	IV	Keumala

Sumber: Hasil Analisis 2008

Kajian hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah fasilitas sarana dan prasarana fisik yang lebih terkonsentrasi pada kota yang aksesibilitasnya tinggi dan berada di sepanjang jalan arteri yang merupakan jalur transportasi antarprovinsi. Pembangunan lebih diprioritaskan pada wilayah yang strategis sebagai pusat pertumbuhan, baru kemudian diarahkan pada wilayah belakang yang kurang berkembang.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa tidak berkembangnya Kota Jantho bukan hanya disebabkan kurangnya fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi tetapi juga oleh letaknya yang kurang strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini menyebabkan Kota Jantho hanya menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan. Sedikit sekali kegiatan ekonomi yang beraktivitas di Kota Jantho.

Aksesibilitas yang cuma melalui satu jalur jalan nasional hanya mudah diakses oleh kecamatan-kecamatan wilayah tengah, sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah timur dan barat lebih mudah mengakses Banda Aceh. Dari wawancara dengan pejabat pemerintah daerah bidang perencanaan

bahwa di Kabupaten Aceh Besar akan dibuka tiga akses poros yang akan memudahkan hubungan antara Kota Jantho dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, akan memudahkan pelayanan aktivitas masyarakat baik untuk aktivitas ekonomi, sosial maupun pelayanan administrasi pemerintahan. Ketiga akses tersebut diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, sehingga arus barang dan orang akan menjadi lancar untuk berbagai kebutuhan. “Pemda telah memulai pembangunan dan peningkatan tiga jalan poros utama yaitu poros barat, poros tengah dan poros timur yang akan membuka aksesibilitas di kantong-kantong produksi masyarakat dan dan memudahkan pencapaian ke Kota Jantho.....”[PP-1/AB/4-2]

Kedudukan Kota Lamno berada di pesisir pantai dan dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil dan perbatasan Sumatera Utara (Kota Sidikalang). Perannya sebagai pusat pertumbuhan masih sebatas melayani aktivitas masyarakat antarkecamatan. Kota ini dapat dikatakan hancur terkena bencana Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami dan baru tiga tahun ini dipulihkan kembali. Dari analisis *scalogram* kedudukan Kota Lamno berada di orde III walaupun dalam keadaan baru pulih dari kehancuran. Kondisi ini dapat terjadi karena fasilitas yang ada di Kota Lamno telah dapat melayani kecamatan lain di sekitarnya seperti rumah sakit, dan pendidikan tingkat menengah juga fasilitas perbankan.

Kota Keumala berada di orde IV berdasarkan hasil analisis *scalogram* yang berarti jumlah fasilitas ekonomi dan sosialnya masih lebih sedikit dari kecamatan yang berada di sepanjang jalan Nasional. Fasilitas sosial dan ekonomi

yang ada di Keumala hanya untuk pelayanan intrakecamatan, Namun di kota tersebut juga terdapat institusi tingkat provinsi, yaitu Balai Benih Induk Padi (BBI Keumala) dan Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman. Balai Benih Induk tersebut melayani kebutuhan benih sumber padi untuk seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman hanya ada 2 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang satunya lagi berada di Kecamatan Pereulak Aceh Timur.

4.3 Analisis Potensi Wilayah Belakang

Potensi wilayah atau tingkat keunggulan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kemampuan suatu wilayah dalam sektor kegiatan tertentu. Analisis potensi wilayah dilakukan dengan menggunakan *tools Location Quotient Analysis*, yaitu dengan melihat sektor unggulan atau aktivitas ekonomi di wilayah penelitian. Dalam analisis ini digunakan variabel tenaga kerja atau angkatan kerja menurut sektor ekonomi (lapangan usaha) yang menjadi aktivitasnya.

Warpani (1980: 68) menyatakan bahwa pada dasarnya analisis *Location Quotient* menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama di daerah lain yang lebih luas. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan jumlah buruh, atau hasil produksi, atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria. Penetapan lapangan usaha yang dianalisis dilihat berdasarkan acuan yang dipakai pemerintah dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu 9 sektor usaha antara lain: sektor pertanian,

pertambangan dan galian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan/konstruksi, perdagangan hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor yang telah disebutkan di atas kemudian dianalisis untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie.

Disamping analisis secara parsial dengan data masing masing kabupaten sebagai data daerah acuannya, juga dilakukan analisis sektor basis dengan data acuan gabungan dari tiga kabupaten untuk mendapatkan perbandingan secara keseluruhan. Adapun untuk mengetahui komoditas basis dilakukan analisis terhadap komoditas pertanian strategis dan andalan dari masing masing kabupaten dengan data acuan total produksi tiga kabupaten dari setiap komoditas yang dianalisis. Komoditas yang dianalisis dibagi dalam 3 sub sektor yaitu Tanaman pangan dengan jenis komoditas antara lain padi, kedelai jagung, sayuran dan buah-buahan, perkebunan dengan jenis komoditas sawit, karet, kakao, kopi, pinang, kelapa, cengkeh, kemiri, lada dan nilam; dan subsektor peternakan dengan jenis komoditas kerbau, sapi/lembu dan kambing/domba.

Analisis *Location Quotient* menggunakan data angkatan kerja masing-masing kecamatan dari tiap kabupaten yang menjadi wilayah penelitian dengan data acuan total angkatan kerja dari kabupaten yang bersangkutan secara parsial. Dari hasil perhitungannya dapat diperoleh sektor sektor ekonomi unggulan (basis) seperti yang tercantum dalam Tabel IV.3, IV.4 dan IV.5. serta Gambar 4.3.

TABEL IV.3
SEKTOR BASIS TIAP KECAMATAN
DI KABUPATEN JAYA

No	Kecamatan	Sektor Basis
1	Teunom	Pertanian, Pertambangan dan Galian
2	Panga	Pertanian
3	Krueng Sabee	Listrik Gas dan Air Bersih, Perdagangan, Hotel dan restoran, Transportasi dan komunikasi Jasa – jasa, Keuangan Persewaan dan Jasa perusahaan, Industri pengolahan
4	Setia Bakti	Pertanian dan Industri/Pengolahan
5	Sampoi Niet	Pertanian, Industri/Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Keuangan Persewaan dan jasa perusahaan.
6	Jaya	Listrik Gas dan Air Bersih, Perdagangan, Hotel dan restoran, Transportasi dan komunikasi, Bangunan/Konstruksi, Keuangan Persewaan dan Jasa perusahaan, Industri pengolahan, dan Jasa-jasa

Sumber: Hasil Analisis

Keberadaan sektor basis di masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan bahwa kecamatan yang paling maju perekonomiannya adalah Kecamatan Krueng Sabee yang merupakan ibukota kabupaten dan Kecamatan Jaya yang tumbuh sebagai pusat Perdagangan dan merupakan kecamatan yang jaraknya terdekat dengan Kota Banda Aceh. Adapun kecamatan yang paling mundur perekonomiannya adalah Kecamatan Panga yang diikuti oleh Kecamatan Setia Bakti dan Teunom.

Ibukota Kecamatan Jaya, yaitu Lamno merupakan kota pengumpul komoditas pertanian dan kehutanan untuk perdagangan antardaerah, sehingga sektor swasta ikut berperan aktif dalam memperbaiki propertinya yang ada di Lamno disamping pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Pihak NGO dan BRR NAD-Nias.

Wawancara yang dilakukan dengan pelaku ekonomi di Kota Lamno menunjukkan bahwa sebelum bencana tsunami para pedagang pengumpul hasil bumi di Kota Lamno juga menerima komoditas dari kecamatan lain untuk dijual ke Banda Aceh ataupun ke Medan. Komoditas yang diperdagangkan berupa komoditas pertanian dan kehutanan, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, cengkeh, dan minyak nilam. ”...tapi sebelum Bencana tsunami saya juga sering menerima produk pertanian dari kecamatan Setia Bakti bahkan Lageuen..” [PE-1/KL/5-2]

TABEL IV.4
SEKTOR BASIS TIAP KECAMATAN
DI KABUPATEN ACEH BESAR

No	Kecamatan	Sektor Basis
1	L h o o n g	Pertanian
2	Lhoknga	Pertanian, Pertambangan dan galian, Industri Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan hotel dan restoran.
3	Leupung	Pertanian, Pertambangan dan galian, Industri Pengolahan.
4	Indrapuri	Pertanian, Pertambangan dan galian
5	Kuta Cot Glie	Pertanian, Pertambangan dan galian
6	Seulimeum	Pertanian, Bangunan/Konstruksi dan Perdagangan hotel dan restoran
7	Kota Jantho	Pertanian, Listrik dan airminum, Keuangan persewaan dan jasa Perusahaan, Jasa-jasa.
8	Lembah Seulawah	Pertanian, Industri Pengolahan
9	Mesjid Raya	Pertambangan dan galian, Industri Pengolahan, Perdagangan hotel dan restoran, dan Transportasi dan Komunikasi.
10	Darussalam	Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa-jasa.
11	Baitussalam	Pertanian, Industri Pengolahan.
12	Kuta Baro	Pertanian, Bangunan/Konstruksi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
13	Montasik	Pertanian, Bangunan/Konstruksi, dan Jasa-jasa.

Lanjut ke Halaman 83

Lanjutan Tabel.IV.4. Halaman 82.

No	Kecamatan	Sektor Basis
14	Ingin Jaya	Industri Pengolahan, Listrik dan airminum, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan hotel dan restoran, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
15	Krueng Barona Jaya	Industri Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan hotel dan restoran, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan
16	Suka MaKmur	Pertanian, Perdagangan hotel dan restoran, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan
17	Kuta Malaka	Pertanian, Perdagangan hotel dan restoran
18	Simpang Tiga	Pertanian
19	Darul Imarah	Pertambangan dan galian, Indusri Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan hotel dan restoran, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
20	Darul Kamal	Pertanian, dan Pertambangan dan Galian
21	Peukan Bada	Pertanian, dan Pertambangan dan Galian, Bangunan/Konstruksi, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
22	Pulo Aceh	Pertanian.

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Kabupaten Aceh Besar memiliki dua kecamatan yang mempunyai sektor basis terbanyak yaitu Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah yang masing-masing memiliki tujuh sektor basis, diikuti oleh Kecamatan Peukan Bada dengan enam sektor basis, kemudian Kecamatan Kuta Baro, Lhoknga dan Krueng Barona Jaya. Banyaknya sektor basis yang dimiliki oleh kecamatan-kecamatan tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat kemajuan perekonomian yang dicapai lebih tinggi dari kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Aceh Besar. Adapun kecamatan-kecamatan yang sektor basisnya paling sedikit adalah Lhoong,

Simpang Tiga dan Pulo Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kecamatan ini mempunyai tingkat perekonomian paling mundur di Kabupaten Aceh Besar.

Kecamatan Kota Jantho memiliki empat sektor basis yang berarti tingkat perekonomiannya masih lebih rendah dari lima kecamatan yang telah disebutkan terdahulu. Ini terjadi karena sektor perdagangan dan industri tidak berkembang di Jantho. Tidak berkembangnya sektor tersebut lebih disebabkan oleh aksesibilitas yang kurang memadai karena kedua sektor ini sangat dipengaruhi oleh arus transportasi dan distribusi barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku ekonomi yang ada di Jantho bahwa keberadaan sebagai pusat pertumbuhan belum kelihatan karena aktivitas ekonomi dan sosialnya masih relatif kecil untuk ukuran sebuah kota kabupaten yang melayani wilayah sekitarnya. “Kota ini sepi dari aktivitas ekonomi tidak kelihatan sebagai kota Kabupaten hanya kegiatan pemerintahan saja yang terlihat dominan disini...”[PE-1/KJ/1-1]

TABEL IV.5
SEKTOR BASIS TIAP KECAMATAN
DI KABUPATEN PIDIE

No	Kecamatan	Sektor Basis
1	Geumpang	Pertanian.
2	Mane	Pertanian, dan Bangunan/Konstruksi.
3	Meureudu	Pertanian, dan Perdagangan hotel dan restoran, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan
4	Meurah Dua	Pertanian
5	Bandar Dua	Pertanian, Listrik, gas dan air bersih.
6	Jangka Buya	Pertanian, dan Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan.
7	Ulim	Pertanian
8	Trienggadeng	Pertanian, Pertambangan dan Galian, dan Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan.
9	Panteraja	Pertanian

Lanjut ke Halaman 85

Lanjutan Tabel IV.5. Halaman 84

No	Kecamatan	Sektor Basis
10	Bandar Baru	Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa-jasa
11	Glumpang Tiga	Pertanian, Pertambangan dan Galian, Listrik, gas dan air bersih, Perumahan/Konstruksi.
12	Glumpang Baro	Pertanian
13	Mutiara	Pertambangan dan Galian, Industri Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan Hotel dan Restoran, dan Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan.
14	Mutiara Timur	Pertanian, Industri Pengolahan dan Bangunan/Konstruksi.
15	Tiro Truseb	Pertanian
16	Tangse	Pertanian
17	Titeua Keumala	Pertanian
18	Sakti	Pertanian, Bangunan/Konstruksi dan Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan
19	Mila	Pertanian, Pertambangan dan Galian dan Keuangan persewaan dan jasa Perusahaan
20	Padang Tiji	Pertanian, Pertambangan dan Galian, Perdagangan Hotel dan Restoran, Transportasi dan komunikasi dan Keuangan persewaan dan jasa Perusahaan
21	Delima	Pertanian, Industri Pengolahan dan Bangunan/Konstruksi.
22	Grong Grong	Pertanian, Pertambangan dan Galian, Listrik, gas dan air bersih
23	Indrajaya	Pertanian, Listrik, gas dan air bersih, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa
24	Peukan Baro	Pertambangan dan Galian, Industri Pengolahan, Perdagangan Hotel dan Restoran, Transportasi dan komunikasi.
25	Kembang Tanjung	Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan Hotel dan Restoran.
26	Simpang Tiga	Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Hotel dan Restoran
27	Kota Sigli	Industri Pengolahan, Listrik, gas dan air bersih, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan Hotel dan Restoran, Transportasi dan komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
28	Pidie	Industri Pengolahan, Listrik, gas dan air bersih, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan Hotel dan Restoran, Transportasi dan komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
29	Batee	Pertanian.
30	Muara Tiga	Pertanian, dan industri Pengolahan.

Sumber: Hasil Analisis, 2008

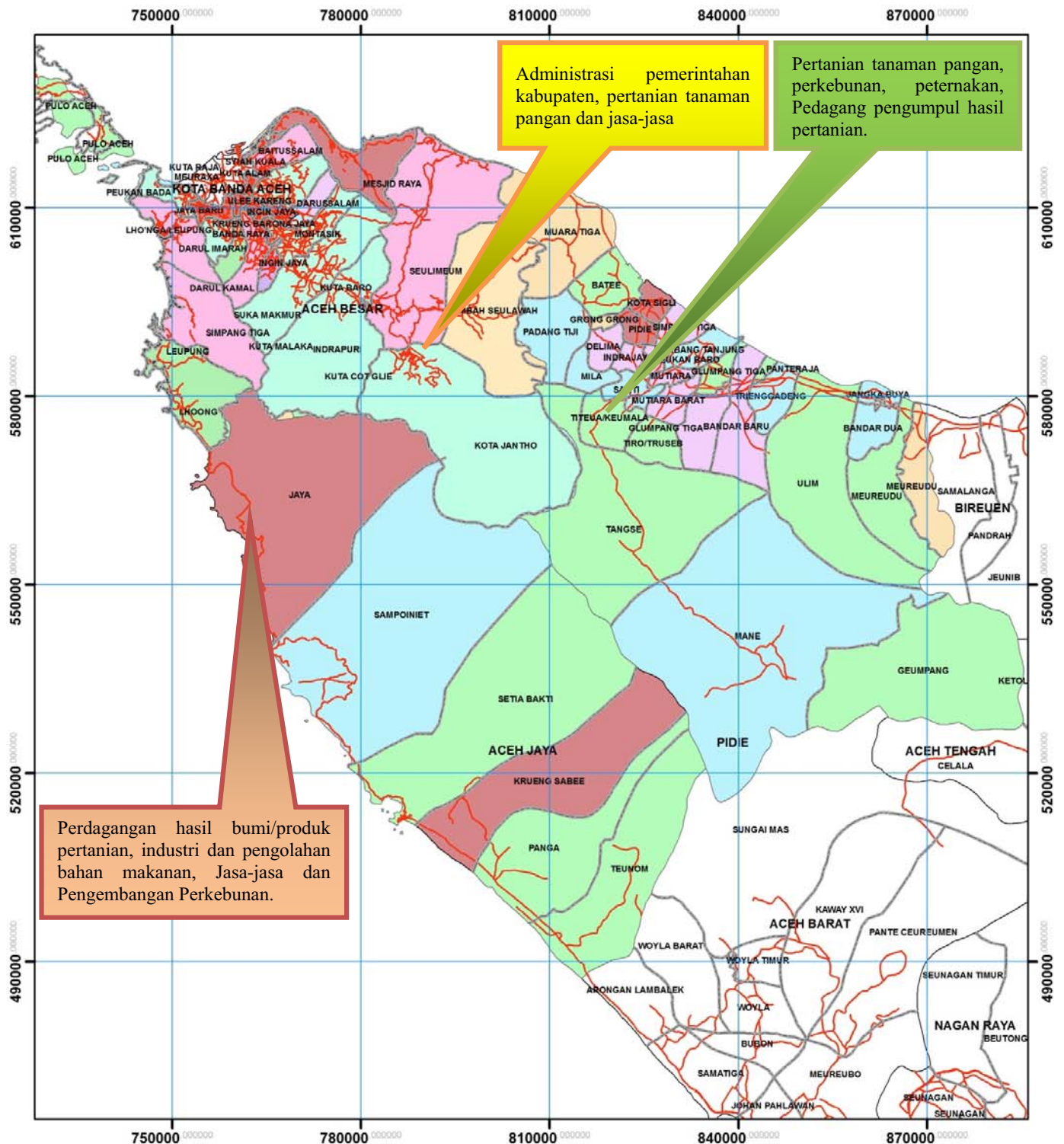
Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Pidie yang memiliki sektor basis paling banyak adalah Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Pidie dan Kecamatan Mutiara yang berarti bahwa ketiga kecamatan ini merupakan kecamatan yang paling maju tingkat perekonomiannya. Kecamatan Kota Sigli merupakan Ibukota Kabupaten Pidie. Kecamatan Pidie merupakan wilayah pengaruh dari Kota Sigli yang letak kotanya berdekatan, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Adapun Ibukota Kecamatan Mutiara adalah Kota Beureunuen yang merupakan kota transit untuk berbagai komoditas pertanian dari beberapa kecamatan di sekitarnya karena kedudukannya yang strategis di persimpangan jalur akses ke beberapa kecamatan yang berada di wilayah selatan Kabupaten Pidie. Kecamatan-kecamatan yang tingkat perekonomiannya paling mundur adalah Kecamatan Geumpang, Meurah Dua, Glumpang Baro, Tiro Truseb, Tangse, Titeu Keumala dan Batee.

Secara ekonomi Keumala masih berupa kota yang melayani aktivitas masyarakat di wilayah keamatannya. Dari hasil wawancara dengan pelaku ekonomi di Keumala, produksi pertanian khususnya tanaman perkebunan yang ada di Keumala tidak mencukupi omset penjualan mereka, sehingga para pedagang antardaerah tersebut mengumpulkan sendiri ke kecamatan lain, seperti Tangse dan Geumpang. ”..saya juga keliling mengumpulkan barang dari masyarakat sampai ke Kecamatan Mane, Tangse dan Geumpang karena hasil produksi di wilayah Keumala sedikit, harus menunggu lama untuk memenuhi kuota pengangkutan..” [PE-1/KK/2-1]

Umumnya pedagang yang ada di Kecamatan Keumala membawa dagangannya ke Pasar Beureunuen yang berlokasi di sisi Jalan Banda Aceh Medan yang merupakan pasar transit, dimana pedagang besar antardaerah mengumpulkan komoditas yang akan jual ke daerah lain, seperti Kota Sigli, Banda Aceh dan sebagian ke Medan Sumatera Utara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor basis yang paling dominan adalah pertanian, terutama pada kecamatan-kecamatan yang aksesibilitasnya kurang memadai dan jauh dari pusat pertumbuhan. Dilihat dari perbandingan sektor basis yang ada di ketiga kabupaten yang menjadi wilayah makro penelitian bahwa fenomena pertumbuhan wilayah hampir sama, wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan atau yang dilalui oleh jalur akses strategis nasional (jalur antarprovinsi) lebih maju dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang berada agak ke belakang. Ini membuktikan bahwa aksesibilitas dan dekatnya dengan pusat pertumbuhan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah.

Jika sektor basis ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelas yaitu primer, sekunder dan tersier berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), maka yang menjadi sektor primer (ekstraksi langsung dari alam) adalah Pertanian, Pertambangan dan galian; sektor sekunder (pengolahan bahan baku) adalah Industri Pengolahan; dan Listrik, Gas dan Air Bersih, sedangkan sektor tersier (produksi/pemanfaatan barang jadi) adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran; Transportasi dan Komunikasi; Bangunan/Konstruksi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa. Klasifikasi sektor basis di setiap kabupaten yang menjadi wilayah penelitian adalah sebagai berikut:



Administrasi pemerintahan kabupaten, pertanian tanaman pangan dan jasa-jasa

Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, Pedagang pengumpul hasil pertanian.

Perdagangan hasil bumi/produk pertanian, industri dan pengolahan bahan makanan, Jasa-jasa dan Pengembangan Perkebunan.

Peta Sektor Basis
Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya

- Sektor Basis**
- primer
 - primer,sekunder
 - primer,sekunder,tersier
 - primer,tersier
 - sekunder,tesier




Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Progam Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro
Semarang

Potensi dan interaksi Wilayah Belakang
Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD

Gambar
4.3

Halaman
88

Sumber
Hasil Analisis

No	Sektor	Kabupaten		
		Teunom	Lhoknga	Padang Tiji
1	Pertanian (Primer)	Teunom, Panga, Setia Bakti, Sampoi Niet.	Lhoong, Lhoknga, Leupung, Indrapuri, Kuta Cot Glie, Seulimum, Kota Jantho, Lembah Seulawah, Darussalam, Baitussalam, Kuta Baro, Montasiek, SukamaKmur, Kuta Malaka, Simpang Tiga, Darul Kamal, Peukan Bada, Pulo Aceh.	Geumpang, Mane, Meureudu, Meurah Dua, Bandar Dua, Jangka Buya, Ulim, Trienggadeng, Pante raja, Bandar Baru, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Mutiara Timur, Tiro Truseb, Tangse, Titeu Keumala, Sakti, Mila, Padang Tiji, Delima, Grong-grong, Indrajaya Keumbang Tanjong, Simpang Tiga, Batee, Muara Tiga.
2	Pertambangan dan Galian (Primer)	Teunom	Lhoknga, Leupung, Indrapuri, Kuta Cot Glie, Mesjid Raya, Darul Imarah, Darul Kamal, Peukan Bada, Pulo Aceh.	Trienggadeng, Glumpang Tiga, Mutiara, Mila, Padang Tiji, Grong-grong, Peukan Baro.
3	Industri Pengolahan (sekunder)	Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet. Jaya	Lhoknga, Leupung, Lembah Seulawah, Mesjid Raya, Darussalam, Baitussalam, Ingin Jaya, Kr. Barona Jaya, Darul Imarah.	Bandar baru, Mutiara, Mutiara timur, Delima, Peukan Baro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga Kota Sigli, Pidie, Muara Tiga.
4	Listrik Gas dan Air Bersih (sekunder)	Krueng Sabee, Jaya	Kota Jantho, Ingin Jaya.	Bandar Dua, Glumpang tiga, Indra Jaya, Kota Sigli, Pidie.
5	Bangunan/Konstruksi (Tersier)	Sampoi Niet, Jaya	Lhoknga, Seulimum, Kuta Baro, Montasik, Ingin Jaya, Kr. Barona Jaya, Darul Imarah, Peukan Bada	Mane, Glumpang Tiga, Mutiara, Sakti, Delima, Kotasigli, Pidie.
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran (Tersier)	Krueng Sabee, Jaya	Lhoknga, Seulimum, Mesjid Raya, Kr.Barona Jaya, Suka MaKmur, Kuta Malaka, Darul Imarah.	Meureudu, Mutiara, Padang Tiji, Peukan Baro, Keumbang Tanjong, Simpang Tiga Kota Sigli, Pidie.

Lanjut ke Halaman 91

Lanjutan Tabel IV.6. Halaman 90

No	Sektor Basis	Kabupaten		
		Aceh Jaya	Aceh Besar	Pidie
7	Angkutan dan Komunikasi (Tersier)	Krueng Sabee, Jaya	Mesjid Raya, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, Darul Imarah, Peukan Bada.	Padang Tiji, Kota Sigli, Pidie.
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan (Tersier)	Krueng Sabee, Sampoi Niet, Jaya	Kota Jantho, Kuta Baro, Ingin Jaya, Kr. Barona Jaya, Suka MaKmur, Daur Imarah, Peukan Bada.	Meureudu, Jangka Buya, Trienggadeng, Mutiara, Sakti, Mila, Padang Tiji, Indrajaya, Kota Sigli, Pidie.
9	Jasa-jasa (Tersier)	Krueng Sabee, Jaya	Kota Jantho, Darussalam, Kuta Baro, Montasik, Ingin Jaya, Darul Imarah, Peukan Bada.	Kota Sigli, Pidie.

Sumber: Hasil Analisis 2008

Tabel IV.6 dan Gambar IV.3 menunjukkan bahwa sektor basis yang paling dominan dan hampir ada di seluruh kecamatan di tiga kabupaten yang dianalisis adalah pertanian diikuti oleh sektor industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, keuangan dan persewaan, transportasi dan konstruksi serta sektor listrik gas dan air bersih. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam membentuk perekonomian di tiga kabupaten tersebut. Adapun sektor lain umumnya masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan dalam kecamatan atau kabupaten.

Bila dilihat secara keseluruhan dengan melakukan analisis sektor basis terhadap sektor ekonomi dengan menggunakan data acuan gabungan dari tiga kabupaten maka akan terlihat perbedaan dari sektor basis yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Hal itu dikarenakan data wilayah acuannya lebih besar dan komposisinya lebih beragam seperti terlihat pada Gambar 4.4.

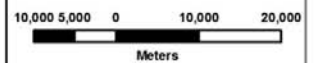


Peta Sektor Basis Dengan Acuan Data 3 Kabupaten Kab. Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya

Legenda

----- jalan_jantho_pidie dan Jantho_Lamno

- primer
- primer,sekunder
- primer,sekunder,tersier
- primer,tersier
- sekunder,tesier
- tersier



Gambar

4.4

Halaman

91

Sumber

BAPPEDA NAD (dianalisis)


Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Progam Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro
Semarang

Potensi dan interaksi Wilayah Belakang
Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD

Disamping sektor ekonomi basis, untuk lebih potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan dilakukan pula analisis terhadap komoditas basis yang ada di kecamatan-kecamatan sekitar Kota Jantho, Lamno dan Keumala seperti terlihat pada Tabel IV.7.

TABEL IV.7
KOMODITAS BASIS SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
PER KECAMATAN DISEKITAR
KOTA JANTHO, LAMNO DAN KEUMALA

No	Kota	Kecamatan	Komoditas Basis
1	Jantho	Indrapuri	Padi
		Seulimeum	Padi
		Kota Jantho	Kedelai, Jagung, Sayuran dan Buah-buahan
		Lembah Seulawah	Kedelai, Jagung, dan sayuran
		Kuta Cot Glie	sayuran
2	Lamno	Setia Bakti	-
		Sampoiniet	-
		Jaya	-
3	Keumala	Geumpang	Buah-buahan
		Mane	Padi, Jagung, Kedelai
		Tangse	Buah-buahan
		Titeu Keumala	Padi dan Buah-buahan

Sumber: Hasil Analisis 2008

Pada sub sektor tanaman pangan komoditas basis terbanyak ada di kecamatan sekitar Kota Jantho. Dari lima komoditas tanaman pangan yang dianalisis semua komoditas merupakan sektor basis tetapi menyebar pada setiap kecamatan yang ada di sekitar Kota Jantho, sedangkan yang tidak ada sama sekali komoditas basisnya di sub sektor ini adalah Kecamatan-kecamatan di sekitar Kota Lamno.

Pada subsektor perkebunan hasil analisis komoditas basisnya dapat dilihat pada Tabel IV.8 di bawah ini.

TABEL IV.8
KOMODITAS BASIS SUBSEKTOR PERKEBUNAN
PERKECAMATAN DI SEKITAR
KOTA JANTHO, LAMNO DAN KEUMALA

No	Kota	Kecamatan	Komoditas Basis
1	Jantho	Indrapuri	Pinang, Kelapa, Cengkeh, Kemiri dan Lada
		Sedulimeum	Pinang, Kelapa, Kemiri dan Lada
		Kota Jantho	Kopi, Pinang, Kelapa dan Kemiri
		Lembah Seulawah	Kopi, Kelapa, Cengkeh, Kemiri dan Lada
		Kuta Cot Glie	Pinang, Kelapa, Cengkeh dan Lada
2	Lamno	Setia Bakti	Sawit, Karet
		Sampoiniet	Sawit, Karet dan Nilam
		Jaya	Sawit, Kelapa dan Nilam
3	Keumala	Geumpang	Kakao, dan Kopi
		Mane	Kopi
		Tangse	Kakao, Kopi, Pinang, dan Lada
		Titeu Keumala	Kakao, Pinang, dan Lada

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Pada subsektor perkebunan komoditas basisnya dapat dilihat menyebar disemua kecamatan kecuali komoditas tanaman industri seperti sawit, karet dan nilam basisnya hanya ada di kecamatan-kecamatan sekitar kota lamno. Sedangkan komoditas basis pada subsektor peternakan seperti terlihat pada tabel IV.9.

TABEL IV.9
KOMODITAS BASIS SUBSEKTOR PETERNAKAN
PERKECAMATAN DI SEKITAR
KOTA JANTHO, LAMNO DAN KEUMALA

No	Kota	Kecamatan	Komoditas Basis
1	Jantho	Indrapuri	Domba/Kambing
		Seulimeum	Sapi/Lembu
		Kota Jantho	Kerbau dan Domba/Kambing
		Lembah Seulawah	Sapi/Lembu
		Kuta Cot Glie	Sapi/Lembu
2	Lamno	Setia Bakti	Domba/Kambing
		Sampoiniet	Kerbau dan Domba/Kambing
		Jaya	Sapi/Lembu
3	Keumala	Geumpang	Kerbau
		Mane	Kerbau
		Tangse	Kerbau dan Domba/Kambing
		Titeu Keumala	Domba/Kambing

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Hasil analisis pada subsektor peternakan terlihat bahwa semua komoditas basis tersebar di kecamatan-kecamatan di sekitar Kota Jantho, Lamno dan Keumala. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut dapat saling menutupi kebutuhan terhadap hasil pertanian dengan saling bersubstitusi, dimana yang lebih menutupi yang kurang.

4.4. Analisis Eksisting Interaksi Wilayah Belakang

Pola interaksi Kota Jantho, Lamno dan Keumala yang terjadi saat ini (eksisting) dianalisis secara deskriptif dengan melihat potensi dan tipologi ekonomi masing-masing wilayah kabupaten serta rangkuman hasil wawancara

yang dilakukan dengan para pelaku ekonomi di ketiga kota tersebut. Lebih lanjut akan dideskripsikan juga keterkaitan ketiga kecamatan tersebut dengan Kota Banda Aceh sebagai pusat aktivitas ekonomi secara fungsional, sehingga dapat digambarkan interaksi antarkecamatan serta kecamatan dengan wilayah pusat aktivitasnya (Gambar 4.6). Pada analisis ini dideskripsikan juga aspek keruangan untuk mengetahui peranan pusat-pusat pertumbuhan dan keterkaitan antarmasing-masing kecamatan dengan melihat hierarki kota, sektor basis dan komoditas basis serta arus distribusi barang dan orang serta wilayah pengaruhnya.

Pada Tabel IV. 10 terlihat Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Jaya lebih unggul, baik dilihat dari banyaknya sektor basis yang ada di kedua kecamatan tersebut maupun hierarki kotanya jika dibandingkan dengan empat kecamatan lain di Kabupaten Aceh Jaya. Ini menunjukkan bahwa jika Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Jaya merupakan pusat pertumbuhan bagi kecamatan sekitarnya di Kabupaten Aceh Jaya.

TABEL IV.10
KONDISI PEREKONOMIAN DAN HIERARKI KOTA
DI KABUPATEN ACEH JAYA

No	Kecamatan	Kota	Hierarki	Sektor Basis
1	Krueng Sabee	Calang	II	Perdagangan, Hotel dan restoran, Transportasi dan komunikasi Jasa – jasa, Keuangan Persewaan dan Jasa perusahaan, Industri pengolahan
2	Jaya	Lamno	III	Perdagangan, Hotel dan restoran, Transportasi dan komunikasi, Bangunan/Konstruksi, Keuangan Persewaan dan Jasa perusahaan, Industri pengolahan, dan Jasa-jasa
3	Teunom	Teunom	IV	Pertanian, Pertambangan dan Galian
4	Sampoiniet	Lhok Kruet	IV	Pertanian, Industri/Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Keuangan Persewaan dan jasa perusahaan.
5	Panga	Keude Panga	IV	Pertanian
6	Setia Bakti	Lageuen	IV	Pertanian dan Industri/Pengolahan

Sumber: Hasil Analisis 2008

Bila dikaitkan dengan peningkatan jalan yang menghubungkannya dengan Kota Jantho, Kota Lamno yang merupakan Ibukota Kecamatan Jaya dan salah satu pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Jaya tentu akan membuka peluang interaksi bagi aktivitas ekonomi di antara kedua kecamatan tersebut baik peluang pasar baru ataupun peningkatan aksesibilitas ke pasar yang lebih besar.

Begitu juga bila dikaitkan dengan komoditas basis yang ada di Kecamatan Aceh Jaya bahwa peluang interaksi antara dua wilayah dapat terjadi melalui substitusi komoditas dari kedua pusat pertumbuhan. Misalnya di subsektor tanaman pangan dan subsektor perkebunan.

Hasil wawancara dengan pelaku ekonomi di Lamno menyatakan bahwa aktivitas perdagangan antardaerah dan antarprovinsi masih dilakukan via Banda Aceh. Dengan kata lain, aktivitas Kota Lamno hanya sampai pada perdagangan regional antardaerah yaitu Banda Aceh.”..kalau karet saya jual ke Medan tapi masih via Banda Aceh karena jumlah barang saya harus digabung dengan pedagang lain supaya ongkos truk bisa murah..”[PE-1/KL/4-2]. ”..selama ini jasa angkutan di Lamno masih bersifat lokal, aktivitasnya hanya melangsir barang dari Lamno ke Banda Aceh yang kemudian diangkut ke Medan dengan armada yang lebih besar”[PE-4/KL/7-1].

Begitu juga dengan barang kebutuhan masyarakat seperti obat-obatan pertanian menjadi lebih mahal karena harus membayar ongkos bongkar muat dan biaya angkut tambahan dari Banda Aceh ke Lamno. Dari hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa interaksi Kota Lamno dengan wilayah lain dalam aktivitas ekonominya hanya ke Banda Aceh dan wilayah sekitarnya karena aksesibilitas ke wilayah lain belum tersedia kecuali via Banda Aceh.

TABEL IV.11
KONDISI PEREKONOMIAN DAN HIERARKI KOTA
DI KABUPATEN ACEH BESAR

No	Kecamatan	Kota	Hierarki	Sektor Basis
1	Lhoong	L h o o n g	III	Pertanian
2	Lhoknga	Lhoknga	III	Pertanian, Pertambangan dan galian, Industri Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan hotel dan restoran.
3	Leupung	Leupung	IV	Pertanian, Pertambangan dan galian, Industri Pengolahan.
4	Indrapuri	Indrapuri	III	Pertanian, Pertambangan dan galian
5	Kuta Cot Glie	Lampakuk	IV	Pertanian, Pertambangan dan galian
6	Seulimeum	Seulimeum	III	Pertanian, Bangunan/Konstruksi dan Perdagangan hotel dan restoran
7	Kota Jantho	Kota Jantho	III	Pertanian, Listrik, gas dan air bersih, Keuangan persewaan dan jasa Perusahaan, Jasa-jasa.
8	Lembah Seulawah	Lamtamot	IV	Pertanian, Industri Pengolahan
9	Mesjid Raya	Krueng Raya	III	Pertambangan dan galian, Industri Pengolahan, Perdagangan hotel dan restoran, dan Transportasi dan Komunikasi.
10	Darussalam	Lambaro Angan	III	Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa-jasa.
11	Baitussalam	Lambada Lhok	IV	Pertanian, Industri Pengolahan.
12	Kuta Baro	Peukan ateuk	II	Pertanian, Bangunan/Konstruksi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
13	Montasik	Montasik	III	Pertanian, Bangunan/Konstruksi, dan Jasa-jasa.
14	Ingin Jaya	Lambaro	II	Industri Pengolahan, Listrik dan airminum, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan hotel dan restoran, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
15	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	IV	Industri Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan hotel dan restoran, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan

Lanjut ke halaman 98

Lanjutan Tabel IV.11 halaman 97

No	Kecamatan	Kota	Hierarki	Sektor Basis
16	Suka MaKmur	Sibreh	III	Pertanian, Perdagangan hotel dan restoran, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan
17	Kuta Malaka	Samahani	IV	Pertanian, Perdagangan hotel dan restoran
18	Simpang Tiga	Krueng Mak	IV	Pertanian
19	Darul Imarah	Lampeneurut	II	Pertambangan dan galian, Industri Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan hotel dan restoran, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
20	Darul Kamal	Peukan Bilui	IV	Pertanian, dan Pertambangan dan Galian
21	Peukan Bada	Peukan Bada	III	Pertanian, dan Pertambangan dan Galian, Bangunan/Konstruksi, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
22	Pulo Aceh	Lampuyang	III	Pertanian.

Sumber: Hasil Analisis 2008

Pada Tabel IV.11 ditunjukkan bahwa pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar bukanlah Kota Jantho yang notabene merupakan Ibukota Kabupaten, tetapi Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Peukan Ateuk Kecamatan Kuta Baro dan Lampeunerut Kecamatan Darul Imarah. Ketiga kota tersebut berada di orde II dan mempunyai sektor basis yang paling banyak dan aktivitasnya tidak lagi di sektor primer tetapi di sektor sekunder dan tersier (Tabel IV.6).

Sebagai pusat pertumbuhan, Peukan Ateuk melayani kecamatan di wilayah utara Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Lambaro dan Lampeuneurut melayani kecamatan di wilayah barat dan tengah Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, wilayah pengaruh Kota Jantho hanya sebatas Kecamatan Seulimum, Lembah Seulawah dan Kecamatan Kuta Cot Glie, itupun lebih ke pelayanan sosial dan administrasi pemerintahan serta sedikit pelayanan sektor ekonomi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan aksesibilitas yang rendah.

TABEL IV.12
KONDISI PEREKONOMIAN DAN HIERARKI KOTA
DI KABUPATEN PIDIE

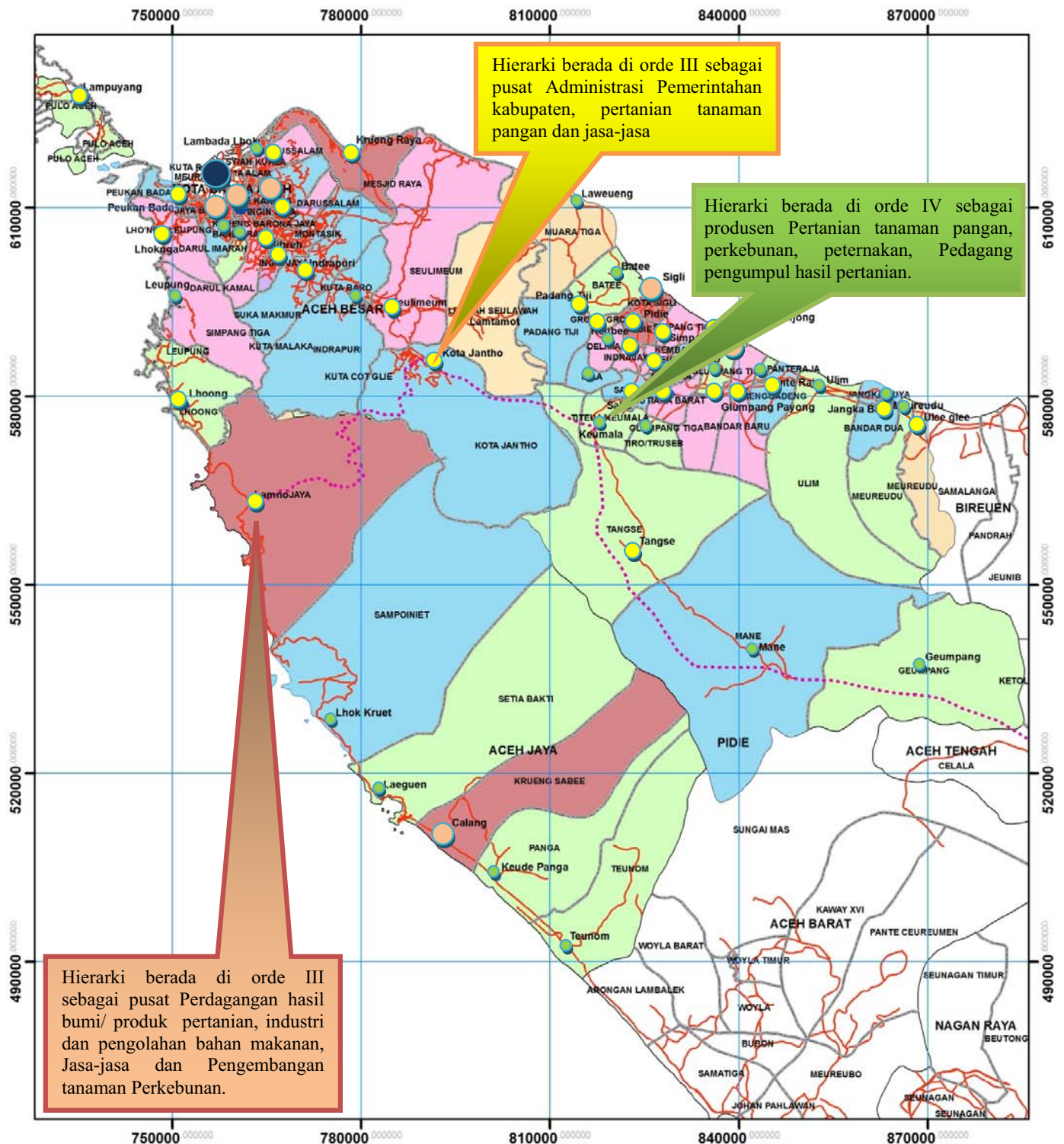
No	Kecamatan	Kota	Hierarki	Sektor Basis
1	Geumpang	Geumpang	IV	Pertanian.
2	Mane	Mane	IV	Pertanian, dan Bangunan/Konstruksi.
3	Meureudu	Meureudu	III	Pertanian, dan Perdagangan hotel dan restoran, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan
4	Meurah Dua	Meurah Dua	IV	Pertanian
5	Bandar Dua	Ulee Glee	III	Pertanian, Listrik, gas dan air bersih.
6	Jangka Buya	Jangka Buya	IV	Pertanian, dan Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan.
7	Ulim	Ulim	IV	Pertanian
8	Trienggadeng	Trienggadeng	III	Pertanian, Pertambangan dan Galian, dan Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan.
9	Panteraja	Panteraja	IV	Pertanian
10	Bandar Baru	Lueng Putu	III	Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa-jasa
11	Glumpang Tiga	Glumpang Minyeuk	III	Pertanian, Pertambangan dan Galian, Listrik, gas dan air bersih, Perumahan/Konstruksi.
12	Glumpang Baro	Glumpang Payong	IV	Pertanian
13	Mutiara	Beureunuen	III	Pertambangan dan Galian, Industri Pengolahan, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan Hotel dan Restoran, dan Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Lanjut ke halaman 100.

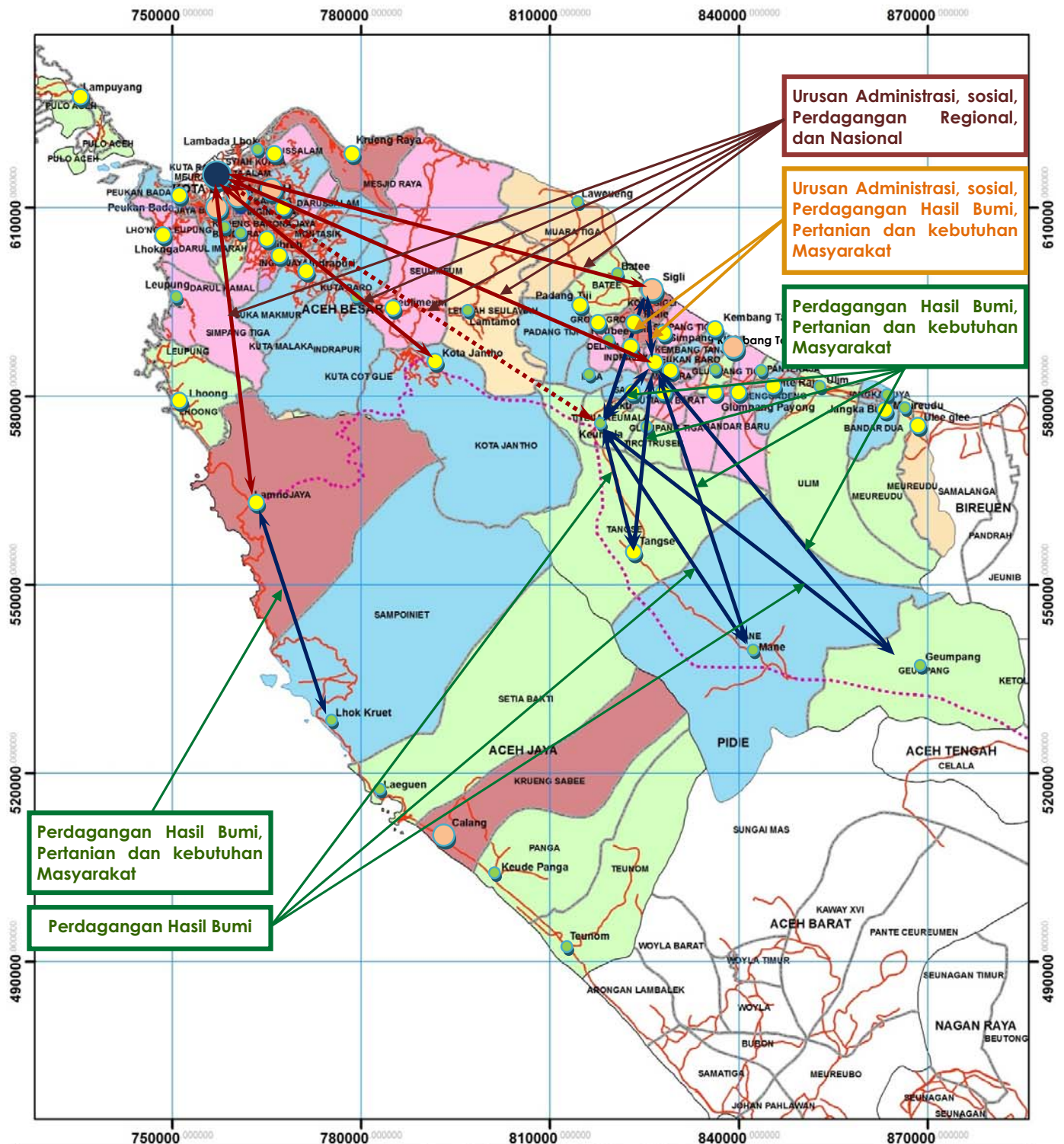
Lanjutan Tabel IV.12 halaman 99

No	Kecamatan	Kota	Hierarki	Sektor Basis
14	Mutiara Timur	Mesjid Yaman	III	Pertanian, Industri Pengolahan dan Bangunan/Konstruksi.
15	Tiro_Truseb	Tiro	IV	Pertanian
16	Tangse	Tangse	III	Pertanian
17	Titeu_Keumala	Keumala	IV	Pertanian
18	Sakti	Sakti	III	Pertanian, Bangunan/Konstruksi dan Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan
19	Mila	Mila	IV	Pertanian, Pertambangan dan Galian dan Keuangan persewaan dan jasa Perusahaan
20	Padang Tiji	Padang Tiji	III	Pertanian, Pertambangan dan Galian, Perdagangan Hotel dan Restoran, Transpotasi dan komunikasi dan Keuangan persewaan dan jasa Perusahaan
21	Delima	Reubee	IV	Pertanian, Industri Pengolahan dan Bangunan/Konstruksi.
22	Grong Grong	Grong-grong	III	Pertanian, Pertambangan dan Galian, Listrik, gas dan air bersih
23	Indrajaya	Caleue	III	Pertanian, Listrik, gas dan air bersih, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa
24	Peukan Baro	Lampoih Saka	III	Pertambangan dan Galian, Industri Pengolahan, Perdagangan Hotel dan Restoran, Transportasi dan komunikasi.
25	Kembang Tanjung	Kembang Tanjung	II	Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan Hotel dan Restoran.
26	Simpang Tiga	Simpang Tiga	III	Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Hotel dan Restoran
27	Kota Sigli	Sigli	II	Industri Pengolahan, Listrik, gas dan air bersih, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan Hotel dan Restoran, Transportasi dan komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
28	Pidie	Peukan Pidie	III	Industri Pengolahan, Listrik, gas dan air bersih, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan Hotel dan Restoran, Transportasi dan komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa.
29	Batee	Batee	IV	Pertanian.
30	Muara Tiga	Laweuing	IV	Pertanian, dan industri Pengolahan.

Sumber: Hasil Analisis 2008



 <p>Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang</p>	Peta Sektor Basis & Hierarki kota Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya			
	<p>Sektor Basis</p> <ul style="list-style-type: none"> primer primer,sekunder primer,sekunder,tersier primer,tersier sekunder,tesier 	<p>Hierarki</p> <ul style="list-style-type: none"> I II III IV 	<p>10,000 5,000 0 10,000 20,000</p> <p>Meters</p>	
	<p>Potensi dan interaksi Wilayah Belakang Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD</p>		<p>Gambar</p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">4.5</p>	<p>Halaman</p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">101</p>
<p>Sumber Hasil Analisis</p>				



Perdagangan Hasil Bumi, Pertanian dan kebutuhan Masyarakat

Perdagangan Hasil Bumi

Urusan Administrasi, sosial, Perdagangan Regional, dan Nasional

Urusan Administrasi, sosial, Perdagangan Hasil Bumi, Pertanian dan kebutuhan Masyarakat

Perdagangan Hasil Bumi, Pertanian dan kebutuhan Masyarakat




Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro
Semarang

Potensi dan interaksi Wilayah Belakang
Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD

Peta Interaksi Eksisting Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya

Sektor Basis	Hierarki
<ul style="list-style-type: none"> primer primer,sekunder primer,sekunder,tersier primer,tersier sekunder,tesier 	<ul style="list-style-type: none"> I II III IV

↔ Interaksi Lokal (antar Kecamatan dalam Kabupaten).
↔ Interaksi regional (antar Kabupaten atau ke provinsi)
⋯↔ Interaksi yang terjadi sesekali (Jarang)



10,000 5,000 0 10,000 20,000
Meters

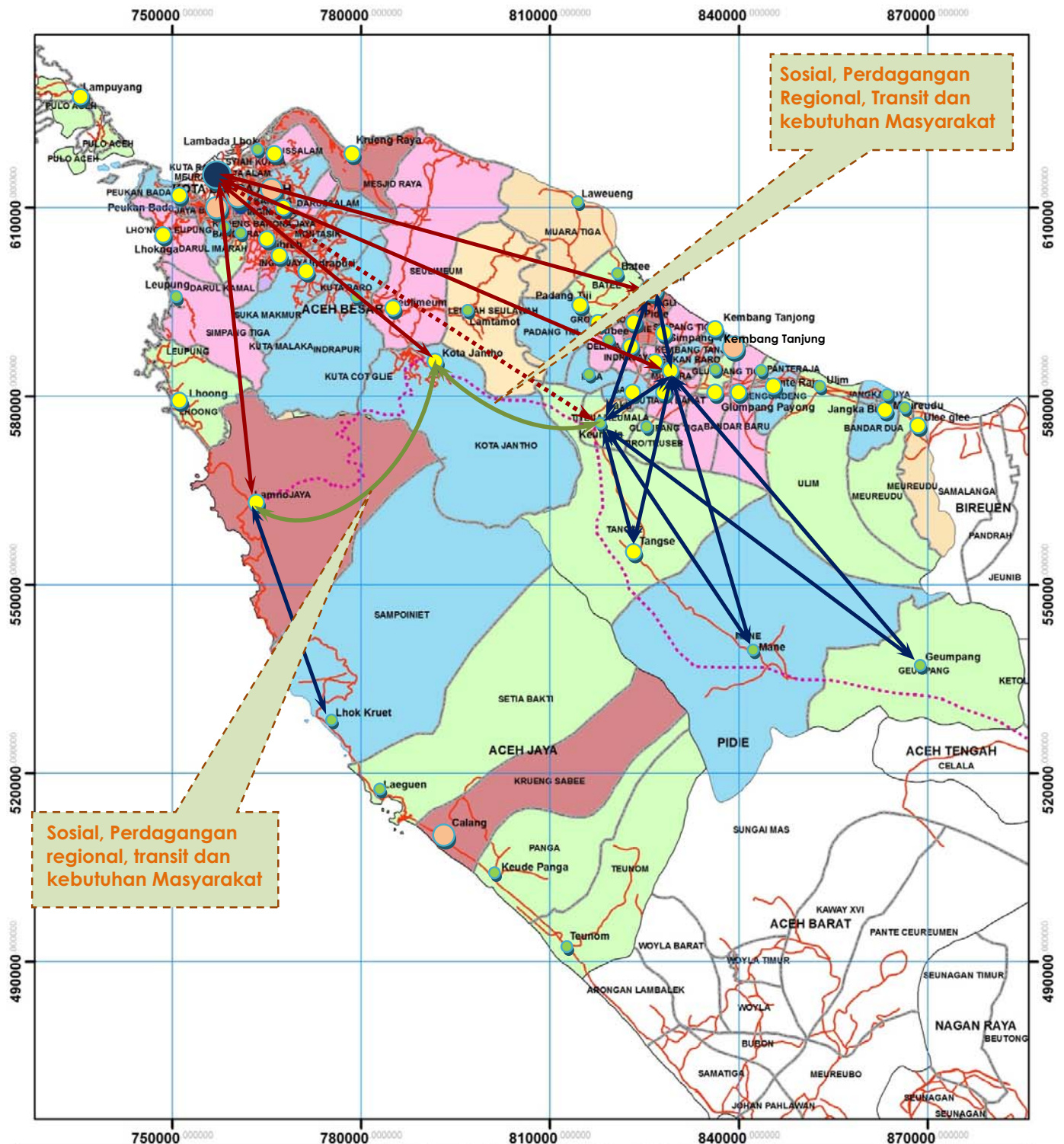
Gambar	Halaman
4.6	102
Sumber Hasil Analisis	

Dari Tabel IV.12 dan Gambar 4.5 dan 4.6 dapat dilihat bahwa pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Pidie adalah Sigli sebagai ibukota kabupaten, Peukan Pidie, Beureunuen, dan Padang Tiji. Sigli merupakan pusat kegiatan ekonomi untuk pasar regional, sedangkan Beureunuen merupakan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pesisir Kabupaten Pidie. Adapun Peukan Pidie dan Padang Tiji merupakan pusat kegiatan ekonomi untuk wilayah barat dan utara Kabupaten Pidie dan untuk pasar regional, khususnya Banda Aceh.

Kota Keumala hanya mempunyai peranan dalam kegiatan ekonomi antar kecamatan. Dari wawancara dengan dengan pelaku ekonomi di Kota Keumala dapat disimpulkan bahwa interaksi Kota Keumala saat ini hanya pada aktivitas sosial dan ekonomi antarkecamatan yang ada di wilayah belakang Kabupaten Pidie dan Kota Beureunuen, hanya pada saat-saat tertentu saja ada aktivitas ekonomi dengan Kota Jantho itupun melalui akses jalur timur Banda Aceh-Medan yang melalui Kota Sigli. “..saya juga keliling mengumpulkan barang dari masyarakat sampai ke kecamatan Mane, Tangse dan Geumpang karena hasil produksi di wilayah Keumala sedikit, harus menunggu lama untuk memenuhi kuota pengangkutan..”[PE-1/KK/2-1].

4.5. Analisis Peluang Interaksi Wilayah Belakang

Analisis terhadap interaksi yang terjadi antara wilayah Jantho, Lamno dan Keumala menunjukkan bahwa ketiga daerah ini dapat dikatakan belum berinteraksi baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan kewilayahan. Hal ini disebabkan oleh aksesibilitas yang tidak tersedia tetapi bila dikaitkan dengan pembangunan/peningkatan jalan Jantho – Lamno dan Jantho – Keumala yang akan membuka akses dan peluang aktivitas ekonomi bagi wilayah yang dilalui oleh ruas jalan tersebut.



Sosial, Perdagangan regional, transit dan kebutuhan Masyarakat

Sosial, Perdagangan Regional, Transit dan kebutuhan Masyarakat




Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
 Progam Pasca Sarjana
 Universitas Diponegoro
 Semarang

Potensi dan interaksi Wilayah Belakang
 Lamno-Jantho-Keumala Propinsi NAD

Peta Peluang Interaksi Wilayah Belakang Lamno, Jantho dan Keumala

Sektor Basis	Hierarki
primer	I
primer,sekunder	II
primer,sekunder,tersier	III
primer,tersier	IV
sekunder,tesier	

Interaksi Lokal (antar Kecamatan dalam Kabupaten).
 Interaksi regional (antar Kabupaten atau ke provinsi)
 Interaksi yang terjadi sesekali (Jarang)
 Peluang interaksi



10,000 5,000 0 10,000 20,000
 Meters

Gambar	Halaman
4.7	104

Sumber Hasil Analisis

Dengan peningkatan kedua ruas jalan tersebut, aksesibilitas wilayah tengah menjadi lebih baik sehingga arus transportasi komoditas pertanian yang menjadi andalan wilayah ini juga akan lebih lancar dan jangkauan pasar terhadap komoditas tersebut menjadi lebih luas. ”..dulu sudah ada yang melintasi jalan tersebut sampai ke Jantho malah sampai Indrapuri dengan sepeda motor, biasanya pekerja musiman untuk mencari kerja upahan memanen padi..” [PE-1/KK/6-2]. ”..peluang yang bisa saya ambil misalnya meningkatkan kegiatan saya dalam membeli hasil pertanian khususnya padi ke daerah-daerah yang dilalui jalan tersebut..” [PE-2/KK/10-1]. ”..karena jarak tempuh lebih dekat lewat Jantho dari pada lewat Beureunuen” [PE-4/KK/10-1].

Peta peluang interaksi wilayah belakang (Gambar 4.7) menunjukkan bahwa peluang interaksi yang akan terjadi antara Lamno, Jantho dan Keumala sangat besar dengan dibukanya dua ruas jalan tersebut. Hal ini disebabkan oleh singkatnya jarak tempuh transportasi hasil pertanian ke pasar yang dituju.

”pengaruhnya besar sekali karena kegiatan saya ke Banda Aceh dalam menjual hasil pertanian bisa melewati jalan tersebut yang jarak tempuhnya sangat dekat. Apabila lewat Beureunuen – Sigli – Banda Aceh jarak tempuhnya kira-kira 150 Km sedangkan lewat Jantho cuma 85 Km, apalagi kalau kondisi jalannya baik..”[PE-1/KK/9-1]

Pembukaan akses ini juga akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang cepat berkembang. Kota Keumala yang selama ini menjadi pengumpul hasil pertanian tingkat kecamatan akan terbuka peluangnya untuk melakukan perluasan aktivitas menjadi *supplier* tingkat pasar regional. ”..akan ada peluang, karena dengan terbukanya akses wilayah tengah ini saya bisa melakukan kegiatan tidak hanya di sekitar wilayah Keumala saja bahkan sampai ke Takengon..”[PE-1/KK/10-1].

Kota Jantho akan dapat berperan sebagai penyedia fasilitas transportasi angkutan barang dan terminal transit antardaerah serta pembangunan sektor industri pengolahan hasil pertanian yang datang dari jalur tengah tersebut. Dengan demikian Kota Lamno seperti halnya Keumala akan tumbuh menjadi *supplier* komoditas pertanian untuk pasar regional.

”akan ada peluang, karena banyak penduduk yang berada di wilayah belakang Kabupaten Pidie dan Aceh Besar akan memanfaatkan jalan tersebut karena jarak tempuh ke Banda Aceh jadi lebih dekat. Dan terminal Kota Jantho seperti yang Bapak lihat di sebelah kiri kios saya akan berfungsi dengan baik karena arus kendaraan umum penumpang dan barang akan bertambah”[PE-1/KJ/10-1]

Hasil wawancara dengan pelaku ekonomi, pejabat pemda di Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya serta camat di masing-masing wilayah belakang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan/pembangunan Jalan Jantho – Lamno dan Jantho – Keumala sampai ke Takengon merupakan langkah yang strategis dan akan sangat menguntungkan dalam mendistribusikan barang hasil produksi dan mendatangkan barang kebutuhan masyarakat.
- b. Mempersingkat jarak aktivitas ekonomi antarprovinsi karena telah terbukanya akses ke jalur tengah dan terbuka akses ke desa-desa yang berada di wilayah belakang.
- c. Program pembangunan pertanian ke desa terpencil di sepanjang koridor jalan tersebut dapat terlaksana.
- d. Memperlancar perpindahan barang dan orang antar daerah bila terjadi keadaan darurat (bencana).

- e. Membuka peluang kerja sama antardaerah dan lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia.

Terbukanya akses wilayah tengah akan memperpendek rantai tata niaga produk pertanian yang ada di wilayah tengah yang pada gilirannya akan memberikan margin keuntungan yang lebih besar kepada produsen. adapun terhadap Kabupaten Aceh Besar, pembangunan/peningkatan ke dua ruas jalan ini akan meningkatkan aksesibilitas Kota Jantho dan akan diiringi oleh pertumbuhan sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan transportasi disamping juga akan membuka lapangan kerja baru. Di bidang investasi, pemerintah keberadaan terminal kota jantho akan berfungsi dengan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil analisis hierarki kota, analisis sektor basis dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembangunan/peningkatan kedua ruas jalan tersebut memberikan implikasi yang baik dan membuka berbagai peluang interaksi antarmasyarakat dan wilayah yang dilalui oleh jalan tersebut antara lain:

- a. Mempersingkat jarak tempuh.
- b. Memperlancar dan memperluas cakupan arus pergerakan faktor produksi.
- c. Membuka peluang pertukaran komoditas.
- d. Memperkecil *over head cost* dalam aktivitas perdagangan.
- e. Membuka peluang aktivitas ekonomi lintas sektoral.
- f. Mempermudah pergerakan manusia dan bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat (Bencana).

- g. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian akibat lancarnya arus pertukaran faktor produksi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Adisasmita (2005) bahwa prasarana jalan berfungsi sebagai faktor pendorong berkembangnya sektor lain, yang berarti fungsi prasarana jalan dalam pembangunan bersifat lintas sektoral.

Bila dibandingkan keadaan sekarang (*existing*) dengan keadaan setelah adanya peningkatan dua ruas Jalan Jantho – Lamno dan Jantho – Keumala maka dapat dilihat adanya peningkatan interaksi yang telah terjadi dan juga terciptanya peluang interaksi baru seperti pada Tabel IV.13.

TABEL IV.13
PERBANDINGAN INTERAKSI YANG TERJADI DAN
PELUANGNYA DI KOTA JANTHO, LAMNO DAN KEUMALA

Interaksi saat ini (<i>Existing</i>)	Peluang Interaksi (<i>Future</i>)
Kota Lamno-Jantho-Keumala - Tidak ada interaksi	Kota Lamno-Jantho-Keumala - Perdagangan lokal antar kecamatan untuk produk pertanian. - Perdagangan regional dalam provinsi untuk produk pertanian. - Peluang untuk perdagangan regional antar provinsi dengan dibukanya akses wilayah tengah Lamno – Jantho – Keumala.
Kota Lamno-Banda Aceh - Perdagangan regional dengan Kota Banda Aceh untuk kebutuhan Produk non pertanian bagi Masyarakat Lamno dan sekitarnya - Perdagangan regional dalam provinsi untuk produk pertanian.	Kota Lamno-Banda Aceh - Peningkatan perdagangan regional dengan Kota Banda Aceh untuk kebutuhan produk non pertanian dan penyedia produk non pertanian antar kecamatan.
Kota Lamno –Kecamatan lain dalam Kabupaten - Perdagangan lokal antar kecamatan untuk produk pertanian	Kota Lamno –Kecamatan lain dalam Kabupaten - Peningkatan perdagangan lokal antar kecamatan untuk produk pertanian. - Penyedia produk non pertanian antar kecamatan. - Pusat perdagangan barang produksi lokal Kabupaten Aceh Jaya.

Lanjutan Tabel IV.13 halaman 108

Interaksi saat ini (Existing)	Peluang Interaksi (Future)
<p>Kota Jantho-Keumala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergerakan tenaga kerja musiman bidang pertanian ke wilayah Kota Jantho dan kecamatan sekitarnya pada saat panen raya padi di Kabupaten Aceh Besar. 	<p>Kota Jantho-Keumala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pergerakan tenaga kerja tidak hanya disektor pertanian dengan berkembangnya Kota Jantho. - Peningkatan perdagangan lokal antar kecamatan untuk produk pertanian dan non pertanian. - Peningkatan perdagangan dalam provinsi untuk produk pertanian - Peningkatan perdagangan regional dengan Kota Banda Aceh untuk kebutuhan produk non pertanian dan penyedia produk non pertanian antar kecamatan. - Peluang untuk menjadi distributor bagi produk pertanian dalam dan luar daerah. - Peluang untuk menjadi Kota Transit - Peluang untuk industri pengolahan produk pertanian
<p>Kota Jantho-Lamno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada Interaksi 	<p>Kota Jantho-Lamno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peluang untuk menjadi distributor bagi produk pertanian dalam dan luar daerah. - Peluang untuk menjadi Kota Transit - Peluang untuk industri pengolahan produk pertanian
<p>Kota Jantho-Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan regional untuk produk pertanian - Perdagangan regional dengan Kota Banda Aceh untuk kebutuhan produk non pertanian bagi masyarakat Jantho dan sekitarnya. 	<p>Kota Jantho-Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan regional untuk produk pertanian dan non pertanian. - Peluang perdagangan hasil industri dengan berkembangnya Kota Jantho

Sumber Hasil Analisis, 2008

Dari TabelIV.13 di atas terlihat bahwa pembangunan/peningkatan Jalan Jantho – Lamno dan Jantho – Keumala memberi banyak peluang dan keuntungan bagi perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Akses Lamno – Jantho – Keumala yang sebelumnya tidak ada interaksi terbuka peluangnya untuk perdagangan lokal antarkecamatan untuk produk pertanian, perdagangan regional dalam provinsi untuk produk pertanian, peluang untuk perdagangan regional antarprovinsi melalui jalur tengah ke Provinsi Sumatera Utara.

Terbukanya akses tersebut juga memberi banyak keuntungan kepada Kota Jantho antara lain; peningkatan pergerakan tenaga kerja, perdagangan lokal antarkecamatan, perdagangan dalam provinsi untuk produk pertanian dan nonpertanian, peningkatan perdagangan regional dengan Kota Banda Aceh melalui jalur tengah baik produk pertanian maupun non pertanian, peluang untuk menjadi distributor dan kota transit bagi produk pertanian dalam dan luar daerah dan berpeluang untuk investasi di bidang industri pengolahan produk pertanian. Kota Banda Aceh sendiri mempunyai peluang untuk berinteraksi, khususnya untuk aktivitas ekonomi dengan wilayah tengah dengan dibukanya ruas jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh, Jantho, Keumala Geumpang dan Takengon.

Rondinelli dan De Jong dalam Douglass (1998: 4) membagi peranan pembangunan masyarakat desa yang dimainkan oleh daerah perkotaan dan kota-kota pedesaan ke dalam tujuh peran antara lain:

- (1) Sebagai pusat kenyamanan konsumen dalam membeli barang tidak tahan lama dan barang tahan lama.
- (2) Sebagai pusat pelayanan publik yang lebih besar dan pelayanan pribadi.
- (3) Sebagai pusat keterkaitan dengan pasar (inter-)nasional untuk penjualan produk-produk pedesaan.
- (4) Sebagai pusat pelayanan dan suplai produksi.
- (5) Sebagai pusat pengolahan hasil pertanian dan sumberdaya alam.
- (6) Sebagai penyedia ketenaga-kerjaan *Nonagricultural* untuk tenaga kerja pedesaan.
- (7) Pusat informasi dan pengetahuan.

Bila pernyataan di atas dikaitkan dengan peluang interaksi yang terjadi dengan peningkatan dua ruas jalan yang membuka akses wilayah tengah tersebut, maka Kota Jantho, Lamno dan Keumala akan dapat memainkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan dalam pembangunan pedesaan di wilayah tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam konteks regional. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rondinelli dan Koppel dalam Douglass (1989: 5) bahwa peran yang potensial dari tiap kota atau kota pedesaan harus dibangun dari studi dengan konteks regional daripada melalui studi dari suatu kota secara parsial. Bagaimanapun, metode-metode pengembangan dengan memilih kota-kota kunci memfokuskan hanya di atribut-atribut dari kota-kota itu sendiri, dan satu-satunya aplikasi dunia nyata di dalam *Bicol Region* Negara Pilipina, tidak ada studi dari potensi pedesaan tercakup di program riset kebijakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Didasari oleh analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar masih berada di orde III yang menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas-fasilitas masih kurang memadai, kecuali fasilitas pemerintahan. Tidak berkembangnya Kota Jantho juga disebabkan oleh letaknya yang kurang strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari aksesibilitasnya yang rendah terutama di jaringan jalan yang menghubungkan Kota Jantho dengan kota-kota di sekitarnya. Kota ini hanya memiliki satu jalur akses utama dan merupakan *end point* karena jalur akses tersebut tidak menghubungkan Kota Jantho dengan wilayah lain. Disamping itu juga jumlah sarana transportasi umum yang kurang memadai dan terbatas jumlahnya menyebabkan kurangnya aktivitas di Kota Jantho.
2. Kota Keumala berada di orde IV yang didasarkan pada hasil analisis *scalogram* yang berarti jumlah fasilitas ekonomi dan sosialnya masih lebih sedikit dari kecamatan yang berada di sepanjang jalan nasional. Kecamatan Titeu Keumala adalah wilayah pertanian dengan komoditas

yang beragam antara lain padi, kedelai, rambutan, langsung, pinang, jahe dan beberapa jenis komoditas lain dalam jumlah yang kecil.

3. Kedudukan Kota Lamno berada di orde III yang terletak di pesisir pantai dan dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil dan perbatasan Sumatera Utara (Kota Sidikalang). Perannya sebagai pusat pertumbuhan masih sebatas melayani aktivitas masyarakat tingkat kecamatan. Kota ini dapat dikatakan hancur terkena bencana gempa Bumi dan gelombang tsunami dan baru tiga tahun ini dipulihkan kembali. Lamno merupakan kota pengumpul komoditas pertanian dan kehutanan untuk perdagangan antardaerah.
4. Interaksi Kota Lamno dengan wilayah lain dalam aktivitas ekonominya hanya ke Banda Aceh dan wilayah sekitarnya karena aksesibilitas ke wilayah lain belum tersedia kecuali via Banda Aceh. Jasa angkutan yang tersedia di Lamno masih bersifat lokal, aktivitasnya hanya melangsir barang dari Lamno ke Banda Aceh. Begitu juga dengan barang-barang kebutuhan masyarakat seperti obat-obatan pertanian menjadi lebih mahal karena harus membayar ongkos bongkar muat dan biaya angkut tambahan dari Banda Aceh ke Lamno.
5. Wilayah pengaruh Kota Jantho hanya sebatas Kecamatan Seulimum, Lembah Seulawah dan Kecamatan Kuta Cot Glie, itu pun lebih ke pelayanan sosial dan administrasi pemerintahan serta sedikit pelayanan

sektor ekonomi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan aksesibilitas yang rendah.

6. Interaksi Kota Keumala saat ini hanya pada aktivitas sosial dan ekonomi antarkecamatan yang ada di wilayah belakang Kabupaten Pidie dan kota Beureunuen, hanya pada saat-saat tertentu saja ada aktivitas ekonomi dengan Kota Jantho, itupun melalui akses jalur timur Banda Aceh - Medan yang melalui Kota Sigli.
7. Analisis terhadap interaksi eksisting yang terjadi antara Wilayah Jantho, Lamno dan Keumala menunjukkan bahwa ketiga daerah ini dapat dikatakan belum berinteraksi, baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan kewilayahan. Hal ini disebabkan oleh aksesibilitas yang tidak tersedia.
8. Pembangunan/peningkatan Jalan Jantho – Lamno dan Jantho – Keumala yang akan membuka akses dan peluang aktivitas ekonomi bagi wilayah yang dilalui oleh ruas jalan tersebut. Dengan peningkatan kedua ruas jalan tersebut aksesibilitas wilayah tengah menjadi lebih baik, sehingga arus transportasi komoditas pertanian yang menjadi andalan wilayah ini juga akan lebih lancar dan jangkauan pasar terhadap komoditas tersebut menjadi lebih luas.
9. Pembukaan akses Jantho-Lamno dan Jantho-Keumala akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang cepat berkembang antara lain Kota Keumala, yang akan mempunyai peluang untuk melakukan perluasan aktivitas menjadi supplier tingkat pasar regional. Kota Jantho akan dapat

berperan sebagai penyedia fasilitas transportasi angkutan barang dan terminal transit antardaerah serta pembangunan sektor industri pengolahan hasil pertanian yang datang dari jalur tengah tersebut. Adapun Kota Lamno seperti halnya Keumala akan tumbuh menjadi *supplier* komoditas pertanian untuk pasar regional.

10. Dengan terbukanya akses di wilayah tengah yang menghubungkan Kota Jantho, Lamno dan Keumala maka ke tiga kota ini akan dapat memainkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan dalam pembangunan pedesaan di wilayah tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam konteks regional.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan analisis yang telah dilakukan terhadap potensi dan interaksi wilayah Lamno – Jantho – Keumala dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan dan peningkatan Jalan Jantho – Lamno dan Jantho Keumala yang saat ini terhenti akibat hal-hal teknis dan politis perlu segera dilanjutkan karena akses tersebut merupakan akses strategis yang akan memberikan banyak keuntungan baik dari aspek pembangunan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar perlu memikirkan dan merancang program pembangunan sejalan dengan pembangunan dan

peningkatan jalan tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan terbuka aksesnya ke Kota Jantho.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie hendaknya dapat memprioritaskan program pembangunan pertanian di wilayah selatan kabupaten yang meliputi wilayah Geumpang, Tangse, Mane dan Keumala yang ada di koridor Jalan tersebut.
4. Pemda Aceh Jaya juga melakukan percepatan pembangunan pertanian di koridor Jalan Jantho Lamno, karena wilayah tersebut masih merupakan wilayah yang kurang tersentuh pembangunannya.
5. Perlu adanya studi lanjutan terhadap pola pembangunan pertanian dan perdagangan antarketiga wilayah tersebut, sehingga dapat direkomendasikan hal-hal yang lebih detail mengenai pembangunan dan pengembangan wilayah tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2005.** *Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah*, Cetakan 1, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Aji, Firman B, 1990.** *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Annonymous, 2006.** *Deskripsi Kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD – Nias*. Banda Aceh.
- Arikunto, Suharsimi, 2006,** *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reka Cipta cetakan ketiga belas.
- Arsyad, Lincoln, 1999,** *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPHEUGM.
- Bharata, Muhammad Iqbal, 2003,** *Peranan Penetapan Jantho Sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Besar Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Blakeley, Edward J., 1989,** *Planning Local Economic Development, Theory dan Practice*, Sage Publication.
- Boudeville, J., 1966,** *Problems of Regional Economic Planning*, Edinburgh U.P.
- Brannen, Julia (ed), 2002.** *Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar.
- CTRID, 2002,** *Proyek Percontohan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Berkelanjutan (SRIDP)*, Sekretariat Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perdesaan).
- Daldjoeni, N, 1997,** *Geografi Baru, Cetakan Kedua 1997*, Alumni, Bandung).
- Daldjoeni, N, 1998,** *Geografi Kota dan Desa, Bandung: Penerbit Alumni ITB.*
- Dirjen Bina Marga, 2008,** *Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Peningkatan Jalan Jantho-Keumala-Geumpang-Pameue Genting Gerbang-Takengn*. Banda Aceh
- Douglass, M, 1998,** *A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia Third World Planning Review*, Vol 20, No. 1.

- Friedman, J.P, and Douglas, M, 1976** *Agropolitan Development Towards a New Strategy for regional Planning in Asia*, In UNCRB).
- Glasson, John. 1983.** *An Introduction Regional Planning*. London: Second Edition, Hutchinson and Co. (Plublisher) Ltd).
- Hanani AR, Nuhfil et. al., 2003**, *Strategi Pembangunan Pertanian*, Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996.** *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidesindo).
- Lynch, Kenneth, 2005**, *Rural – Urban Interaction in The Developing World*, London And New York, Rutledge.
- May, Hendarmini, 1984.** *Studi Pembagian Wilayah Administrasi Sebagai Usaha Penunjang Pemerataan Pembangunan*, Dep. Planologi, ITB. Bandung).
- Myrdal, Gunnar, 1957**, *Economic Theory In Underdeveloped Regions*, Duckworth, London).
- Nazir, Muhammad, 2003**, *Metode Penelitian*, Jakarta: Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia.
- Oppeinheim, Nobert, 1980**, *Applied Models in Urban and Regional Analysis*).
- Richarson, Harry, W, 2001**, *Dasar-dasar dan Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan Paul Sihotang, Jakarta: Lembaga Penerbit UI.
- Rodenelli, D. A, 1985**, *Applied Methods of Regional Analysis, The Spatial Dimensions of Development Policy*, New York: Westview Press.
- Parr, J. B. 1973**, *Growth Poles, Regional Development and Central Place Theory*, CarfaxPublishing).
- Perroux, F., 1964**, *La Nation De Pole de Croissance, i' economic de xxeme siecle*, edisi ke-2, halaman 143, Paris.
- Setyono, Jawoto Sih, 2003**, *Analisis keputusan (Decision analysis):Dasar-Dasar dan Teknik Analisis*, UNDIP, Semarang).
- Soejarto, Djoko, 1989**, *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Perencanaan Lokal*, Bandung: Departemen Planologi ITB).
- Sukirno, Sadono, 1981**, *Beberapa Aspek Persoalan dalam Pembangunan Daerah*, EI, Jakarta.
- Soejarto, Djoko, 1981**, *Implikasi Faktor-faktor Perkembangan Kota Secara Fungsional, Laporan Penelitian ITB Bandung*.

Stohr, Walter B., 1981, *Development in Developing Countries*, John Willey and Sons, Chichester.

Tarigan, Robinson, 2004, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Warpani, Suwardjoko, 1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung: Penerbit ITB.

Yunus, H, S., 2001. *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.